



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN**

**RANCANGAN TEKNOKRATIK
RPJMD
KABUPATEN BULUNGAN
2025-2029**





KATA PENGANTAR

Didalam Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah perlu menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan baik untuk jangka Panjang maupun jangka menengah Daerah. Kemudian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka Pemerintah Kabupaten Bulungan tentunya memiliki kewajiban pula dalam menyiapkan rencana pembangunan, khususnya rencana pembangunan jangka menengah daerah terutama untuk persiapan pemilihan Kepala Daerah periode 2025-2029 dalam bentuk Rancangan Teknokratik

Dokumen ini merupakan dokumen Rancangan Teknokratik Rancangan RPJMD Kabupaten Bulungan, yang memuat rumusan gambaran umum kondisi daerah, gambaran keuangan daerah, isu strategis pembangunan jangka menengah daerah, serta rekomendasi bagi rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Bulungan ini. Harapan kami dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD ini dapat memberikan arahan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah, dan sebagai masukan bagi calon kepala daerah maupun kepala daerah terpilih nantinya.

Tanjung Selor, 2024



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	ix

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	1-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	1-3
1.4. Sasaran.....	1-3
1.5. Ruang Lingkup	1-4
1.6. Keluaran.....	1-4
1.7. Sistematika Pembahasan.....	1-4

BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	2-1
2.1.1. Geografi.....	2-1
2.1.2. Demografi.....	2-8
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	2-10
2.2.1. Aspek Kesejahteraan Ekonomi.....	2-10
2.2.1.1. PDRB	2-11
2.2.1.2. Laju Inflasi	2-17
2.2.1.3. PDRB per Kapita	2-19
2.2.1.4. Tingkat Kemiskinan	2-20
2.2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia	2-20
2.2.2. Aspek Kesejahteraan Sosial Budaya.....	2-22
2.2.2.1. Angka Melek Huruf	2-22



2.2.2.2.	Rata-rata Lama Sekolah.....	2-24
2.2.2.3.	Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni	2-25
2.2.2.4.	Angka Usia Harapan Hidup.....	2-25
2.2.2.5.	Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka	2-29
2.3.	Aspek Daya Saing	2-30
2.3.1.	Daya Saing Infrastruktur.....	2-32
2.3.1.1.	Aksesibilitas Daerah	2-33
2.3.1.2.	Infrastruktur Air Bersih	2-35
2.3.1.3.	Infrastruktur Energi Listrik.....	2-36
2.3.2.	Daya Saing Iklim Investasi	2-37
2.3.2.1.	Angka Kriminalitas	2-37
2.3.2.2.	Kemudahan Perijinan.....	2-38
2.4.	Aspek Pelayanan Umum	2-38
2.4.1.	Pendidikan.....	2-38
2.4.1.1.	Angka Partisipasi Sekolah.....	2-38
2.4.1.2.	Rasio Ketersediaan Sekolah	2-39
2.4.1.3.	Rasio Guru Terhadap Murid.....	2-40
2.4.1.4.	Rasio Jumlah Murid dan Sekolah.....	2-40
2.4.2.	Aspek Kesehatan.....	2-41
2.4.2.1.	Angka Kematian Bayi.....	2-41
2.4.2.2.	Angka Kematian Balita	2-43
2.4.2.3.	Angka Kematian Ibu Melahirkan.....	2-45
2.4.2.4.	Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu.....	2-46
2.4.2.5.	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	2-47
2.4.2.6.	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	2-48
2.4.2.7.	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk	2-48
2.4.2.8.	Prevalensi Stunting.....	2-48
2.4.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	2-49
2.4.3.1.	Kondisi Jalan	2-49



2.4.3.2.	Rasio Tempat Beribadah per Satuan	
	Penduduk	2-51
2.4.3.3.	Luasan RTH Publik Sebesar 20 % dari luas	
	Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	2-51
2.5.	Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana	
	Publik.....	2-51
2.5.1.	Asumsi Dasar	2-51
2.5.2.	Proyeksi Demografi 20 Tahun Mendatang	2-52
2.5.3.	Rasio Ketergantungan dan Bonus Demografi	2-53
2.5.4.	Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana	2-54
2.6.	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	2-56

BAB 3 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1.	Gambaran Penyelenggaraan Keuangan Daerah.....	3-1
3.2.	Kinerja Keuangan Kabupaten Bulungan	3-2
	3.2.1. Kinerja Pelaksanaan APBD.....	3-2
	3.2.2. Neraca Daerah	3-8
	3.2.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	3-13
3.3.	Kerangka Pendanaan	3-20
	3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja	3-20
	3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan	
	Kabupaten Bulungan.....	3-25

BAB 4 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1.	Isu Strategis Global	4-1
	4.1.1. Isu Strategis terkait SDGs.....	4-1
	4.1.2. Isu Terkait Perkembangan Demografi Global.....	4-2
4.2.	Isu Strategis Pembangunan Nasional	4-3
4.3.	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara	4-5
4.4.	Arahan dalam RPJPD Kabupaten Bulungan 2025 - 2045.....	4-10
4.5.	Isu Strategis Daerah Kabupaten Bulungan	4-12



BAB 5 REKOMENDASI

BAB 6 PENUTUP



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bulungan.....	2-2
Tabel 2.2	Jumlah dan Luas Rata-rata Wilayah Kelurahan dan Desa di Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Bulungan.....	2-3
Tabel 2.3	Keadaan Curah Hujan, Hari Hujan, dan Penyinaran Matahari 2021	2-7
Tabel 2.4	Keadaan Suhu Udara, Lembab Nisbi, dan Tekanan Udara Dirinci per Bulan di Kabupaten Bulungan	2-7
Tabel 2.5	Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bulungan	2-9
Tabel 2.6	Distribusi dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk pada Masing-masing Kecamatan	2-10
Tabel 2.7	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Bulungan	2-14
Tabel 2.8	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bulungan (juta rupiah), 2018-2022	2-12
Tabel 2.9	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bulungan (juta rupiah), 2015-2019	2-14
Tabel 2.10	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bulungan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (2010) Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)	2-17
Tabel 2.11	PDRB Perkapita Kabupaten Bulungan Tahun 2017-2021	2-19
Tabel 2.12	Garis Kemiskinan Kabupaten Bulungan	2-21
Tabel 2.13	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bulungan Tahun 2020-2022	2-21
Tabel 2.14	Komponen Penyusunan IPM Kabupaten Bulungan tahun 2022	2-22
Tabel 2.15	Persentase penduduk 15 Tahun keatas menurut Karakteristik dan Kemampuan Membaca dan Menulis	2-24



Tabel 2.16 Perkembangan nilai ALS di Kabupaten atau Kota Provinsi Kalimantan Utara	2-25
Tabel 2.17 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Formal dan Nonformal Penduduk menurut karakteristik dan Jenis Kelamin Tahun 2022	2-26
Tabel 2.18 Persentase Perempuan Berumur 15-49 tahun yang pernah melahirkan dua tahun terakhir menurut karakteristik dan berat badan bayi yang dilahirkan terakhir, 2022	2-28
Tabel 2.19 Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka Kabupaten Bulungan 2020-2022.....	2-29
Tabel 2.20 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara	2-31
Tabel 2.21 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara	2-35
Tabel 2.22 Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023	2-36
Tabel 2.23 Angka Kriminalitas di Kabupaten Bulungan Setiap tahunnya	2-37
Tabel 2.24 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekoah Kabupaten Bulungan 2021/2023	2-39
Tabel 2.25 Rasio Ketersediaan Sekolah.....	2-39
Tabel 2.26 Jumlah Guru, Jumlah Murid, dan Rasio Guru Murid Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Bulungan, 2021 dan 2022	2-40
Tabel 2.27 Jumlah murid, Jumlah Sekolah dan Rasio Murid dan Sekolah	2-41
Tabel 2.28 Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Bulungan tahun 2018-2020.....	2-47
Tabel 2.29 Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk di Kabupaten Bulungan tahun 2018-2020.....	2-47
Tabel 2.30 Rasio Dokter Per jumlah Penduduk di Kabupaten Bulungan Tahun 2021-2022	2-48
Tabel 2.31 Rasio Tenaga medis Per satuan penduduk di Kabupaten	



Bulungan Tahun 2020.....	2-49
Tabel 2.32 Kondisi Jalan Kab/Kota di Kabupaten Bulungan 2017-2022.....	2-50
Tabel 2.33 Rasio Tempat Beribadah Persatuan Penduduk di Kabupaten Bulungan tahun 2022.....	2-50
Tabel 2.34 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Bulungan	2-52
Tabel 2.35 Proyeksi Rasio KetergantunganKabupaten Bulungan 2025-2045.....	2-54
Tabel 2.36 Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal	2-55
Tabel 2.37 Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Air Minum	2-55
Tabel 2.38 Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Listrik.....	2-55
Tabel 2.39 Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Penanganan Persampahan berdasarkan jumlah Produksinya	2-55
Tabel 2.40 Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Prasarana Kesehatan.....	2-56
Tabel 2.41 Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Prasarana Pendidikan	2-56
Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019-2023 Kabupaten Bulungan	3-4
Tabel 3.2 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah per 31 Desember 2021, 2022, dan 2023 Kabupaten Bulungan	3-9
Tabel 3.3 Rasio-rasio Keuangan Tahun 2021-2023 Kabupaten Bulungan.....	3-12
Tabel 3.4 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2021-2023 Kabupaten Bulungan	3-14
Tabel 3.5 Defisit Riil Anggaran tahun 2021-2023 Kabupaten Bulungan.....	3-15
Tabel 3.6 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2021-2023 Kabupaten Bulungan.....	3-16
Tabel 3.7 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2021-2023	3-18
Tabel 3.8 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten Bulungan.....	3-22
Tabel 3.9 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten Bulungan.....	3-26
Tabel 3.10 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten Bulungan	3-27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Administratif Kabupaten Bulungan	2-5
Gambar 2.2	Laju Pertumbuhan kumulatif pengeluaran perkapita dan inflasi di Kabupaten Bulungan	2-17
Gambar 2.3	Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021	2-21
Gambar 2.4	Perkembangan AHH di Kabupaten Bulungan Periode 2015-2019	2-26
Gambar 2.5	Laju Pertumbuhan AHH di Kabupaten Bulungan.....	3-26
Gambar 2.6	Konsumsi Rumah Tangga 2019-2023.....	3-31
Gambar 2.7	Grafik Perkembangan Panjang Jalan di Kabupaten Bulungan tahun 2015-2019.....	3-32
Gambar 2.8	Grafik Perkembangan Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Bulungan tahun 2015-2019.....	3-33
Gambar 2.9	Grafik Perkembangan Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Bulungan 2015-2019.....	3-33
Gambar 2.10	Jumlah Kematian Bayi Menurut Puskesmas di Kabupaten Bulungan 2022.....	3-41
Gambar 2.11	Angka Kematian Balita Menurut Puskesmas di Kabupaten Bulungan Tahun 2022.....	3-43
Gambar 2.12	Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten Bulungan Tahun 2022.....	3-44
Gambar 2.13	Prevalensi Stunting Kabupaten Bulungan 2021-2023.....	3-49
Gambar 2.14	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Bulungan 2025-2045.....	3-53
Gambar 2.15	Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Bulungan	3-61
Gambar 2.16	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bulungan	3-68
Gambar 2.17	Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Bulungan.....	3-70



1 | PENDAHULUAN

Pada bab ini akan disampaikan terkait dengan latar belakang penyusunan Rancangan Teknokratik, pelaksanaan penyusunan hingga batasan-batasan dalam substansi Rancangan Teknokratik RPJMD sebagai masukan bagi penyusunan RPJMD 2025-2029 oleh pimpinan daerah terpilih.

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah perlu menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan baik untuk jangka Panjang maupun jangka menengah Daerah. Kabupaten Bulungan tentunya memiliki kewajiban pula dalam menyiapkan rencana pembangunan nasional, khususnya rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Sehubungan dengan berakhirnya periode Rencana pembangunan jangka menengah daerah sebelumnya maka Pemerintah Kabupaten Bulungan perlu menyiapkan rencana pembangunan jangka menengah daerah selanjutnya atau untuk tahun 2025-2029 sebagai tahapan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan dengan periode sebelumnya dan tentunya berkelanjutan untuk kebutuhan pembangunan di masa mendatang. Rencana pembangunan ini disusun dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bulungan,

Penyusunan RPJMD diawali dengan perumusan natak teknokratik RPJMD yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Rancangan Awal RPJMD yang nantinya menjadi perwujudan visi dan misi kepala daerah dalah Sasaran dan Indikator Kinerja Daerah yang kemudian dijabarkan dalam rangkaian program dan kegiatan yang diselenggarakan dalam masa kepemimpinan Kepala Daerah. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD pada tahap akhir nantinya menjadi masukan bagi diskusi Kepala Daerah baik dengan masyarakat melalui konsultasi publik



dan juga diskusi Kepala Daerah dengan DPRD, yang selanjutnya menjadi masukan bagi musyawarah perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bulungan. Isu strategis daerah, visi dan misi Kepala Daerah, serta kemampuan sumber daya daerah menjadi masukan penting bagi penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kab.Bulungan ini.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dari penyusunan dokumen ini sebagai instrumental input yang perlu diperhatikan/diacu. Secara umum dasar hukum tersebut dapat dilengkapi sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
- f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



- g) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini adalah sebagai masukan dan menjadi satu kesatuan bagian tahapan masukan bagi penyusunan dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bulungan 2025- 2029 dan juga menjadi arahan bagi calon Kepala Daerah dalam perumusan visi dan misi sebagai bentuk acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bulungan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan dari penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Bulungan 2025-2029 ini adalah merumuskan kondisi wilayah serta isu strategis pembangunan daerah secara teknokratis yang diwujudkan kedalam:

- a. Kajian Teknokratis kondisi pembangunan daerah
- b. Perumusan Isu strategis pembangunan daerah
- c. Perumusan Tujuan dan Sasaran;
- d. Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan;
- e. Perumusan Program Pembangunan Daerah;

1.4. Sasaran

Secara substansial, penyusunan Rancangan Teknokratik ini diperlukan dalam menjamin kepastian dan pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka menengah yang terencana,



terpadu, tepat sasaran, efisien dan berkesinambungan. Secara khusus asaran dari kegiatan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Bulungan 2025-2029 ini antara lain adalah :

- a. Data dan informasi serta deskripsi tentang gambaran umum kondisi daerah
- b. Data dan informasi serta deskripsi tentang gambaran keuangan daerah
- c. Data dan informasi serta deskripsi tentang isu strategis daerah
- d. Data dan informasi serta penjabaran dan Perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
- e. Data dan informasi serta Perumusan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
- f. Data dan informasi serta Perumusan Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
- g. Data dan informasi serta Deskripsi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan dari Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD ini antara lain:

1. Melakukan kajian pustaka dan peraturan perundang-undangan terkait perencanaan pembangunan daerah jangka menengah
2. Melakukan pengumpulan data sekunder terkait dengan data potensi dan statistik daerah
3. Melakukan kajian dan perumusan isu strategis pembangunan jangka menengah daerah
4. Melakukan perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah
5. Melakukan kajian yang terkait dengan substansi pada sasaran kegiatan

1.6. Keluaran

Keluaran dari penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD ini tentunya adalah dokumen Rancangan Teknokratik yang menjadi masukan bagi calon pimpinan daerah dalam menyusun visi dan misi serta sebagai masukan bagi penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kab.Bulungan 2025-2029.oleh pimpinan daerah terpilih;



1.7. Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, secara substansi muatan dokumen dokumen RPJMD antara lain terdiri dari rancangan teknokratik RPJMD; perumusan isu strategis pembangunan daerah, perumusan tujuan dan sasaran; perumusan strategi dan arah kebijakan; perumusan program pembangunan Daerah. Kemudian secara sistematis, dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD ini agar lebih mudah dalam penyampaian dan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bulungan, dan sesuai dengan arahan petunjuk teknis penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD dari Kementerian Dalam Negeri maka akan terdiri dari 6 (Enam) Bab pembahasan, yang antara lain terdiri dari :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab 1 Pendahuluan ini antara lain disusun dengan merumuskan latar belakang penyusunan Rancangan Teknokratik, identifikasi dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika pembahasan

BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pada Bab ini disusun dengan melakukan pengolahan data dan informasi yang telah dikumpulkan dari pendekatan 4 (empat) aspek pembangunan yang disertai analisis deskriptif dan analisis diagnostic. Analisis dilakukan sekurang-kurangnya dengan menggunakan data 5 (lima) tahun sebelumnya (tahun 2019-2023). Kajian pada Bab II ini sekurang-kurangnya memuat terkait aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan

BAB 3 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bagian ini sekurang-kurangnya memuat gambaran ringkas kondisi keuangan daerah khususnya, baik kondisi keuangan daerah dalam lima tahun terakhir, maupun gambaran proyeksi keuangan daerah untuk lima tahun kedepan

BAB 4 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Pada bagian ini diidentifikasi dan dirumuskan permasalahan dan isu strategis daerah yang merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara



capaian pembangunan dan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan ini dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam subbab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan/signifikan.

BAB 5 REKOMENDASI

Pada bagian ini berisi rekomendasi kebijakan pembangunan jangka menengah daerah yang dapat digunakan dalam penyusunan dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kab.Bulungan secara keseluruhan dan menjadi masukan bagi visi, misi, dan program prioritas calon kepala daerah yang akan mengikuti kontestasi pilkada 2024

BAB 6 PENUTUP

2 | GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pada bab ini akan disampaikan terkait dengan gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bulungan sebagai dasar dalam melakukan kajian teknokratis terkait dengan pencapaian kinerja daerah yang tergambar pada data statistik dan gambaran umum daerah

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Geografi

Kabupaten Bulungan secara astronomis, terletak antara 20 09' 19" – 30 34' 48" Lintang Utara dan 1160 04' 41" – 1170 57' 56" Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Bulungan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Berau;
- Sebelah Barat : Kabupaten Malinau;
- Sebelah Timur : Laut Sulawesi dan Kota Tarakan.

Luas Wilayah Kabupaten Bulungan sekitar 13.181,92 km² yang terbagi menjadi 10 Kecamatan. Kecamatan yang memiliki wilayah paling luas adalah Kecamatan Peso dengan luas wilayah mencapai 3.142,79 km² atau 23,84% dari luas Kabupaten Bulungan. Diurutan kedua ada Kecamatan Sekatak dengan luas wilayah mencapai 1.993,98 km² atau 15,13%, selanjutnya Kecamatan Tanjung Palas dengan luas wilayah mencapai 1.722,74 km² dan Kecamatan Peso Hilir dengan luas wilayah 1.639,71 km². Sementara itu Kecamatan yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah kecamatan Bunyu dengan luas wilayah sebesar 198,32 km² atau 1,50% dari luas wilayah Kabupaten Bulungan, Kemudian diikuti oleh Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Tanjung Selor dan Tanjung Palas Utara. Selain wilayah daratan yang berada di Pulau Kalimantan, Kabupaten Bulungan juga memiliki wilayah daratan yang berupa pulau-pulau yang jumlahnya mencapai 97 pulau yang tersebar di tujuh Kecamatan.

**Tabel 2.1. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bulungan**

Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Luas Wilayah (%)	Jumlah Pulau
1. Bunyu	Bunyu Barat	198,32	1,50	7
2. Peso	Long Bia	3.142,79	23,84	-
3. Peso Hilir	Long Tungu	1.639,71	12,44	-
4. Sekatak	Sekatak Buji	1.993,98	15,13	15
5. Tanjung Palas	Gunung Putih	1.755,74	13,32	1
6. Tanjung Palas Barat	Long Beluah	1.064,51	8,08	3
7. Tanjung Palas Tengah	Salim Batu	624,95	4,74	-
8. Tanjung Palas Timur	Tanah Kuning	1.277,81	9,69	1
9. Tanjung Palas Utara	Karang Agung	806,34	6,12	59
10. Tanjung Selor	Tanjung Selor Hilir	677,77	5,14	11
Kabupaten Bulungan		13.181,92	100,00	97

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan, 2023

Secara Administrasi 10 Kecamatan di Kabupaten Bulungan di bagi menjadi 81 Kelurahan dan Desa. Dilihat dari jumlah desa per kecamatan ada dua hal yang menarik, pertama kesenjangan luas desa relatif sangat besar, kedua selama lima tahun terakhir tidak terjadi pemekaran desa dalam kecamatan yang wilayahnya luas (BPS, Kabupaten Bulungan, 2020) sebagai Upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.



Tabel 2.2 Jumlah dan Luas Rata-rata Wilayah Kelurahan dan Desa di Masing-masing Kecamatan Kabupaten Bulungan

Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Luas Wilayah (%)	Jumlah Des/Kel	Proporsi luas Desa (%)
Bunyu	Bunyu Barat	198,32	1,50	3	0,50%
Peso	Long Bia	3.142,79	23,84	10	2,38%
Peso Hilir	Long Tungu	1.639,71	12,44	6	2,07%
Sekatak	Sekatak Buji	1.993,98	15,13	22	0,69%
Tanjung Palas	Gunung Putih	1.755,74	13,32	9	1,48%
Tanjung Palas Barat	Long Beluah	1.064,51	8,08	5	1,62%
Tanjung Palas Tengah	Salim Batu	624,95	4,74	3	1,58%
Tanjung Palas Timur	Tanah Kuning	1.277,81	9,69	8	1,21%
Tanjung Palas Utara	Karang Agung	806,34	6,12	6	1,02%
Tanjung Selor	Tanjung Selor Hilir	677,77	5,14	9	0,57%
Kabupaten Bulungan		13.181,92	100,00	81	100,00%

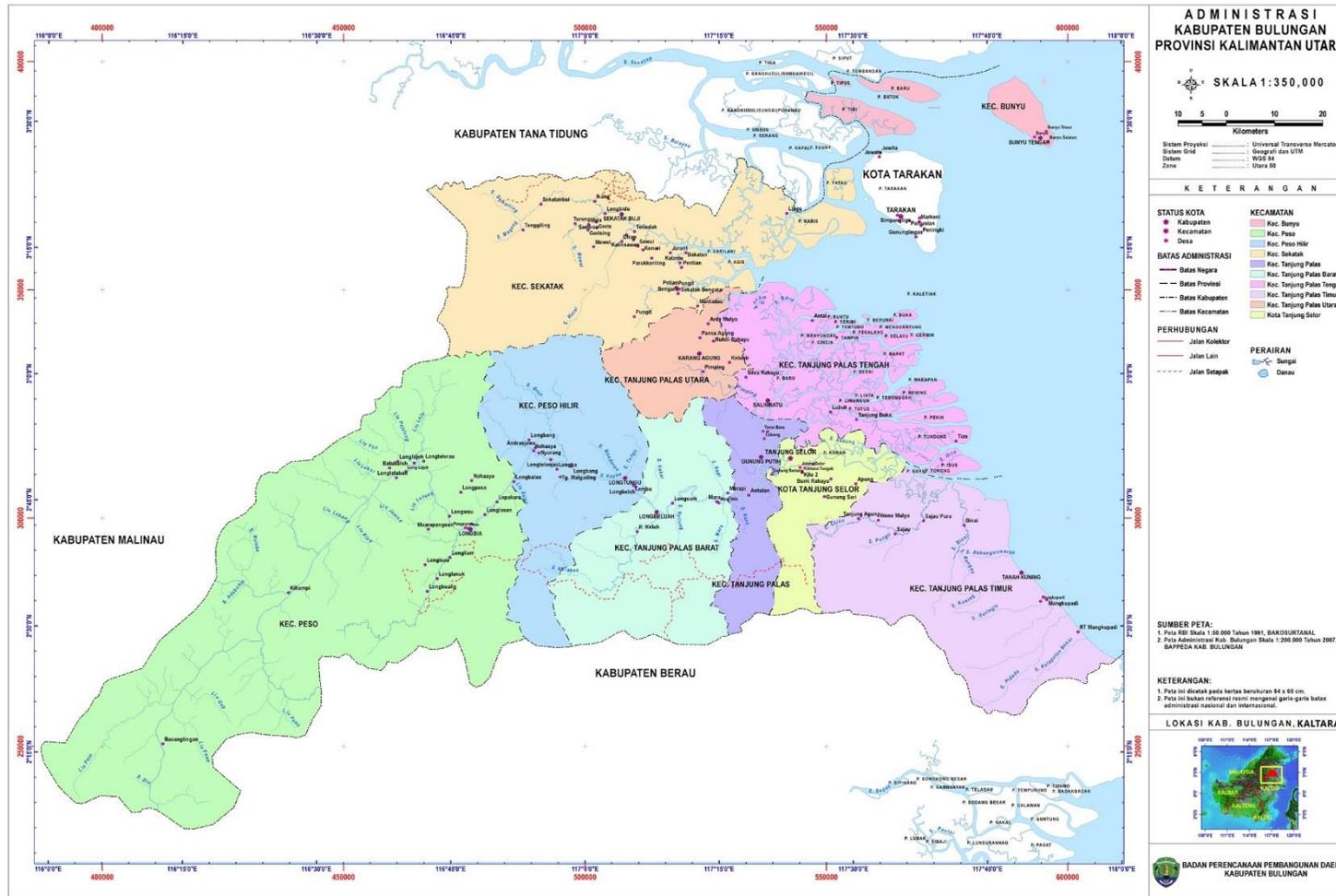
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan,2023

Pemerataan Pembangunan pedesaan di Kabupaten Bulungan masih menghadapi permasalahan isolasi wilayah. Dampaknya, pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah yang masih terisolir belum dapat dilakukan secara maksimal, khususnya untuk infrastruktur dasar. Indikator yang digunakan untuk menilai status isolasi wilayah adalah letak geografis yang berhubungan dengan infrastruktur perhubungan, dan proporsi rata-rata luas wilayah desa. Berdasarkan indikator tersebut, desa-desa yang terisolasi terdapat di Kecamatan Peso, Peso Hilir, dan Tanjung Palas Barat.

Pemekaran jumlah desa untuk kecamatan dengan rata-rata proporsi luas desa >1,5% perlu didorong, dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan



menurunkan derajat isolasi wilayah. Rata-rata proporsi luas desa yang ideal berdasarkan data empiris untuk Kabupaten Bulungan adalah sekitar 1% dari luas wilayah kabupaten yang mencapai 13.181,92 km². Jadi ada lima kecamatan di Kabupaten Bulungan yang layak melakukan penambahan jumlah desa, tentunya dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan lain yang harus dipenuhi. Sehingga, pemekaran jumlah desa tersebut benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak membebani pemerintah daerah.



Gambar 2.1 Peta Administratif Kabupaten Bulungan



Secara morfologi di wilayah Kabupaten Bulungan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) satuan morfologi, yaitu: satuan morfologi dataran dan satuan morfologi perbukitan bergelombang. Satuan morfologi dataran menempati wilayah berketinggian antara 0-50 m dpl, dicirikan oleh kemiringan lereng $<10^{\circ}$. Batuan pembentuk satuan morfologi ini terutama adalah endapan aluvium pantai dan sungai, dengan pola aliran sungai anastomatik, yang mencerminkan tingkat erosi dewasa. Sedangkan morfologi perbukitan bergelombang berkembang di daerah dengan ketinggian antara 50 – 1600 m dpl, dengan kemiringan lereng antara 10° – 40° . Batuan pembentuk satuan morfologi ini sebagian besar adalah satuan batuan sedimen dan vulkanik. Pola aliran sungai yang berkembang berbentuk dendritik – sub dendritik yang mencerminkan bahwa tahap erosi muda menuju dewasa.

Terkait dengan klimatologi, wilayah Kabupaten Bulungan beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata pada tahun 2020 sebesar 231,63 mm/tahun, dimana curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Desember yaitu 492,10 mm dan terendah pada bulan Juni 131,10 mm. Rata-rata hari hujan selama tahun 2020 tercatat 20 hari dengan jumlah hari hujan terbanyak pada Bulan Oktober yaitu 23 hari dan terendah pada bulan April sebanyak 16 hari.

Kelembaban udara rata-rata pada tahun 2020 sebesar 85,67%, tertinggi 87% pada Bulan Juli dan terendah 83,47% pada Bulan April. Temperatur berkisaran pada interval antara suhu minimal $22,70^{\circ}\text{C}$ pada Bulan Desember dan suhu maksimum $35,50^{\circ}\text{C}$ pada Bulan Mei dan Juni, dengan rata-rata suhu $27,48^{\circ}\text{C}$. Kondisi iklim menunjukkan gejala suhu yang semakin panas dibandingkan tahun sebelumnya yang rata-rata suhu hanya mencapai $26,65^{\circ}\text{C}$. Dengan demikian terjadi isu perubahan iklim yang lebih cepat dan perlu disikapi dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

**Tabel 2.3.** Keadaan Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari 2021

BULAN	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hh)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	257,30	21	59,45
Februari	229,70	22	62,81
Maret	246,70	20	69,49
April	156,20	16	86,94
Mei	171,10	19	67,58
Juni	131,10	20	55,10
Juli	235,20	22	69,49
Agustus	180,00	21	86,94
September	135,30	21	67,58
Oktober	381,60	23	55,10
November	163,30	21	69,21
Desember	493,10	21	84,17
Rata-rata	231,63	20,583	66,69

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan, 2023

Tabel 2.4 Keadaan Suhu Udara, Lembab Nisbi dan Tekanan Udara Dirinci per bulan di Kabupaten Bulungan

BULAN	Suhu Udara (°C)			Lembab Nisbi (%)	Tekanan Udara (mb)
	Rata-rata	Max	Min		
Januari	27,11	34,80	22,80	86,58	1010,08
Februari	27,34	35,10	23,00	83,98	1011,06
Maret	27,42	34,00	23,60	85,90	1010,23
April	28,03	34,30	23,80	83,47	1010,04
Mei	28,17	35,50	23,90	85,56	1009,05
Juni	27,37	35,50	23,60	86,93	1009,07
Juli	27,06	34,20	23,00	87,00	1008,37
Agustus	27,89	35,30	23,00	83,73	1008,74



BULAN	Suhu Udara (°C)			Lembab Nisbi (%)	Tekanan Udara (mb)
	Rata-rata	Max	Min		
September	27,29	34,60	23,20	86,27	1008,79
Oktober	27,34	35,40	23,00	86,53	1008,01
November	27,63	34,20	23,20	85,16	1008,65
Desember	27,14	34,80	22,70	86,95	1007,79
Rata-rata	27,48	34,80	23,23	85,67	1009,15

Sumber: BPS Kabupaten Bulungan, 2023

2.1.2. Demografi

Data kependudukan merupakan salah satu informasi sangat penting untuk menjelaskan tentang gambaran umum suatu daerah. Jumlah penduduk Kabupaten Bulungan pada tahun 2019 sebanyak 139.733 jiwa, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata selama sepuluh tahun >2,5%. Berdasarkan Tabel 2.5 terjadinya pertumbuhan penduduk yang tinggi di wilayah kecamatan Tanjung Palas Timur, dan sebaliknya beberapa kecamatan memiliki pertumbuhan penduduk negatif seperti Kecamatan Peso, Peso Hilir dan Sekatak. Sedangkan kasus pertumbuhan penduduk yang negatif di Kecamatan Bunyu dipengaruhi oleh keterbatasan lahan dan banyaknya penduduk pendatang.

Tabel 2.5 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bulungan

Kecamatan	Jumlah Penduduk				Laju Pertumbuhan penduduk/Tahun	
	2020	2021	2022	2023	2010-2018	2020-2023
Peso	4.053	4.033	4.479	4.294	-0,75	0,83
Peso Hilir	3.833	3.832	4.168	4.185	1,11	1,52
Tanjung Palas Barat	6.379	6.440	6.502	6.922	1,16	1,39
Tanjung Palas	16.543	16.829	17.884	18.533	2,22	1,43
Tanjung Selor	50.624	52.432	59.172	63.588	3,66	3,39
Tanjung Palas Timur	13.465	14.527	19.512	20.169	7,55	6,17
Tanjung Palas Tengah	10.519	10.812	12.261	12.439	4,85	0,84



Tanjung Palas Utara	10.320	10.405	10.744	11.726	1,80	1,62
Sekatak	8.859	8.928	10.899	11.961	-0,42	4,47
Bunyu	11.609	11.495	11.972	11.958	0,36	0,52
Total Kab. Bulungan	136.204	139.733	157.563	165.775	2,67	2,80

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan, 2024

Berdasarkan aspek distribusi penduduk, Kecamatan Tanjung Selor merupakan wilayah yang menampung jumlah penduduk terbanyak, diikuti oleh kecamatan Tanjung Palas dan Tanjung Palas Timur, sedangkan kecamatan Bunyu menduduki urutan keempat. Tetapi berdasarkan kepadatan penduduk, Kecamatan Bunyu menduduki peringkat kedua sebagai wilayah kecamatan yang berpenduduk padat setelah Kecamatan Tanjung Selor.

Sedangkan berdasarkan ratio jenis kelamin (L/P), semuanya mempunyai nilai ratio L/P > 100, yang berarti jumlah penduduk laki-lakinya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan (Tabel 2.6). Ketersediaan tenaga Manusia (SDM) didukung oleh data kependudukan berdasarkan kelompok umur (Tabel 2.7). Bahwa pada tahun 2019 Kabupaten Bulungan sudah memasuki era bonus demografi, jumlah penduduk usia produktif (usia 15 tahun hingga 64 tahun) mencapai 68,03%, dan sisanya 27,62% merupakan kelompok usia muda (usia < 15 tahun) dan jumlah paling kecil merupakan penduduk kelompok umur \geq 65 tahun (4,34%).

Tabel 2.6 Distribusi dan Ratio Jenis Kelamin Penduduk pada masing-masing Kecamatan

Kecamatan	Distribusi Jumlah Penduduk (%)			Kepadatan (org) Penduduk/km ²			Ratio Jenis Kelamin L/P		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Peso	2,98	2,89	2,59	1,29	1,28	1,31	115,5	115,7	107,9
Peso Hilir	2,81	2,74	2,52	2,34	2,34	3,02	117,8	118,2	109,5
Tanjung Palas Barat	4,68	4,61	4,18	5,99	6,05	7,09	120,2	120,9	107,0
Tanjung Palas	12,15	12,04	11,18	9,42	9,59	11,1	108,3	109,9	111,0
Tanjung Selor	37,17	37,52	38,36	74,69	77,36	94,2	115,6	109,7	113,7



Kecamatan	Distribusi Jumlah Penduduk (%)			Kepadatan (org) Penduduk/km ²			Ratio Jenis Kelamin L/P		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Tanjung Palas Timur	9,89	10,40	12,17	10,54	11,37	16,13	118,1	118,1	111,9
Tanjung Palas Tengah	7,72	7,74	7,50	16,83	17,30	20,05	110,3	111,1	106,4
Tanjung Palas Utara	7,58	7,45	7,07	12,80	12,90	15,11	109,9	110,3	106,2
Sekatak	6,50	6,39	7,22	4,44	4,48	6,12	111,7	110,2	113,4
Bunyu	8,52	8,22	7,21	58,54	57,96	60,15	115,6	113,7	116,1
Total Kab. Bulungan	100	100	100	10,33	10,60	13,12	111,7	112,0	118,7

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan, 2024

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Aspek Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur secara makro dari beberapa indikator makro ekonomi, antara lain: capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Produk Domestik Regional Brutto (PDRB), PDRB per kapita, Laju Inflasi, dan Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan. Meski indikator - indikator di atas tidak memotret secara detail kondisi kesejahteraan rakyat pada level mikro, namun indikator-indikator tersebut umumnya digunakan guna mengukur aspek kesejahteraan rakyat secara umum.

2.2.1.1. PDRB

Salah satu indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data produk regional bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain : (1) Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi; (2) Untuk mengetahui tingkat struktur



perekonomian; (3) Untuk mengetahui besarnya PDRB per Kapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan; (4) Untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi berdasarkan pertumbuhan harga produsen. Nilai PDRB Kabupaten Bulungan atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 mencapai 18,26 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai 16,75 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari inflasi.

Selama lima tahun terakhir (2019-2022) struktur perekonomian Kabupaten Bulungan didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertambangan dan Penggalian; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Konstruksi; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bulungan. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bulungan pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yaitu mencapai 26,84 persen (angka ini mengalami penurunan dari 31,37 persen di tahun 2019). Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 15,69 persen (turun dari 16,74 persen di tahun 2019), disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 13,93 persen (menurun dari 14,06 persen di tahun 2019). Berikutnya lapangan usaha konstruksi sebesar 12,76 persen (meningkat dari 10,42 persen di tahun 2019) dan lapangan usaha perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 8,16 persen (meningkat dari 7,03 persen di tahun 2015).

Diantara kelima lapangan usaha tersebut, Konstruksi dan perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, Pertambangan dan Penggalian adalah kategori yang cenderung mengalami penurunan peranan. Sedangkan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; dan Industri Pengolahan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 8 persen. Meningkatnya peranan sektor Konstruksi dan perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor merupakan salah satu efek yang ditimbulkan karena pembangunan yang gencar dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bulungan mengingat statusnya sebagai Ibukota Provinsi.



Tabel 2.8 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bulungan (juta rupiah), 2018-2023

Lapangan Usaha	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (milyar rupiah)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.637,89	2.865,13	3.079,46	3.267,04	3.561,70	3.733,88
B. Pertambangan dan Penggalian	4.826,35	4.902,85	4.722,54	5.316,43	7.939,23	7.942,34
C. Industri Pengolahan	2.354,68	2.544,83	2.623,23	2.770,77	3.003,68	3.177,38
D. Pengadaan Listrik dan Gas	6,20	6,89	7,80	8,19	9,14	11,42
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,28	12,09	13,11	14,24	15,12	16,09
F. Konstruksi	1.943,26	2.331,25	2.411,45	2.513,05	2.675,36	1.064,66
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.303,79	1.491,18	1.534,47	1.659,08	1.921,36	2.057,85
H. Transportasi dan Pergudangan	740,81	836,81	838,61	866,27	1.052,46	1.209,56



Lapangan Usaha	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (milyar rupiah)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	243,22	272,89	263,64	276,81	320,62	354,73
J. Informasi dan Komunikasi	376,89	443,30	494,66	544,71	613,68	662,60
K. Jasa Keuangan	139,07	151,48	158,68	177,58	200,67	230,58
L. Real Estate	172,68	187,95	191,96	203,94	222,58	229,53
M,N. Jasa Perusahaan	18,76	20,17	21,83	23,05	25,48	27,48
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.162,73	1.281,79	1.334,39	1.369,70	1.457,61	1.562,27
P. Jasa Pendidikan	562,32	625,84	688,51	729,56	802,43	865,06
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	132,69	149,65	170,47	183,8	207,30	204,15
P. Jasa Lainnya	132,69	149,65	170,47	183,69	207,30	228,12

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan, 2023



Tabel 2.9 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bulungan (juta rupiah), 2018-2022

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.690,79	1.741,99	1.796,69	1.872,60	2.105,54	2.146,33
B. Pertambangan dan Penggalian	2.984,08	3.172,52	3.273,63	3.243,44	3.501,58	3.634,62
C. Industri Pengolahan	1.272,57	1.370,68	1.439,64	1.519,23	1.542,39	1.556,18
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4,08	4,58	5,00	5,22	6,68	8,04
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,76	8,40	9,07	9,71	10,63	11,16
F. Konstruksi	1.166,75	1.189,21	1.249,62	1.372,48	1.389,09	1.525,13
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	743,34	798,93	864,91	944,27	1.103,37	1.170,79
H. Transportasi dan Pergudangan	422,95	452,33	494,25	534,70	577,07	606,66
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	109,86	124,50	140,24	151,92	164,24	177,93
J. Informasi dan Komunikasi	280,45	301,41	324,32	355,90	436,79	459,84



Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
K. Jasa Keuangan	82,07	82,04	88,06	92,91	106,69	124,31
L. Real Estate	128,78	134,72	142,35	151,33	166,03	121,75
M,N. Jasa Perusahaan	11,62	12,15	12,68	13,21	14,49	15,23
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	595,55	648,52	703,66	748,69	787,83	812,28
P. Jasa Pendidikan	337,98	357,48	377,84	411,44	482,62	506,53
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	83,55	89,80	92,84	99,12	123,48	125,92
R,S,T,U. Jasa Lainnya	74,68	81,60	86,40	93,77	117,97	125,79
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	9.996,95	10.570,93	11.101,27	11.620,10	12.639,47	13.178,49

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan, 2024

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 11,10 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 11,62 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021 Kabupaten Bulungan mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 4,67 persen, namun pertumbuhan tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,02 persen. Pertumbuhan ekonomi selama tahun 2019 dipercepat oleh adanya pembangunan proyek infrastruktur pemerintah seperti perbaikan jalan, pembangunan gedung perkantoran, rehabilitasi gedung sekolah dan lainnya. Kegiatan informasi dan komunikasi juga mendorong perekonomian Kabupaten Bulungan. Selain itu bertambahnya pusat-pusat perbelanjaan seperti supermarket dan minimarket juga membantu meningkatnya daya beli masyarakat bertambah dengan meningkatnya jumlah penduduk karena banyaknya pendatang di Bulungan mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Bulungan.



Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Lapangan usaha konstruksi yaitu sebesar 9,83 persen (angka ini meningkat dari 5,08 persen di tahun 2020). Hal ini tidak terlepas dari pengaruh status Tanjung Selor sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah sedang menyiapkan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor. Dala program ini pemerintah meningkatkan perbaikan jalan dan meningkatkan sarana dan prasarana publik. Selanjutnya lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 9,74 persen (angka ini meningkat dari 7,60 persen di tahun 2020), disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,18 persen (angka ini meningkat dari 8,26 persen di tahun 2020). Berikutnya lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 8,89 persen (angka ini meningkat dari 5,69 persen di tahun 2020, dan lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 8,53 persen (angka ini meningkat dari 5,89 persen di tahun 2020). Berdasarkan kelima lapangan usaha tersebut, semua kategori mengalami peningkatan yang signifikan. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing- masing memiliki pertumbuhan antara 5 hingga 8 persen. Sedangkan satu-satunya lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif adalah pertambangan dan penggalian sebesar -0,92 persen.

Tabel 2.10 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bulungan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (2010) Tahun 2018-2023 (Miliar Rupiah)

No.	Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	PDRB Atas Dasar Harga Konstan
1	2018	16.796,82	11.106,35
2	2019	18.344,05	11.628,63
3	2020	18.736,05	11.547,04
4	2021	20.341,96	12.002,79
5	2022	24.222,78	12.639,47
6	2023	25.577,70	13.178,49

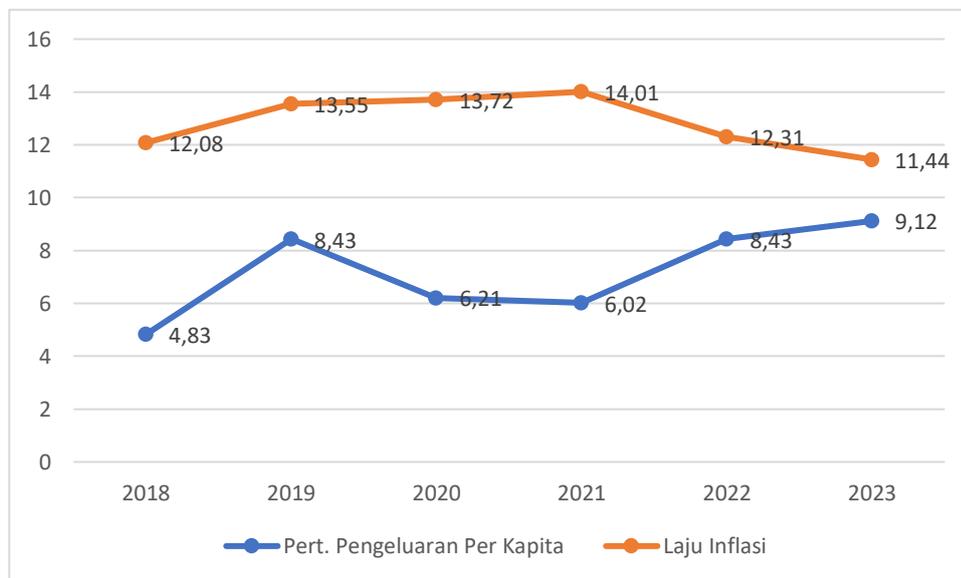
Sumber: BPS Kabupaten Bulungan, 2024

Berdasarkan data diatas PDRB Kabupaten Bulungan setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Hal itu dapat dilihat bahwa PDRB Kabupaten Bulungan Atas Dasar Harga Berlaku pada

tahun 2023 telah mengalami penikatan dari tahun sebelumnya yaitu, sebesar Rp. Rp. 25.577,70 Milyar dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp. 24.222,78 Milyar sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan mencapai Rp. 12.639,47 Milyar dibandingkan pencapaian pada tahun 2022 sebesar Rp. 13.178,49 Milyar.

2.2.1.2. Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli.



Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan kumulatif pengeluaran perkapita dan inflasi di Kabupaten Bulungan

Berdasarkan data diatas bahwa daya beli masyarakat dalam lima tahun terakhir meningkat sebesar 8,43% atau rata-rata 2,11% pertahun. Tetapi pada sisi lain, dalam kurun waktu yang sama terjadi inflasi sebesar 13,55% dalam lima tahun atau rata-rata 3,39% per tahun. Jadi bila inflasi diperhitungkan dalam peningkatan daya beli masyarakat, maka daya beli masyarakat Kabupaten Bulungan justru mengalami penurunan sebesar 5,12% dalam kurun lima tahun atau



rata-rata menurun 1,28% per tahun. Artinya kemampuan ekonomi masyarakat tidak dapat diharapkan untuk meningkatkan pengembangan SDM di daerah ini.

2.2.1.3. PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per Kapita, sedangkan besar kecilnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Bulungan atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 sebesar 128,51 juta rupiah, meningkat dari tahun 2020 yang hanya sebesar 120,67 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Jika dilihat dengan menghilangkan inflasi, secara nominal nilai PDRB atas Dasar harga konstan per kapita mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar 79,94 juta rupiah menjadi 81,76 juta rupiah pada tahun 2019, dan pada tahun 2023 menjadi 79,81 juta rupiah

Tabel 2.11 PDRB Perkapita Kabupaten Bulungan Tahun 2017-2023

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
Nilai PDRB/GRDP (Triliun Rupiah/Trillion rupiahs)							
- ADHB/at current price	12,98	13,63	15,27	16,76	18,26	24,24	25,58
- ADHK/at 2010 Constant Price	9,72	10,00	10,57	11,10	11,62	12,63	13,17
PDRB per Kapita/ Per Capita GRDP (Juta Rupiah/Million rupiahs)							
- ADHB/at current price	100,29	102,88	112,43	120,67	128,51	154,39	181,83



Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
- ADHK/at 2010 Constant Price	75,10	75,43	77,86	79,94	81,76	80,44	79,81
Jumlah Penduduk (ribu orang)/ Population (Thousand People)	129	133	136	130	142	157	165
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)/Population Growth (Percent)	2,61	2,44	2,44	2,29	2,34	2,67	2,80

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan, 2024

Ket : * Angka Sementara/preliminary Figures

** Angka Sangat Sementara/very preliminary Figures

2.2.1.4. Tingkat Kemiskinan

Jumlah penduduk di Kabupaten Bulungan selalu mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan atau lebih dikenal dengan penduduk miskin sebanyak 12,40 ribu jiwa (kondisi Maret 2019) atau sebesar 8,78 persen dari seluruh jumlah penduduk Kabupaten Bulungan.

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Selama 2019-2022 garis kemiskinan seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara mengalami kenaikan pada tahun 2022, tercatat garis kemiskinan Kabupaten Bulungan sebesar Rp. 398.397,00/kapita/bulan dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 12,59 persen menjadi Rp. 448.548/kapita/bulan.

**Tabel 2.12 Garis Kemiskinan Kabupaten Bulungan**

Tahun	Garis Kemiskinan Rupiah/Kapita/Bulan	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2017	398.397	13,40	9,93
2018	413.294	13,03	9,44
2019	448.548	12,40	8,78
2020	472.569	13,08	9,06
2021	486.524	13,48	10,03
2022	514.320	12,58	9,32
2023	551.925	12,19	8,99

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2024

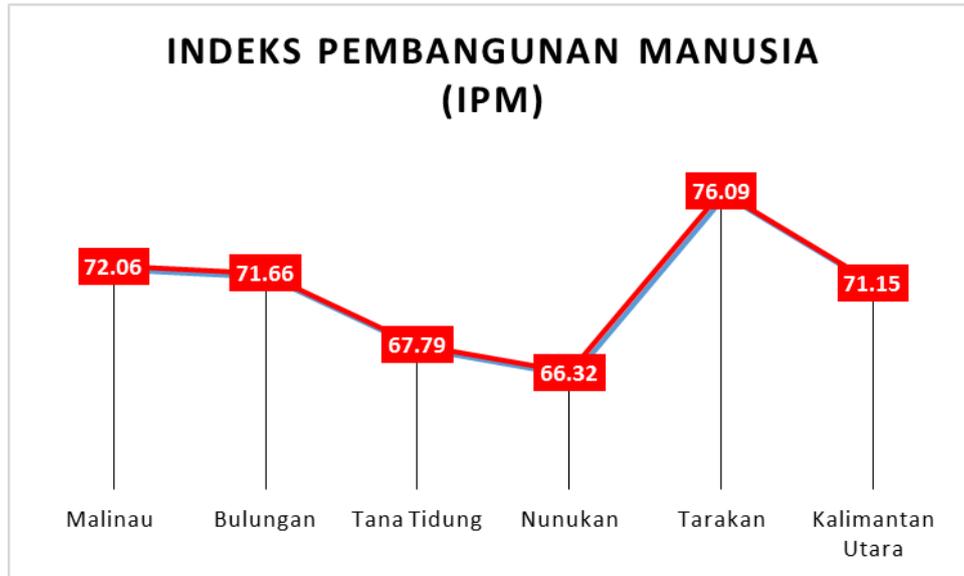
2.2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bulungan tahun 2021 mencapai 71,66 meningkat dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 71,23 dengan laju pertumbuhan IPM sebesar 0,6 persen, dan pada tahun 2023 IPM Kabupaten Bulungan mencapai 72,56

Tabel 2.13 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bulungan Tahun 2020-2023

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2020	71,23
2021	71,66
2022	71,80
2023	72,56

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan, 2024



Gambar 2.3 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2024

Tabel 2.14 Komponen Penyusunan IPM Kabupaten Bulungan tahun 2024

Uraian	Nilai
Indikator IPM	
Angka Harapan Hidup (Tahun)	73,80
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,01
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,98
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (000Rp)	9.812

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2024

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa, angka harapan hidup Kabupaten Bulungan mencapai 72,60 pada tahun 2024, angka tersebut menunjukkan bahwa pada tahun tahun 2024, penduduk Bulungan memiliki harapan untuk hidup selama 72-73 tahun. Angka harapan hidup merupakan indikator capaian bidang kesehatan, dengan demikian Kabupaten Bulungan memiliki capaian tingkat kesehatan yang cukup baik.



Angka harapan lama sekolah menunjukkan angka yang dapat ditempuh oleh seseorang semenjak usia tujuh tahun karena mengikuti program wajib belajar pemerintah. Pada tahun 2024 angka harapan lama sekolah Bulungan mencapai 12,99 tahun, nilai tersebut melebihi target pemerintah. Artinya penduduk Bulungan dapat menempuh pendidikan formal dari usia tujuh tahun (sekolah dasar) selama 12 tahun (hingga sekolah menengah atas). Sedangkan Angka Rata-rata lama sekolah Bulungan pada tahun 2024 mencapai 8,93 tahun artinya, pada tahun 2024 rata-rata lama sekolah yang ditempuh seseorang yang berusia 25 tahun keatas hanya sebesar 8,93 tahun. Dilihat berdasarkan RPJMD Kabupaten Bulungan, sasaran peningkatan IPM pada capaian saat ini masih dibawah 9 tahun, artinya rata-rata lama sekolah seorang siswa belum dapat mencapai masa kelulusan SMP. Rata-rata pengeluaran perkapita yang disesuaikan (PPP) di Kabupaten Bulungan tahun 2021 mencapai Rp. 9.648.000,-. Angka ini berguna untuk mengukur dimensi standar hidup layak dalam IPM dan memberikan gambaran mengenai paritas daya beli penduduk di wilayah Kabupaten Bulungan.

2.2.2. Aspek Kesejahteraan Sosial Budaya

Implikasi dari makin meningkatnya kinerja perekonomian daerah adalah meningkatnya kesejahteraan sosial, yang tercermin pada sejumlah indikator makro pembangunan manusia, antara lain: Angka Melek Huruf (AMH), Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), angka kelangsungan hidup bayi, Angka Usia Harapan Hidup (AHH), persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja, dan lain-lain.

2.2.2.1. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf menggambarkan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis (latin atau huruf lainnya) terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Berdasarkan data bahwa terdapat 95,28 persen penduduk secara umum yang melek huruf atau dapat membaca dan menulis huruf latin. Berdasarkan jenis kelamin, persentase 95,28 persen penduduk secara umum yang melek huruf atau dapat membaca dan menulis huruf latin. Berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki yang melek huruf latin lebih tinggi dibandingkan perempuan, yaitu sebesar 96,44 persen untuk laki-laki dan 94,02 persen untuk



perempuan. Terdapat 98.14 persen penduduk yang mampu membaca dan menulis yang berasal dari golongan pengeluaran 40 persen tengah.

Tabel 2.15 Persentase penduduk 15 Tahun keatas menurut Karakteristik dan Kemampuan Membaca dan Menulis

Karakteristik	Huruf Latin	Huruf Lainnya
Jenis Kelamin		
Laki-laki	96,19	11,76
Perempuan	94,23	12,58
Kelompok Pengeluaran		
40 Persen Terbawah	94,36	5,72
40 Persen Tengah	98,14	15,54
20 Persen Teratas	91,40	16,39
Kabupaten Bulungan	95,28	12,14

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan, 2024

2.2.2.2. Rata-rata Lama Sekolah

Variabel angka rata-rata lama sekolah (ALS) merupakan indikator peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan juga merupakan komponen IPM. Berdasarkan data BPS Kalimantan Utara (2021) peningkatan atau penambahan ALS untuk masyarakat Kabupaten Bulungan dalam lima tahun terakhir (2017-2021) belum mencapai satu tahun, dari 8,29 tahun (2017) menjadi 8,93 tahun (2021). Laju pertumbuhan ALS selama lima tahun hanya 7,72% atau rata-rata pertumbuhannya 1,93% per tahun. Sedangkan untuk mencapai target ALS tahun 2019, yaitu 9,27 tahun, maka rata-rata pertumbuhan ALS harus mencapai 2,96% per tahun.

Berdasarkan data tersebut bahwa capaian kinerja pertumbuhan ALS di kabupaten Bulungan belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan, karena dalam dokumen RPJMD 2016-2021 ditargetkan pertumbuhan ALS rata-rata adalah 2,96% per tahun, namun kinerja yang terjadi baru mencapai 1,93% per Tahun, berarti kinerja pertumbuhan ALS selama lima tahun terakhir secara rata-rata baru mencapai 65,20% dari target yang ditetapkan.

Kinerja pendidikan di Kabupaten Bulungan belum dapat mendorong masyarakat untuk berkolah lebih lama atau meningkatkan tarap pendidikannya, sampai dengan tahun 2019 baru mencapai tingkat setara dengan SMP dan belum semuanya lulus (baru 8,93 tahun). Dua tahun sebelumnya (2017-2018) capaian ALS di Kabupaten Bulungan lebih tinggi dari rata-rata tingkat Provinsi Kalimantan Utara, meskipun masih diatas capaian rata-rata nasional. Capaian kinerja ALS di Kabupaten Bulungan posisinya berada di tengah-tengah, dibawah Kota Tarakan dan Kabupaten Malinau, tetapi masih diatas Kabupaten Nunukan dan Tana Tidung.

Tabel 2.16 Perkembangan nilai ALS di Kabupaten atau Kota Provinsi Kalimantan Utara

Kabupaten/Kota	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bulungan	8,43	8,75	8,92	8,93	9,01	9,27
Malinau	8,56	8,88	9,04	9,05	9,02	9,13
Nunukan	7,57	7,65	7,73	7,81	7,82	8,21
Tana Tidung	8,11	8,23	8,49	8,53	8,51	8,62
Tarakan	9,92	9,93	9,94	9,96	9,97	9,98
Kalimantan Utara	8,49	8,62	8,87	8,94	8,99	9,14

Sumber : BPS Prov Kalimantan Utara, 2024

2.2.2.3. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) dari semua jenjang pendidikan merupakan indikator yang lazim digunakan mengukur efektivitas cakupan dan kualitas layanan pendidikan yang telah diselenggarakan oleh pemerintah daerah , yang diukur pada tiap-tiap jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar tahun 2021 pada jenjang pendidikan SMP dan SMA lebih tinggi laki-laki dibandingkan perempuan. Sedangkan untuk jenjang SD lebih tinggi perempuan dibandingkan laki-laki. Angka Partisipasi Murni tahun 2021 pada jenjang SD dan SMP lebih tinggi perempuan dibandingkan laki-laki. Sedangkan pada jenjang pendidikan SMA lebih tinggi laki-laki dibandingkan perempuan.

Tabel 2.17 Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Formal dan Nonformal Penduduk menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin Tahun 2023

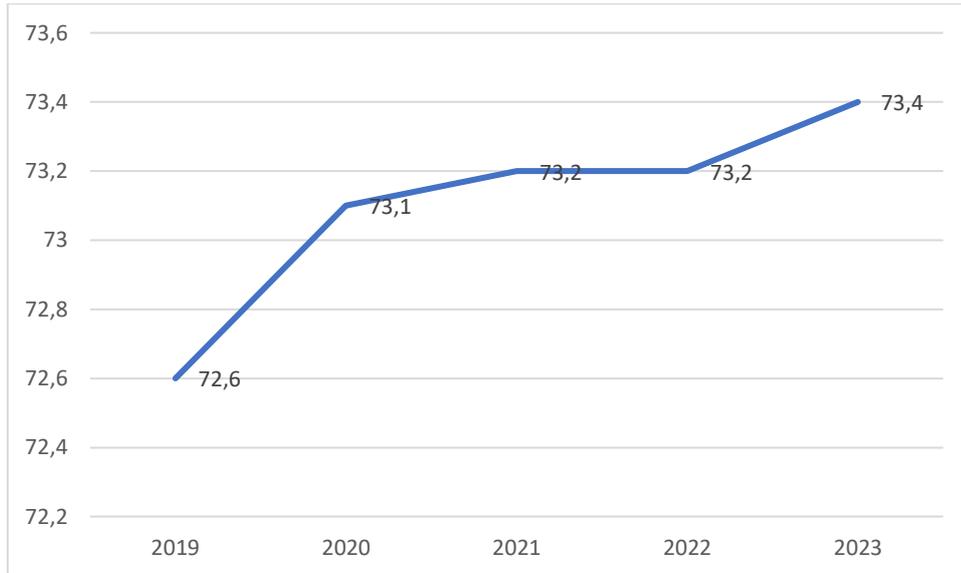
Karakteristik	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
APM			
SD	88,62	94,81	94,22
SMP	74,23	78,22	76,82
SMA	73,33	57,92	69,01
APK			
SD	96,17	105,12	109,12
SMP	104,28	103,72	98,11
SMA	103,27	86,53	109,22

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan, 2024

2.2.2.4. Angka Usia Harapan Hidup

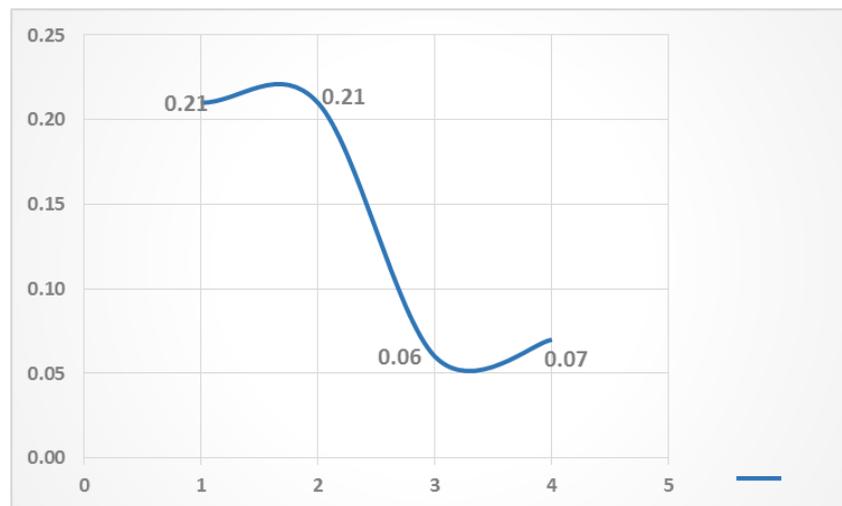
Indikator yang menjadi elemen kinerja pengembangan SDM adalah angka harapan hidup (AHH). Target kinerja pembangunan untuk AHH dalam lima tahun akan meningkat sebesar 0,9% atau rata-rata 0,18% per tahun. Sedangkan data BPS menunjukkan bahwa peningkatan AHH baru mencapai 0,54% selama empat tahun atau rata-rata 0,14% pertahun (Gambar 2.1). Jadi capaian kinerja AHH Kabupaten Bulungan hingga tahun 2019 baru mencapai 60%.

Permasalahan yang dihadapi untuk peningkatan AHH ini adalah laju perkembangan justru cenderung menurun (Gambar3.2), dengan rata-rata laju pertumbuhan selama empat tahun 0,14%, ternyata hanya laju pertumbuhan tahun pertama dan kedua yang tinggi, mencapai 0,21%. Tetapi laju pertumbuhan tahun ketiga hanya mencapai 0,06% dan naik sedikit pada tahun keempat menjadi 0,07%. Sehingga secara umum laju pertumbuhan AHH mengalami perlambatan atau cenderung menurun.



Gambar 2.4 Perkembangan AHH di Kabupaten Bulungan Periode 2019-2023

sumber : Kalimantan Utara Dalam Angka, 2024



Gambar 2.5 Laju Pertumbuhan AHH di Kabupaten Bulungan

Sumber : Kalimantan Utara Dalam Angka, 2024

Data dukung untuk AHH yang menarik untuk diperhatikan adalah berkaitan dengan berat badan bayi saat dilahirkan. Oleh karena itu bayi yang dilahirkan dengan berat di bawah normal akan tumbuh menjadi individu dengan tingkat kesehatan yang tidak optimal, dan akhirnya akan mempengaruhi AHH yang bersangkutan. Data statistik Kabupaten Bulungan menunjukkan bahwa ada sekitar 18% bayi yang dilahirkan di Kabupaten Bulungan mempunyai bobot < 2,5 kg.

Tabel 2.18 Persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah melahirkan dua tahun terakhir menurut karakteristik dan berat badan bayi yang dilahirkan terakhir, 2023.

Karakteristik	< 2,5 kg	≥ 2,5 kg	Tidak Ditimbang	Jumlah
Kelompok Pengeluaran				
40% terbawah	15,370	84,630	0,000	100,000
40% tengah	5,510	94,490	0,000	100,000
20% teratas	33,720	45,950	20,330	100,000
Pendidikan Tertinggi				
SD ke bawah	20,320	79,680	0,000	100,000
SMP ke atas	14,970	78,740	6,290	100,000
Kabupaten Bulungan	17,978	76,698	5,324	100,000

Sumber: BPS Kabupaten Bulungan, 2023

Jika diperhatikan lebih cermat data tersebut diketahui, bayi yang lahir dengan berat <2,5 kg ternyata terjadi pada kelompok masyarakat yang tidak miskin dan pendidikannya tidak rendah. Berdasarkan data tersebut berarti masyarakat kelompok pengeluaran 20% terjadi perkembangan pola konsumsi yang tidak sehat, dan terjadi pola salah asuh pada konsumsi anak sehingga memunculkan generasi dengan kualitas kesehatan yang rendah. Lebih lanjut, jika ditinjau dari tingkat pendidikan, ternyata kelompok masyarakat yang berpendidikan lebih tinggi dari tingkat SMP masih menghasilkan generasi “yang beresiko kesehatan” sekitar 15% (Tabel 2.13). Mungkin perlu dimasukkan lagi pendidikan “kesejahteraan keluarga” di tingkat SMP dan SMA sebagai program tidak lanjutnya.

2.2.2.5. Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka



Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah bagian dari penduduk usia kerja, 15 tahun keatas yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu, baik bekerja maupun sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti cuti. Disamping itu, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Indikator ini mengukur jumlah angkatan kerja usia 15 tahun ke atas per jumlah penduduk usia kerja 15-64 tahun. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi kemampuan suatu daerah menyediakan akses bagi penduduk terhadap lapangan kerja, dan semakin tinggi pula kemampuan daerah tersebut untuk melaksanakan otonomi daerah yang diamanatkan oleh aturan perundang-undangan. Adapun tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bulungan pada tahun 2018-2019 sebagai berikut:

Tabel 2.19 Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka Kabupaten Bulungan 2022-2024

No.	Indikator	2021	2022	2023	2024**
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	68,62	64,24	65,1	66,2
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,54	5,03	4,41	4,28
3	Tingkat Kesempatan Kerja (%)	95,43	96,12	97,12	97,81

Ket : ** Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan 2024

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Bulungan mengalami penurunan pada tahun 2020 ke tahun 2021 yaitu 66,66 persen. Hal demikian terjadi pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mengalami penurunan dari 5,12 persen menjadi 4,57 persen di tahun 2021, sedangkan Tingkat Kesempatan kerja mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar 94,88 persen menjadi 95,43 persen di tahun 2021, dan pada tahun 2023 pada angka sangat sementara mencapai 97,12. Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa nilai indikator tersebut mengalami penurunan maka kemampuan suatu daerah menyediakan akses bagi penduduk terhadap lapangan kerja semakin rendah.

2.3. Aspek Daya Saing



Aspek daya saing daerah dilihat dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim investasi, dan sumber daya manusia. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengeluarkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2023 yang mencakup seluruh Provinsi dan Kabupaten Kota. Perhitungan IDSD didasarkan pada empat komponen yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi.

Berdasarkan nilai IDSD yang dikeluarkan oleh BRIN tersebut, Kabupaten Bulungan memiliki skor IDSD yang cukup besar namun secara keseluruhan di Provinsi Kalimantan Utara masih berada dibawah nilai IDSD Kota Tarakan, dan berada diatas nilai rata-rata Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Utara. Nilai IDSD Kabupaten Bulungan meskipun masih berada dibawah nilai IDSD Provinsi namun hanya selisih 0,02 dengan nilai IDSD Provinsi Kalimantan Utara, atau mendekati nilai IDSD Provinsi.

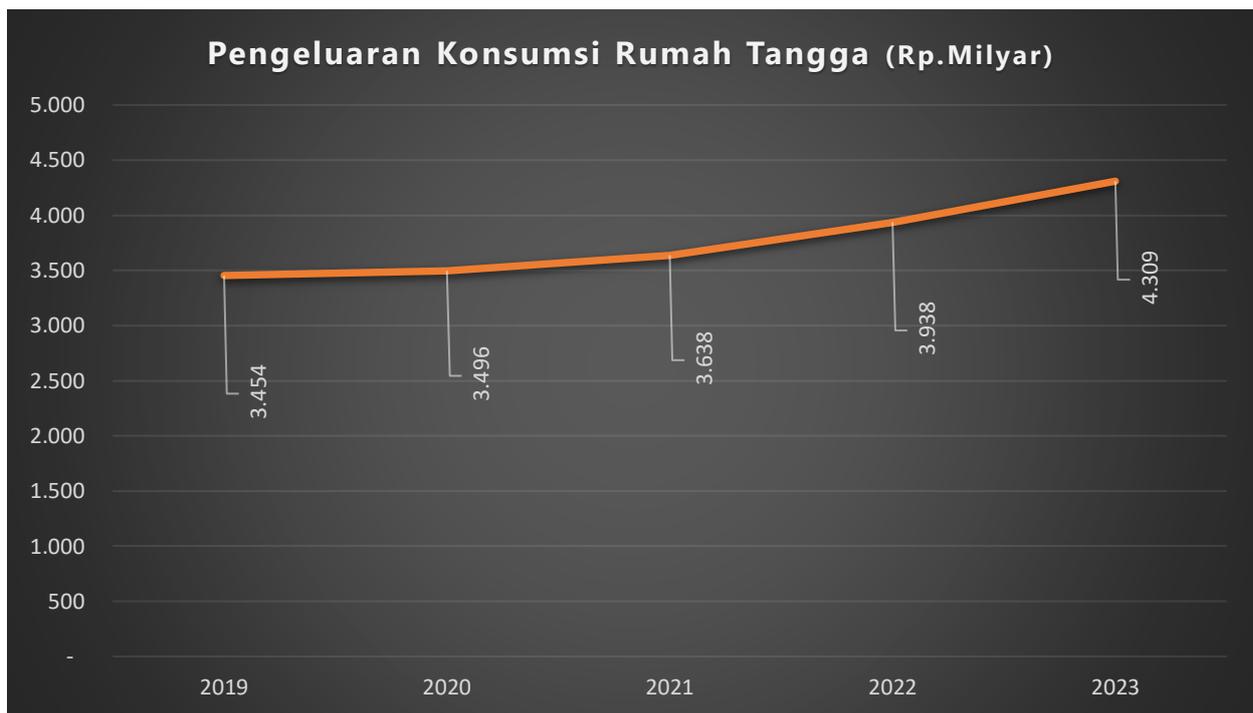
Kabupaten Bulungan memiliki nilai IDSD tertinggi pada pilar 8 dan pilar 11, dimana masing-masing adalah terkait dengan Pasar Tenaga Kerja pada pilar 8, dan Dinamisme Bisnis pada pilar ke-11.

**Tabel 2.20** Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara

Wilayah	Lingkungan Pendukung				SDM				PASAR				SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
Nasional	4,30	2,71	3,58	3,54	3,79	3,77	2,64	3,85	2,53	4,36	3,22	3,03	3,44
Kalimantan Utara	4,55	1,94	3,98	3,79	3,97	3,92	1,81	4,53	1,54	4,06	3,30	1,81	3,26
Rata-rata Kab.Kota	4,30	1,94	3,86	3,41	4,01	3,53	1,79	4,15	0,42	4,16	3,35	1,33	3,08
Malinau	4,25	1,35	2,96	3,51	3,96	3,34	1,11	3,44	0,25	4,04	4,43	0,92	2,80
Bulungan	4,22	2,14	3,51	3,65	4,05	3,59	1,97	4,65	0,51	4,21	4,48	1,82	3,23
Tana Tidung	-	1,70	4,17	3,21	3,94	3,40	1,07	4,41	0,17	3,70	2,67	0,49	-
Nunukan	4,36	2,01	3,71	3,46	3,96	3,26	0,85	3,99	0,47	4,35	2,53	0,89	2,82
Kota Tarakan	4,37	2,50	4,95	3,23	4,16	4,07	3,97	4,25	0,72	4,50	2,63	2,53	3,49

Sumber : IDSD BRIN, 2023

Dari aspek daya saing ekonomi daerah terlihat dari tingkat pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Pengeluaran konsumsi dilakukan untuk mempertahankan taraf hidup. Gambaran pengeluaran konsumsi rumah tangga per Kapita disampaikan pada grafik berikut,



Gambar 2.6 Konsumsi Rumah Tangga 2019-2023

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan, 2024

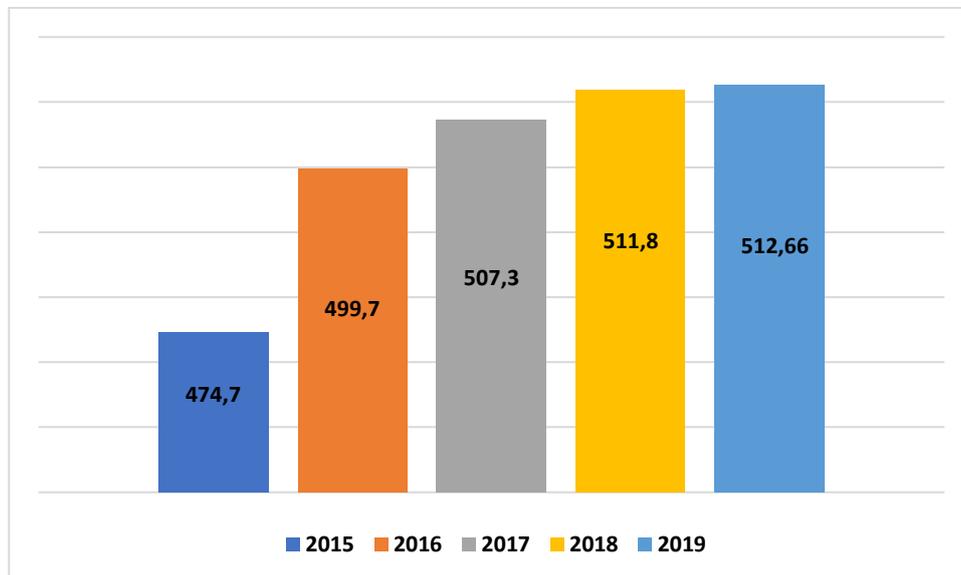
2.3.1. Daya Saing Infrastruktur

Fasilitas wilayah atau infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan fasilitas untuk mendukung ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, maka semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.

2.3.1.1. Aksesibilitas Daerah

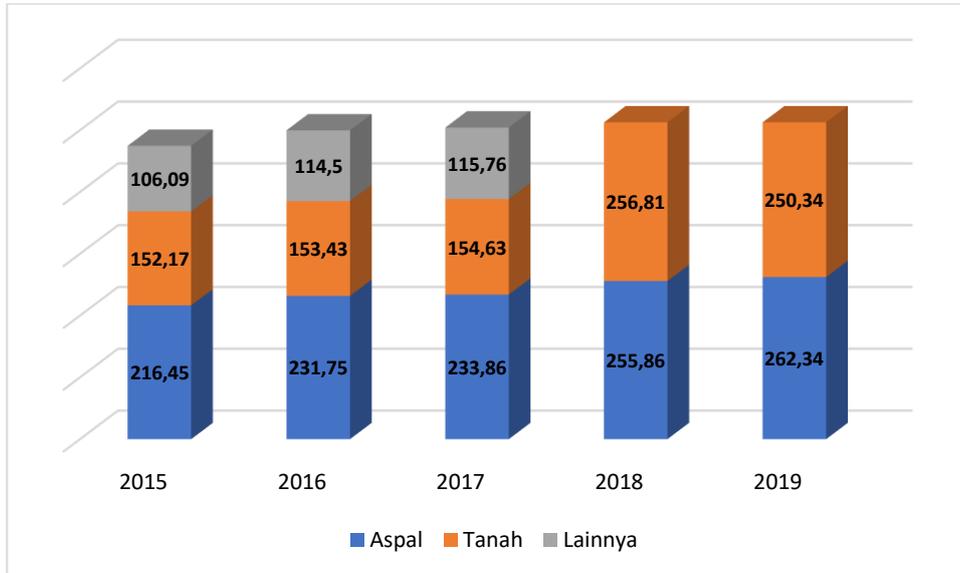
Jaringan jalan merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian, makin meningkat usaha pembangunan menuntut pola peningkatan pembangunan jalan untuk daerah ke daerah lain.

Panjang jalan Kabupaten Bulungan pada tahun 2019 yang menjadi wewenang Kabupaten Bulungan mencapai 512,68 km. panjang jalan Kabupaten menurut rincian jenis permukaan adalah permukaan yang diaspal 262,34 km dan permukaan tanah 250,34 km. persentase panjang jalan dengan permukaan aspal adalah yang paling besar pada tahun 2019 yaitu sekitar 51,2%. Jika dilihat dari kondisi jalan pada tahun 2019, jalan dalam kondisi baik sepanjang 235,72 km, sedangkan kondisi sedang 99,96 km, kondisi rusak 126,65 km dan dalam kondisi rusak berat 50,35 km. Dengan demikian terlihat bahwa kondisi jalan berkategori baik meningkat. Jalan kondisi rusak telah mengalami penurunan banyak dibandingkan tahun 2018 yaitu telah turun sekitar 10 persen. Sementara kondisi jalan dengan kondisi permukaan baik meningkat sekitar 26 persen. Dilihat dari data yang ada bahwa jalan dengan kondisi buruk pada tahun sebelumnya telah diperbaiki.



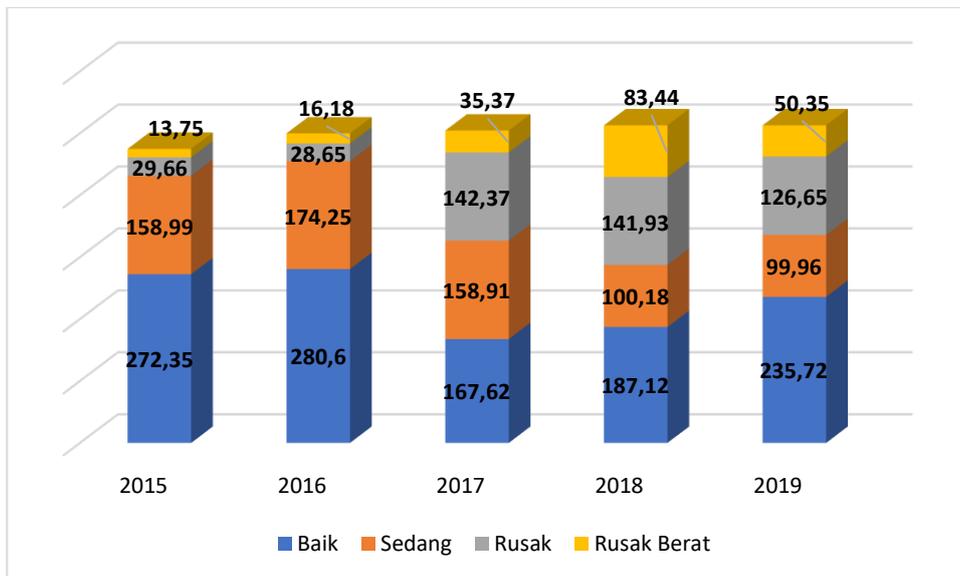
Gambar 2.7 Grafik Perkembangan Panjang Jalan di Kabupaten Bulungan tahun 2015-2019

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan, 2020



Gambar 2.8 Grafik Perkembangan Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Bulungan tahun 2015-2019

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan, 2020



Gambar 2.9 Grafik Perkembangan Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Bulungan 2015-2019

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan, 2020

2.3.1.2. Infrastruktur Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan dasar untuk hidup sehat, perkembangan ketersediaan air bersih di Kabupaten Bulungan dalam lima tahun terakhir masih fluktuatif dan cenderung

meningkat pada empat tahun terakhir, meskipun peningkatannya masih relatif. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian pada pembangunan mendatang, khususnya untuk penyediaan air minum yang layak berdasarkan standar kesehatan untuk masyarakat di pedesaan,

Tabel 2.21 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di provinsi Kalimantan Utara

Kab/Kota dan Provinsi	Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
1 Bulungan	77,72	71,61	73,90	77,13	78,22
2 Malinau	66,05	62,67	66,88	75,36	68,04
3 Nunukan	83,59	82,31	84,14	91,98	91,63
4 Tana Tudung	88,34	81,66	87,91	80,41	78,68
5 Tarakan	95,50	95,75	93,75	96,40	98,13
Kalimantan Utara	84,59	82,69	83,78	88,30	87,90

Sumber : BPS Kalimantan Utara, 2023

Ketersediaan air minum layak untuk masyarakat jika ditinjau dari sumbernya masih sangat perlu mendapat perhatian, karena masyarakat harus menanggung biaya yang besar untuk memperoleh air minum yang layak, sekitar 63% masyarakat mengandalkan air dalam kemasan sebagai sumber air minum yang layak. Sedangkan sumber air minum layak yang berasal dari PDAM di Kabupaten Bulungan pada tahun 2019 baru mencapai 8,2%. Selain itu sekitar 13,8% masyarakat masih menggunakan air hujan sebagai sumber air minum, kondisi ini sangat perlu mendapat perhatian, oleh karena mutu air hujan saat ini tidak dapat diprediksi kualitasnya dengan adanya pengaruh kegiatan pembangunan yang menimbulkan pencemaran udara, yang selanjutnya mempengaruhi kualitas air hujan

2.3.1.3. Infrastruktur Energi Listrik

Ketersediaan listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat pada era digital saat ini, karena listrik tidak hanya sebagai sumber penerangan, tetapi juga merupakan prasarana dasar untuk

kegiatan masyarakat bidang komunikasi dan industri yang merupakan kegiatan produktif masyarakat.

Tabel 2.21 Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023

Kab/Kota dan Provinsi	Sumber Penerangan Rumah Tangga		
	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Bukan Listrik
1 Bulungan	94,22	5,51	0,27
2 Malinau	77,23	22,62	0,15
3 Nunukan	89,65	9,63	0,72
4 Tana Tudung	61,58	38,08	0,34
5 Tarakan	98,87	1,13	0,00
Kalimantan Utara	91,26	8,46	0,28

Sumber : BPS Kalimantan Utara, 2023

Meskipun ketersediaan listrik PLN di kabupaten Bulungan telah mencapai 94,22% dan hanya di bawah Kota Tarakan rankingnya di provinsi Kalimantan utara, tetapi durasi ketersediaan listrik dalam periode 24 jam ditengarai masih rendah, khususnya di wilayah perdesaan. Kondisi ini yang menjadi salah satu penyebab pemerataan pembangunan di seluruh Kecamatan masih terjadi Kesenjangan.

2.3.2. Daya Saing Iklim Investasi

Iklim berinvestasi sangat dipengaruhi oleh rasa aman yang diciptakan agar investor tertarik untuk berinvestasi. Salah satu yang menjadi halangan terbesar dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban yaitu kriminalitas. Ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif menggambarkan bahwa disiplin hukum berjalan dengan baik. Ketentraman dan ketertiban umum sangat berdampak positif dalam meningkatkan kenyamanan investasi. Investasi menjadi faktor yang sangat penting karena berperan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Investasi akan memberikan manfaat terhadap banyak pihak baik itu investor, masyarakat dan pemerintah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan

kemiskinan. Kondisi daerah terkait iklim berinvestasi dapat dilihat dari indikator : Angka Kriminalitas, dan Kemudahan perijinan.

2.3.2.1. Angka Kriminalitas

Indikator Kriminalitas berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat. Semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Berikut dibawah ini tabel Angka Kriminalitas di Kabupaten Bulungan tahun 2023.

Tabel 2.23 Angka Kriminalitas di Kabupaten Bulungan setiap tahunnya

Uraian	Tahun		
	2021	2022	2023
Jumlah Kejahatan yang dilaporkan	181	162	169
Risiko penduduk terjadi tindak pidana per 100.000 penduduk (%)	0,15	0,13	0,11
Persentase penyelesaian tindak pidana (%)	88,7	89,2	90,7
Selang waktu terjadinya tindak pidana	138 jam 722 menit 21 detik	151 jam 724 menit 71 detik	172 jam 426 menit 71 detik

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan, 2023

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa jumlah kejahatan yang dilaporkan setiap tahunnya mengalami penurunan sama halnya dengan persentase penyelesaian tindak pidana setiap tahunnya mengalami kenaikan pada tahun 2023 90,7% kasus dapat diselesaikan dan pada tahun 2022 sebesar 89,2% kasus dapat diselesaikan tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa Ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Bulungan menggambarkan bahwa disiplin hukum di Kabupaten Bulungan berjalan dengan baik.

2.3.2.2. Kemudahan Perijinan

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan

serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyaknya faktor, salah satunya kemudahan perijinan .

Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari).

2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Pendidikan

2.4.1.1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dihasilkan dari keikutsertaan penduduk dalam pendidikan dan merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Indikator ini dapat dibedakan sesuai usia sekolah yaitu penduduk pada usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun yang bisa dikategorikan berada pada jenjang pendidikan SD,SMP dan SMA.

Berdasarkan tabel di bawah ini menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tahun 2020 didominasi oleh karakteristik umur 7-12 Tahun. Pemerintah Daerah harus dapat mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap rendahnya APS pada usia sekolah lanjutan, terutama lanjutan tingkat atas (SMA).

Tabel 2.24 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah Kabupaten Bulungan 2021-2023

Kelompok Usia Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur		
	2021	2022	2023
7-12	97,30	97,56	98,35
13-15	97,64	97,16	96,55
16-18	16,18	73,39	73,68

Sumber : Kabupaten Bulungan Dalam Angka, 2024

Angka Partisipasi Sekolah terbesar ada pada kelompok umur 7-12 tahun yang menandakan bahwa baiknya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan dasar. Terlihat pula bahwa semakin tinggi kelompok usia sekolah semakin berkurangnya partisipasi masyarakat akan pentingnya pendidikan.



2.4.1.2. Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan tertentu per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan tertentu. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan tertentu. Kondisi rasio ketersediaan sekolah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.25 Rasio Ketersediaan Sekolah

	Jumlah	Rasio
Jumlah Penduduk Sekolah usia sekolah dasar (5-9 tahun)	13.922	
Jumlah Sekolah Dasar (SD)	143	
Rasio Ketersediaan Sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar		102,71
Jumlah Penduduk Sekolah usia sekolah Menengah (10-14 tahun)	13.106	
Jumlah Sekolah Menengah (SMP)	62	
Rasio Ketersediaan Sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah		47,30
Jumlah Penduduk Sekolah usia sekolah Menengah Atas (15-19 tahun)	10.102	
Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA)	15	
Rasio Ketersediaan Sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan Atas		14,48

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan (2023) dan diolah (2024)

2.4.1.3. Rasio Guru Terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini selain mengidentifikasi ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapainya kualitas pembelajaran. Semakin sedikit angka rasio guru terhadap muridnya maka diharapkan pemanfaatan pendidikan akan semakin membaik karena dengan sedikitnya murid yang di tangani oleh seorang guru diharapkan guru tersebut dapat lebih memperhatikan muridnya.

Rasio guru murid pada tahun ajaran 2019/2020 berada pada kisaran 11-13 untuk jenjang pendidikan SD hingga SMA sederajat. Rasio guru murid paling kecil berada pada tingkat SMP/sederajat sebesar 12,01 angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 11,17 yang berarti setiap guru harus menanggung 11-12 murid. Semakin kecil rasio guru murid akan semakin mudah pula pengawasan yang dilakukan guru terhadap muridnya tersebut sehingga kualitas pengajaran cenderung semakin baik. Sebaliknya, rasio murid guru terbesar berada pada tingkat SD/sederajat yaitu 13,62 yang berarti bahwa setiap satu orang guru SD/sederajat harus menanggung sekitar 13-14 muridnya . Semakin banyak murid yang ditanggung maka akan semakin berat pula tugas guru untuk memperhatikan semua muridnya.

Tabel 2.26 Jumlah Guru, Jumlah Murid, dan Rasio Guru Murid Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Bulungan, 2022 dan 2023

Jenjang Pendidikan	Jumlah Guru		Jumlah Murid		Rasio Guru-Murid	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
SD/Sederajat	1.473	1.321	18.850	18.004	12,80	13,62
SMP/Sederajat	681	616	7.607	7.403	11,17	12,01
SMA/Sederajat	294	286	3.505	3.446	11,92	12,04

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan (2024)

2.4.1.4. Rasio Jumlah Murid dan Sekolah

Rasio jumlah murid dan sekolah merupakan perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah sekolah pada setiap jenjang pendidikan tertentu untuk mengetahui rata-rata besarnya kepadatan sekolah di Kabupaten Bulungan pada tahun 2022 dibawah ini

Tabel 2.27 Jumlah murid, Jumlah Sekolah dan Rasio Murid dan Sekolah

Jenjang Pendidikan	Jumlah Murid		Jumlah Sekolah		Rasio Murid-Sekolah	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
SD/Sederajat	18.850	18.004	142	143	132,74	125,90
SMP/Sederajat	7.607	7.403	61	62	124,70	119,40
SMA/Sederajat	3505	3.446	14	15	250,36	229,73

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan (2024), Hasil Analisis (2024)



Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rasio jumlah murid dan sekolah pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. penyebab turunnya rasio Murid dan sekolah, karena pada tahun 2023 jumlah murid mengalami penurunan di semua jenjang pendidikan sedangkan jumlah sekolah mengalami peningkatan. Rasio Murid Sekolah pada tahun 2022 tertinggi pada jenjang pendidikan SMA/Sederajat dan SD/Sederajat. Jenjang pendidikan SMA/Sederajat rasio murid dan sekolah sebesar 229,73 yang artinya satu sekolah SMA/Sederajat menampung 230 siswa. Jenjang pendidikan SD/Sederajat dengan rasio sebesar 125,90 angka ini berarti satu sekolah SD/Sederajat menampung 126 siswa. Untuk jenjang pendidikan SMP/Sederajat rasio jumlah murid dan sekolah sebesar 119,40 yang artinya satu sekolah SMP/Sederajat menampung 120 siswa.

2.4.2. Aspek Kesehatan

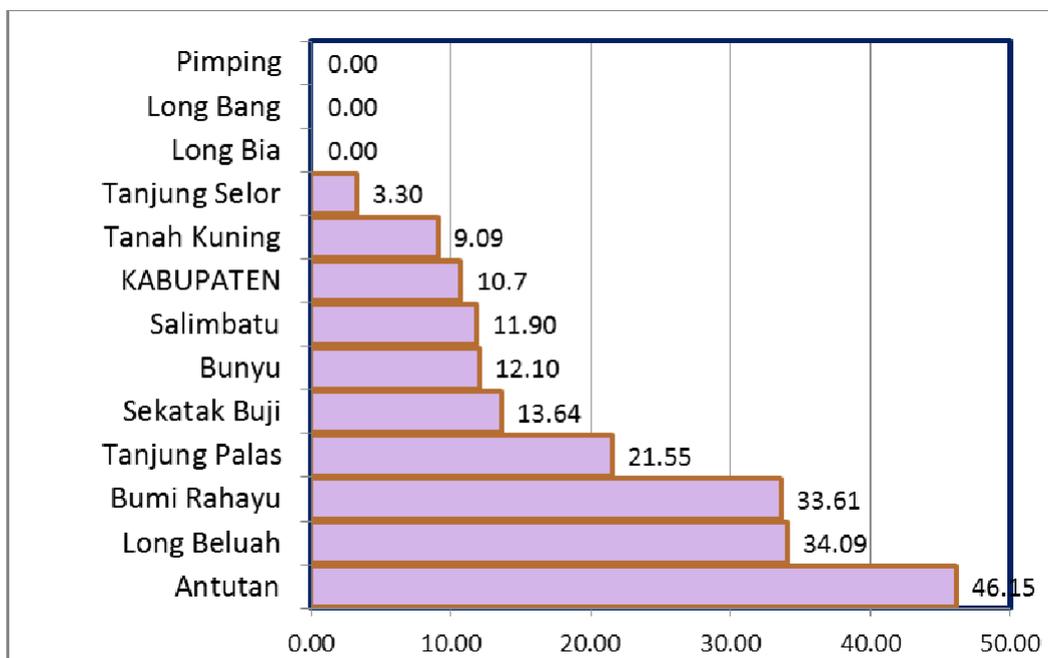
2.4.2.1. Angka Kematian bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator yang paling sensitif untuk menentukan derajat kesehatan di suatu daerah. Angka Kematian Bayi adalah jumlah penduduk yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. AKB adalah gambaran status kelangsungan hidup di suatu wilayah, yang dipengaruhi oleh status kesehatan anak dan didukung oleh adanya status pelayanan kesehatan anak yang optimal.

AKB dapat menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. AKB merupakan aspek penting dalam menilai keberhasilan pembangunan kesehatan. Bila AKB disuatu wilayah tinggi, berarti status kesehatan di wilayah tersebut rendah.

Jika melihat dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa AKB di Kabupaten Bulungan lima tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan, Berdasarkan dari data yang masuk di Dinas Kesehatan tercatat pada tahun 2022 Angka Kematian bayi di Kabupaten Bulungan sebesar 11 per 1000 kelahiran hidup dengan 28 jumlah kasus kematian bayi dari 2.617 kelahiran

hidup. Penurunan kasus kematian bayi di Kabupaten Bulungan tidak lepas dari banyaknya upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan untuk menurunkan angka kematian ini salah satunya dengan pemerataan sarana dan prasarana baik dari segi pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga, serta semakin memadainya akses dan pelayanan kesehatan pra dan pasca melahirkan, menyediakan layanan dan program yang mendukung kesehatan. Untuk melihat angka kematian bayi menurut Puskesmas dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Gambar 2.10 Jumlah Kematian Bayi Menurut Puskesmas Di Kabupaten Bulungan 2022

Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat tahun 2023

Berdasarkan rekapitulasi laporan puskesmas se-Kabupaten Bulungan bahwa angka kematian tertinggi ada di wilayah Puskesmas Antutan sebesar 46,15 dan wilayah Puskesmas Long Beluah sebesar 34,04 per 1000 kelahiran hidup, untuk dua puskesmas dengan angka kematian terendah ada pada Puskesmas Tanjung Selor dengan 3,30 dan Puskesmas Tanah Kuning sebesar 9,09 per 1000 kelahiran hidup, sedangkan untuk puskesmas wilayah Pimping, Tanah Kuning, dan Long Bia tidak terdapat kasus kematian.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kematian bayi tetapi tidak mudah menemukan faktor yang paling dominan. Sebagianan keselamatan persalinan dan faktor pendukung lainnya. Besar

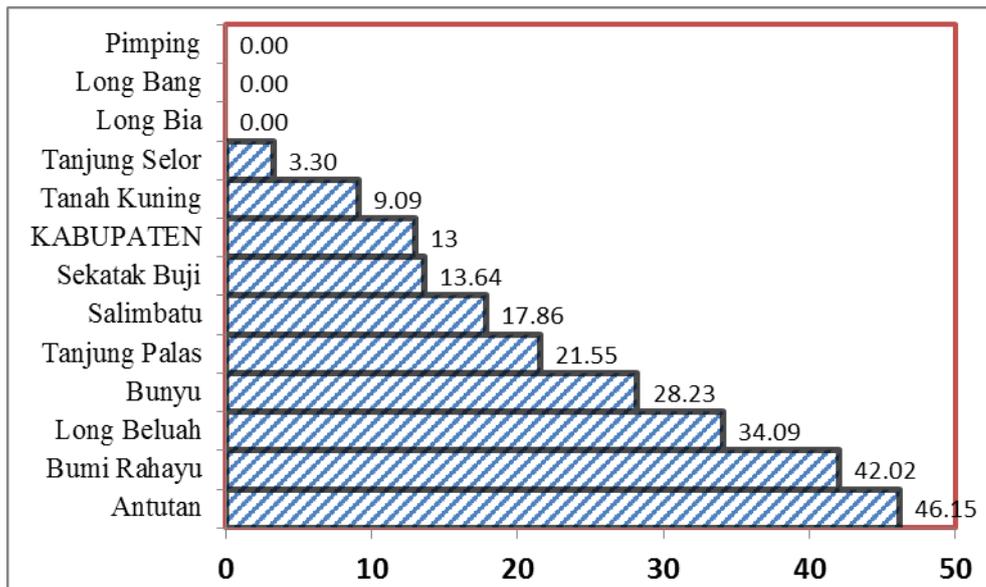


faktor penyebab kematian bayi yaitu sebelum usia 1 bulan (masa neonatal yaitu pada usia 0 – 28 hari), kematian bayi tersebut terjadi pada bulan pertama kehidupan diantaranya berada pada minggu pertama kehidupannya. Penyebab kematian pada masa neonatal pada umumnya berkaitan dengan kesehatan ibu selama hamil, kesehatan janin selama didalam kandungan seperti asfiksia, premature, kelainan bawaan, dan lain-lainnya, sedangkan penyebab kematian pada usia 28 – 11 bulan disebabkan pneumonia, kelainan saluran cerna dan penyebab kematian lainnya.

2.4.2.2. Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun (≤ 60 bulan) pada periode waktu tertentu per 1.000 Kelahiran Hidup. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor- faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita, seperti gizi, sanitasi, penyakit menular dan kecelakaan. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan ekonomi dan sosial. Sebagaimana pada Angka Kematian Bayi (AKB), kematian balita juga merupakan salah satu indikator penentu derajat kesehatan. Angka Kematian Balita (usia 0 –59 bulan) di Kabupaten Bulungan sebesar 12,99 per 1000 kelahiran hidup.

AKABA tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, berbeda sedikit dari tahun sebelumnya dari 14 per 100 kelahiran hidup menurun menjadi 13 per 1000 kelahiran hidup. Dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan telah optimal dalam melaksanakan kegiatan yang dapat menurunkan angka kematian ini, banyaknya usaha yang telah dikerahkan salah satunya dengan pemerataan pelayanan kesehatan dengan merekrut tenaga kesehatan yang berkompetensi, maupun meratakan dan menambah fasilitas penunjang baik sarana dan prasana kesehatan di puskesmas, pustu, posyandu, maupun fasilitas lainnya serta selalu mengoptimalkan Manajemen Terpadu pada anak (0 – 59 bulan).



Gambar 2.11 Angka Kematian Balita Menurut Puskesmas Di Kabupaten Bulungan Tahun 2022

Sumber : Bidang Kesmas Dinkes Kab.Bulungan Tahun 2023

Berdasarkan grafik tersebut, puskesmas dengan Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup tertinggi terdapat pada Puskesmas Antutan sebesar 46,15 per 1000 kelahiran hidup dan Bumi Rahayu sebesar 42,02 per 1.000 kelahiran hidup, untuk puskesmas dengan Angka Kematian Balita terendah yaitu Puskesmas Tanjung Selor sebesar 3,03 per 1000 kelahiran hidup dan Puskesmas Tanah Kuning sebesar 9,09 per 1000 kelahiran hidup. Untuk Puskesmas Pimping, Long Bang, dan Long Bia dengan tidak ada kasus kematian balita tahun 2022.

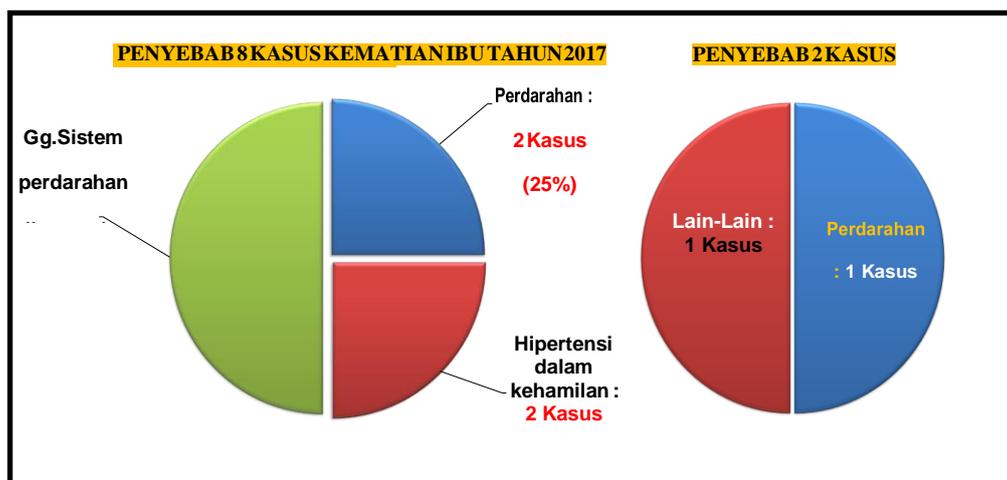
Penyebab kematian Balita atau anak usia 0 – 59 bulan (bayi dan anak balita) merupakan masa sangat rentan terhadap berbagai penyakit karena daya tahan tubuhnya yang masih lemah sehingga mudah tertular penyakit, khususnya penyakit pernafasan dan saluran cerna.

2.4.2.3. Angka Kematian Ibu Melahirkan

Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate) adalah jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Jumlah kematian ibu merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan. Indikator untuk mengetahui besaran masalah kesehatan ibu adalah Angka Kematian

Ibu (AKI). Angka Kematian Ibu di Kabupaten Bulungan tahun 2022 adalah 76 /100.000 Kelahiran Hidup dengan 2 kematian.

Angka kematian ibu mengalami penurunan di tahun 2022 yaitu sebesar 76 per 1000.000 kelahiran hidup, dengan dua kasus kematian, dibandingkan dari tahun sebelumnya terutama dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 304 per 100.000 kelahiran hidup dari total delapan kasus kematian. Jika melihat dari usia kematian Ibu di Kabupaten Bulungan terdapat dua kasus. Satu kasus kematian ini ada pada umur ≤ 20 tahun yang terdapat pada wilayah kerja Puskesmas Tanah Kuning dan satu kasus pada usia 20 – 34 di wilayah Puskesmas Tanjung Selor. Ada banyak hal yang dapat menyebabkan kematian bayi di Kabupaten Bulungan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 2.12 Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten Bulungan Tahun 2022

Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Kab. Bulungan Tahun 2023

Kematian Ibu salah satu yang ada kasus di Tanah Kuning berhubungan juga dengan tingkat kelompok umur. Kehamilan terlalu muda usia < 20 tahun adalah umur yang beresiko bagi ibu dan juga bagi janinnya. Kehamilan di usia muda beresiko tinggi karena saat itu ibu masih dalam proses tumbuh akan terjadi kompetisi makanan antara janin dan ibunya sendiri yang masih dalam masa pertumbuhan dan adanya perubahan hormonal yang terjadi selama kehamilan. Faktor penyebab kasus yaitu karena pendarahan dan oedema paru post *Sectio Caesar*.



Banyak strategi ataupun upaya yang akan terus dikembangkan dan ditingkatkan baik dari akses, mutu layanan kesehatan ibu, membangun kemitraan yang efektif melalui kerja sama lintas program dan lintas, dan tak kalah pentingnya adalah mendorong dan menggerakkan masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu. Upaya menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Bulungan adalah dengan harapan langkah tersebut dapat meningkatkan jangkauan program K4 Ibu hamil, semua persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, dan di fasilitas kesehatan. Banyak upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan beserta jejaringnya seperti; puskesmas, pustu, poskesdes, polindes, dan lintas sektor (camat, desa, tokoh masyarakat dan kader), untuk menurunkan kematian ibu antara lain melalui pemerataan melalui penempatan bidan di desa, membentuk kelas Ibu hamil, kegiatan Promosi Gizi Seimbang, Penyuluhan Ibu hamil Resiko Tinggi Usia <20 tahun dan KB Pasca Persalinan, Kegiatan AMP (Audit Maternal Perinatal), penyediaan rumah tunggu, program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, serta penyediaan Fasilitas Kesehatan Puskesmas Perawatan dan pelayanan obstetri Neonatal Emergensi Dasar di puskesmas serta melalui program Jampersal (jaminan persalinan).

2.4.2.4. Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu

Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama saat ini dimana puskesmas menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu per seribu pada tahun 2022 sebesar 1:1.972, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yang berarti satu Fasilitas kesehatan melayani 1.972 penduduk. Beberapa tahun terakhir ini ketersediaan fasilitas kesehatan ini semakin sedikit, dimana disebabkan peningkatan jumlah penduduk yang terus terjadi sementara jumlah fkses tidak mengalami penambahan kuantitas.

Tabel 2.28 Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Bulungan tahun 2020-2023

No	Uraian	2020	2021	2023
1.	Jumlah Puskesmas	18	12	12
2.	Jumlah Poliklinik	3	5	5
3.	Jumlah Puskesmas Pembantu	54	60	60
4.	Jumlah 1-3	75	77	77
5.	Jumlah Penduduk	136.204	139.733	151.844
6.	Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu	1.816,05	1.814,71	1.972
7.	Jumlah Kecamatan	10	10	10
8.	Rasio Puskesmas Per Kecamatan	1,8	1,2	1,2

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 dan diolah (2024)

2.4.2.5. Rasio Rumah sakit Per Satuan Penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosa serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Secara Kuantitas, pada tahun 2019 tidak terjadi penambahan jumlah rumah sakit. Hal ini menyebabkan angka ketersediaan rumah sakit semakin buruk karena jumlah penduduk tiap tahunnya selalu mengalami penambahan. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio/ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Bulungan tahun 2018-2019.

Tabel 2.29 Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk di Kabupaten Bulungan tahun 2021-2023

No.	Uraian	2021	2022	2023
1.	Jumlah Rumah Sakit	1	1	1
2.	Jumlah Penduduk	136.204	139.733	151.844
3.	Rasio Rumah Sakit	1: 136.204	1: 139.733	1:151.844

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan, 2024 dan diolah (2024)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Bulungan masih belum memadai, dilihat dari Rasio Rumah sakit, satu Rumah sakit di Kabupaten Bulungan harus melayani Seluruh penduduk di Kabupaten Bulungan, 1:151.844 penduduk. Hal ini dapat menyebabkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bulungan tidak maksimal karena kurangnya ketersediaan rumah sakit yang memadai.

2.4.2.6. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Indikator ini dapat menggambarkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu. idealnya satu orang dokter melayani 2500 penduduk.

Tabel 2.30 Rasio Dokter Per jumlah Penduduk di Kabupaten Bulungan Tahun 2022-2023

No.	Uraian	2022	2023
1.	Jumlah Dokter	65	82
2.	Jumlah Penduduk	139.733	151.844
3.	Rasio Dokter per 1.000 penduduk	0,46	0,54
4.	Rasio Dokter terhadap penduduk	1:2.149,73	1:1.851,75

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan, 2024 dan diolah (2024)

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa rasio dokter per seribu penduduk pada tahun 2020 sebesar 0,54 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 0,46 tahun 2019 yang berarti pada tahun 2020 satu dokter melayani 1.851 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dokter di Kabupaten Bulungan cukup memadai untuk melayani kesehatan masyarakat.

2.4.2.7. Rasio Tenaga medis Per Satuan Penduduk

Rasio Tenaga medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk di Kabupaten Bulungan. Berdasarkan data dibawah ini menunjukkan bahwa rasio tenaga medis per seribu penduduk pada tahun 2022 sebesar 5,80 yang berarti pada tahun 2022 satu tenaga medis melayani 172 penduduk. Berikut dibawah ini tabel rasio tenaga media per satuan penduduk.

Tabel 2.31 Rasio Tenaga medis Per satuan penduduk di Kabupaten Bulungan Tahun 2023

No.	Uraian	2023
1.	Jumlah Perawat	514
2.	Jumlah Bidan	279
3.	Jumlah Farmasi	66
4.	Ahli Gizi	23
5.	Jumlah Semua Tenaga Medis	882
6.	Jumlah Penduduk	151.844
7.	Rasio Tenaga Medis Per 1000	5,80
8.	Rasio Tenaga Medis terhadap Penduduk	1:172.15

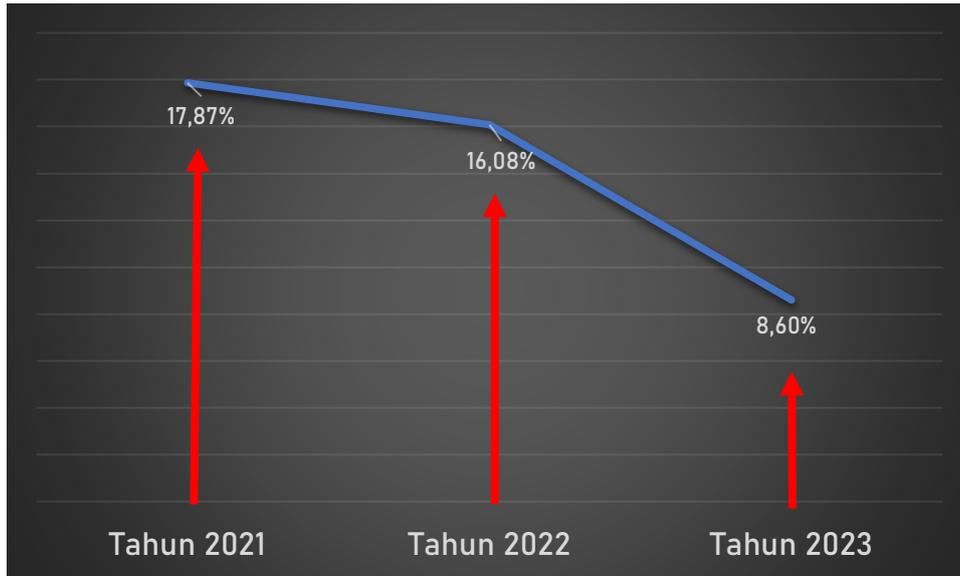
Sumber : BPS Kabupaten Bulungan, 2024 dan diolah (2024)

2.4.2.8. Prevalensi Stunting

Stunting atau pertumbuhan terhambat merupakan masalah serius yang mempengaruhi kualitas hidup dan perkembangan anak. Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, juga menghadapi tantangan dalam menangani stunting dengan tingkat anak terkena stunting mencapai 5.7% pada tahun 2021. Namun, di tengah tantangan ini, Kabupaten Bulungan mengambil langkah maju dengan merancang Program Peduli Stunting dengan Kartu Edukasi Gizi (PENTING DEKATI GIZI). Program inovatif ini menawarkan pendekatan personal dan teknologi yang efektif untuk mencegah stunting dan meningkatkan status gizi anak.

Stunting adalah kondisi yang muncul akibat kekurangan gizi yang berlangsung lama, terutama selama seribu hari pertama kehidupan anak. Menurut Global Nutrition Report 2020, hampir 150 juta anak di seluruh dunia menderita stunting, dengan tingkat kejadian tertinggi di Asia Selatan dan Sub-Sahara Afrika. Di Indonesia, prevalensi stunting pada anak balita mencapai 27,7%, dengan diperkirakan sekitar 8,4 juta balita terkena dampak stunting.

Secara umum perkembangan prevalensi stunting di Kabupaten Bulungan disampaikan dalam grafik berikut,



Gambar 2.13 Prevalensi Stunting Kabupaten Bulungan 2021-2023

2.4.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan untuk menyediakan dan memenuhi pelayanan dasar dan mutlak yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan. seperti Kondisi jalan, rasio tempat beribadah, luas RTH publik, Rasio Bangunann Ber-IMB, dan Ketaatan Terhadap RTRW.

2.4.3.1. Kondisi Jalan

Ketersediaan Infrastruktur yang layak dan memadai merupakan aspek dasar yang diperlukan dalam proses pembangunan. Jalan dan Jembatan dibutuhkan untuk meningkatkan mobilitas penduduk maupun perdagangan barang antar wilayah. Untuk mendukung kelancaran transportasi darat, tahun 2022 di kabupaten Bulungan telah dibangun jalan sepanjang 512,66 km yang terdiri dari 512,66 Jalan kab/Kota .

Tabel 2.32 Kondisi Jalan Kab/Kota di Kabupaten Bulungan 2017-2022

Kondisi Jalan (Km)	2019	2020	2021	2022
Baik	165.06	198.54	235.71	248.19
Sedang	100.18	100.18	102.13	103.86
Rusak	150.29	137.23	127.04	117.41
Rusak Berat	97.13	76.72	47.79	43.20
Jumlah	512,67	512,67	512,67	512,67

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan, 2023

Panjang jalan dalam kondisi baik terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 panjang jalan dalam kondisi baik 165,06 km naik menjadi 248.19 km pada tahun 2022. panjang jalan kondisi sedang dari 100,18 km meningkat menjadi 103.86 km. Sedangkan panjang jalan dalam kondisi rusak mengalami penurunan yaitu dari 150,29 km pada tahun 2019 menjadi hanya 117.41 km pada tahun 2022. Adapun panjang jalan dalam kondisi rusak berat sepanjang 97,13 km turun menjadi 43,20 km pada tahun 2022.

2.4.3.2. Rasio Tempat Beribadah Per Satuan Penduduk

Beribadah menurut agama dan kepercayaan yang dianut, merupakan wujud kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Beribadah sangat berguna dalam membentuk manusia seutuhnya terutama kaum generasi muda. Generasi muda mempunyai energi yang kuat yang dapat dimanfaatkan sebagai manusia yang produktif. Untuk itu diperlukan sarana/tempat ibadah dalam mewujudkan hal tersebut bagi masing-masing pemeluk agama.

Tabel 2.33 Rasio Tempat Beribadah Persatuan Penduduk di Kabupaten Bulungan tahun 2022-2023

No.	Uraian	2022	2023
1.	Jumlah Tempat Beribadah	428	504
2.	Jumlah Penduduk	139.733	151.844
3.	Rasio Tempat Beribadah per 1.000 penduduk	3,06	3,31
4.	Rasio Tempat Beribadah terhadap penduduk	1:326	1:301

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan, 2024

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa rasio tempat ibadah per seribu penduduk pada tahun 2020 sebesar 3,31 yang berarti pada tahun 2020 satu tempat beribadah bisa menampung 301 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tempat beribadah di Kabupaten Bulungan cukup memadai.



2.4.3.3. Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah Kota/Kawasan Perkotaan

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan, yang ditetapkan dengan kriteria:

- a. Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 m²
- b. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk hamparan dan jalur; dan
- c. didominasi komunitas tumbuhan

2.5. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Publik

2.5.1. Asumsi Dasar

Laju pertumbuhan penduduk Indonesia dapat kita ketahui berdasarkan kelahiran, kematian, dan migrasi yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk itu sendiri, maka dari itu diperlukan suatu proyeksi penduduk yang memberikan informasi mengenai penduduk di masa yang akan datang. Proyeksi yang berdasarkan laju pertumbuhan penduduk belum dapat dilakukan karena hanya mencerminkan total penduduk saja. Metode-metode proyeksi penduduk antara lain, metode matematik, metode komponen dan metode campuran. Metode matematik biasa digunakan untuk menghitung proyeksi total penduduk suatu wilayah tertentu tanpa memperhatikan komponen demografi yaitu kelahiran, kematian dan migrasi (UN, 1952), namun demikian hasil yang diperoleh metode matematik khususnya di Indonesia, lebih akurat dibanding metode komponen (Karyana, 2002). Menurut BPS bila proyeksi penduduk dihitung untuk jangka waktu yang pendek atau kurang dari 5 tahun baik dengan metode matematik maupun komponen akan didapat hasil jumlah penduduk yang hampir tidak ada perbedaan. Hasil proyeksi metode matematik relatif masih cukup baik jika jangka waktu yang diproyeksikan pendek, ini disebabkan oleh kelahiran, kematian, dan migrasi tidak berubah secara signifikan.

Salah satu metode matematis untuk perhitungan proyeksi penduduk adalah menggunakan Model Linear. Model linear menurut Klosterman (1990) adalah teknik proyeksi yang paling sederhana dari seluruh model trend. Model ini menggunakan persamaan derajat pertama (first degree equation). Berdasarkan hal tersebut, penduduk diproyeksikan sebagai fungsi dari waktu.

Hasil proyeksi akan berbentuk suatu garis lurus. Model ini berasumsi bahwa penduduk akan bertambah/berkurang sebesar jumlah absolute yang sama/tetap (β) pada masa yang akan datang sesuai dengan kecenderungan yang terjadi pada masa lalu. Ini berarti bahwa, jika P_{t+1} dan P_t adalah jumlah populasi dalam tahun yang berurutan, $P_{t+1} - P_t$ yang adalah perbedaan pertama yang selalu tetap (konstan). Klosterman (1990), mengacu pada Pittengar (1976), mengemukakan bahwa model ini hanya digunakan jika data yang tersedia relatif terbatas, sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan model lain. Selanjutnya, Isserman (1977) mengemukakan bahwa model ini hanya dapat diaplikasikan untuk wilayah kecil dengan pertumbuhan yang lambat, dan tidak tepat untuk proyeksi pada wilayah-wilayah yang lebih luas dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi.

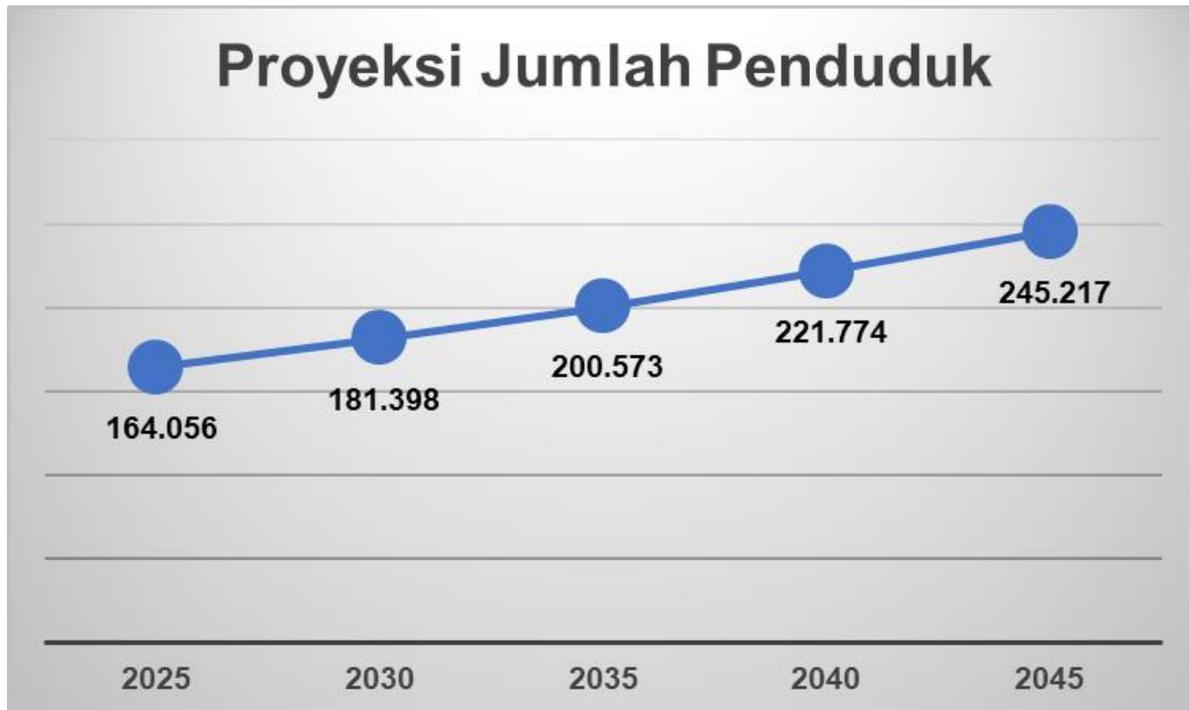
2.5.2. Proyeksi Demografi 20 Tahun Mendatang

Berdasarkan data eksisting demografi Kabupaten Bulungan secara time series pada tahun sebelumnya, maka dilakukan proyeksi penduduk untuk 20 tahun kedepan berdasarkan angka rata-rata pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bulungan sebagai berikut

Tabel 2.34 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Bulungan

Kecamatan	Tahun Dasar 2023	Proyeksi Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Bunyu	11.972	12.463	13.780	15.237	16.848	18.629
Peso	4.479	4.663	5.156	5.701	6.303	6.969
Peso Hilir	4.168	4.339	4.798	5.305	5.865	6.485
Sekatak	10.899	11.346	12.545	13.871	15.338	16.959
Tanjung Palas	17.884	18.617	20.585	22.761	25.167	27.828
Tanjung Palas Barat	6.502	6.769	7.484	8.275	9.150	10.117
Tanjung Palas Tengah	12.261	12.764	14.113	15.605	17.254	19.078
Tanjung Palas Timur	19.512	20.312	22.459	24.833	27.458	30.361
Tanjung Palas Utara	10.744	11.185	12.367	13.674	15.120	16.718
Tanjung Selor	59.172	61.599	68.110	75.310	83.270	92.072
Total Kab. Bulungan	157.593	164.056	181.398	200.573	221.774	245.217

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan, 2024, Hasil Analisis 2024



Gambar 2.14 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Bulungan 2025-2045

Sumber : Hasil Analisis, 2024

2.5.3. Rasio Ketergantungan dan Bonus Demografi

Bonus demografi terjadi pada transisi demografi tahap kedua. Perhitungan bonus demografi diperlukan untuk mengetahui apakah suatu negara atau daerah telah mengalami bonus demografi atau belum. Di era otonomi daerah sekarang ini, pengendalian penduduk dan keluarga berencana menjadi kewenangan wajib daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan daerah mengenai pengendalian penduduk dan keluarga berencana tersebut kemudian dituangkan dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang GDPK. Lebih jauh, kebijakan daerah yang dituangkan dalam GDPK tersebut diformulasikan berdasarkan perhitungan bonus demografi. Dalam perhitungan bonus demografi dikenal 2 model yaitu rasio ketergantungan (dependency ratio) dan ekonomi daur hidup (economic lifetime)(Kabul & Haliliah, 2019). Selanjutnya, Kabul & Haliliah (2019) menyatakan bahwa model rasio ketergantungan meliputi 4 metode, yaitu metode Cheung et al., (2004); metode Adioetomo (2012); metode Kombine & Kabe (2009); dan metode Golini (2014). Sedangkan model ekonomi daur hidup meliputi 2 metode yakni rasio

dukungan (support ratio) dan metode rasio daur hidup kesejahteraan pensiun terhadap total pendapatan tenaga kerja (Mason et al., 2017).

Dalam model rasio ketergantungan (dependency ratio) dimana bonus demografi dihitung berdasarkan rasio antara jumlah penduduk usia tidak produktif dengan jumlah penduduk usia produktif. Jumlah penduduk usia tidak produktif yang dimaksud adalah penduduk muda (0-14 tahun) dan penduduk tua atau lanjut usia (≥ 65 tahun), sementara penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15 sampai 64 tahun. Rasio ketergantungan di Kabupaten Bulungan sebagaimana ditampilkan pada grafik berikut,

Tabel 2.35 Proyeksi Rasio Ketergantungan Kabupaten Bulungan 2025-2045

Kelompok Umur	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Usia 0-14 tahun	24,62	24,50	24,10	23,78	22,21	21,24
Usia 15-64 tahun (produktif)	68,26	67,78	66,99	66,10	67,20	67,51
Usia > 65 tahun	7,12	7,72	8,91	10,12	10,59	11,25
Rasio Ketergantungan	46,50	47,54	49,28	51,29	48,81	48,13

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan 2024, Hasil Analisis 2024

2.5.4. Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil proyeksi demografi, selanjutnya proyeksi kebutuhan sarana prasarana untuk dua puluh tahun kedepan yang dirinci per lima tahun. Untuk mengetahui kebutuhan sarana prasarana terhadap jumlah penduduk dapat mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional. Selain itu penentuan kebutuhan sarana prasarana terhadap jumlah penduduk juga dapat didasarkan pada NSPK dari K/L terkait. Proyeksi kebutuhan sarana prasarana yang disajikan disampaikan pada tabel-tabel berikut,

**Tabel 2.36** Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal

Uraian	Tahun					
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	157.593	164.056	181.398	200.573	221.774	245.217
Proyeksi Kebutuhan Rumah (unit)	37.168	38.693	42.783	47.305	52.305	57.834

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan 2024, Hasil Analisis 2024

Tabel 2.37 Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Air Minum

Uraian	Tahun					
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	157.593	164.056	181.398	200.573	221.774	245.217
Proyeksi Kebutuhan Air Minum (l/h)	1.313	1.367	1.512	1.671	1.848	2.043

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan 2024, Hasil Analisis 2024

Tabel 2.38 Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Listrik

Uraian	Tahun					
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	157.593	164.056	181.398	200.573	221.774	245.217
Jumlah Rumah	37.168	38.693	42.783	47.305	52.305	57.834
Proyeksi Kebutuhan Listrik (kWh)	48.319	50.300	55.617	61.496	67.997	75.184

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan 2024, Hasil Analisis 2024

Tabel 2.39 Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Penanganan Persampahan berdasarkan Jumlah
Produksinya

Uraian	Tahun					
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	157.593	164.056	181.398	200.573	221.774	245.217
Proyeksi Produksi Sampah (ton/thn)	118	123	136	150	166	184

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan 2024, Hasil Analisis 2024

Tabel 2.40 Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Prasarana Kesehatan

Uraian	Tahun					
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	157.593	164.056	181.398	200.573	221.774	245.217
Rumah Sakit (tempat tidur)	158	164	181	201	222	245
Puskesmas (Unit)	8	8	9	10	11	12

Sumber : BPS Kabupaten Bulungan 2024, Hasil Analisis 2024

Tabel 2.41 Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Prasarana Pendidikan

Uraian	Tahun					
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	157.593	164.056	181.398	200.573	221.774	245.217
TK	126	131	145	160	177	196
SD/MI	98	103	113	125	139	153
SMP/MTs	33	34	38	42	46	51
SMA/SMK/MA	33	34	38	42	46	51

2.6. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Berdasarkan RTRW Kabupaten Bulungan 2021-2041 disampaikan beberapa kebijakan dalam pengembangan wilayah daerah Kabupaten Bulungan, yang antara lain terdiri dari:

- a. pengembangan pusat pemerintahan yang modern yang memfasilitasi pelayanan administrasi, pelayanan umum, dan pelayanan sosial untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. pengembangan pusat kegiatan ekonomi skala regional berbasis industri melalui penciptaan nilai tambah yang dilakukan dengan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan lestari sebagai basis utama ekonomi kabupaten dan sumber penghidupan masyarakat Daerah;
- c. peningkatan, pembangunan, dan pemerataan aksesibilitas infrastruktur dan teknologi untuk mewujudkan Daerah yang berdaya saing; dan
- d. perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam di Daerah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup

Berdasarkan kebijakan pengembangan daerah yang ditetapkan di atas, maka selanjutnya ditetapkan strategi penataan ruang wilayah untuk masing-masing kebijakan pengembangan daerah.



Strategi untuk pengembangan daerah pertama adalah diarahkan untuk pengembangan Kabupaten Bulungan sebagai pusat pemerintahan baik kabupaten maupun provinsi yang memfasilitasi pelayanan administrasi, pelayanan umum, dan pelayanan sosial untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Strategi yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Bulungan 2021-2041 untuk pengembangan pusat pemerintahan yang modern Kabupaten Bulungan antara lain:

- a. membangun dan mengembangkan Kawasan pusat pemerintahan yang didukung dengan prasarana dan sarana penunjang pelayanan administrasi yang terpadu dan terintegrasi;
- b. membangun dan mengembangkan prasarana dan sarana pelayanan umum dan pelayanan sosial pada pusat pelayanan kegiatan di perkotaan dan perdesaan; dan
- c. mengembangkan pusat kegiatan sosial, ekonomi dan budaya sebagai penunjang kegiatan masyarakat.

Strategi untuk pengembangan pusat kegiatan ekonomi skala regional berbasis industri melalui penciptaan nilai tambah yang dilakukan dengan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan lestari sebagai basis utama ekonomi dan sumber penghidupan masyarakat di daerah, terdiri atas:

- a. membangun dan mengembangkan pusat kegiatan ekonomi di perkotaan dan di luar perkotaan di daerah demi pemerataan sumber penghidupan ekonomi penduduk;
- b. mengembangkan dan mengoptimalkan keberadaan kawasan industri sebagai fasilitas pengelolaan hasil produksi sumber daya alam hutan, pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan;
- c. meningkatkan pengelolaan hasil hutan yang bernilai ekonomi;
- d. membangun Kawasan Agropolitan pada Kawasan pertanian potensial yang mempunyai akses keterkaitan antarwilayah yang didukung dengan infrastruktur pertanian dan distribusi logistik yang baik;
- e. memfasilitasi pengembangan *food estate* sebagai lahan produksi pangan Daerah dan tingkat regional; dan



- f. memfasilitasi pengembangan industri hilir sektor kehutanan, sektor pertanian, sektor peternakan, sektor perkebunan, sektor perikanan dan sektor pertambangan guna mengolah komoditas daerah

Strategi untuk peningkatan, pembangunan, dan pemerataan aksesibilitas infrastruktur dan teknologi untuk mewujudkan daerah yang berdaya saing, terdiri atas:

- a. meningkatkan aksesibilitas jaringan yang menghubungkan ibu kota daerah dengan seluruh wilayah kecamatan;
- b. meningkatkan dan membangun jaringan Jalan yang memberikan akses pada kawasan strategis dan kawasan sentra produksi;
- c. meningkatkan sarana transportasi perairan darat sebagai alternatif transportasi darat;
- d. membangun terminal, pelabuhan, bandar udara, dan jalur kereta api pendukung pada kawasan Strategis dan sentra produksi;
- e. membangun pelabuhan laut sebagai pendukung pergerakan perdagangan;
- f. membangun, meningkatkan dan memelihara jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian guna mendukung kegiatan pertanian, rencana agropolitan, dan pengembangan *food estate* serta infrastruktur sumber daya air lainnya dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan air untuk berbagai kebutuhan dan perlindungan terhadap daya rusak air;
- g. menyediakan dan meningkatkan infrastruktur kegiatan perikanan dan aksesibilitasnya ke sentra produksi perikanan; dan
- h. mengembangkan jaringan prasarana energi, jaringan prasarana telekomunikasi, dan jaringan prasarana pendukung permukiman secara merata untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan kegiatan penduduk.

Strategi untuk perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam di daerah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, terdiri atas:

- a. meningkatkan dan mengembangkan sistem pengawasan dan pengendalian kawasan hutan budi daya;
- b. meningkatkan perlindungan terhadap kawasan hutan sebagai kawasan konservasi dan pusat penelitian dan pengembangan ekosistem hutan;



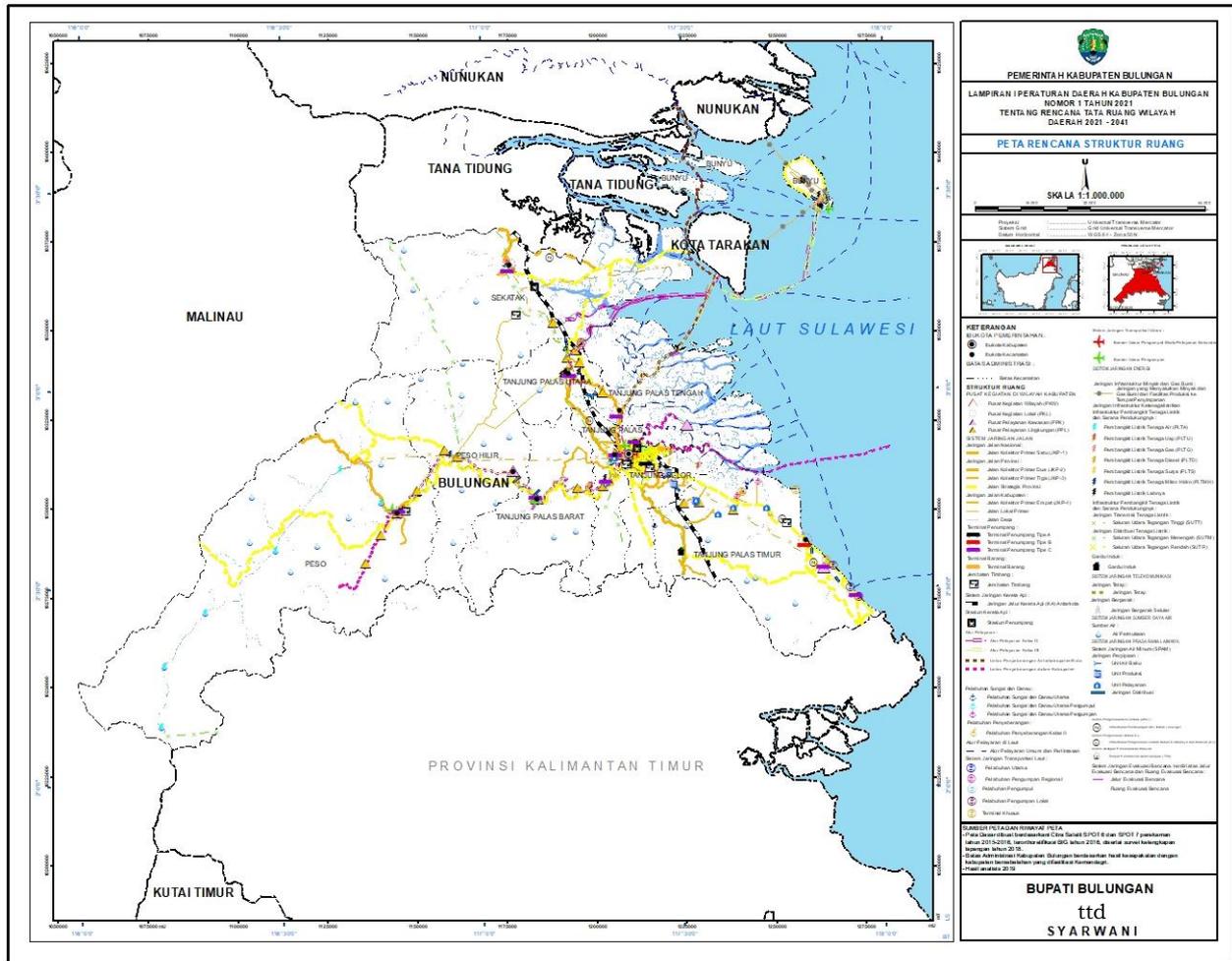
- c. memfasilitasi keberadaan hutan adat dan perhutanan sosial bagi kegiatan masyarakat di daerah;
- d. melestarikan dan memanfaatkan kawasan hutan mangrove;
- e. merencanakan dan mengembangkan kawasan hutan sebagai fungsi ekologis di perkotaan sebagai bagian dari RTH;
- f. memenuhi kebutuhan RTH seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan yang terdiri dari RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen), dan RTH privat sebesar 10% (sepuluh persen);
- g. menjaga keberadaan pertanian pangan;
- h. melindungi ekosistem perairan pada kawasan sumber daya perikanan agar terhindar dari degradasi dan penurunan produktivitas;
- i. merevitalisasi ekosistem perairan pada kawasan sumber daya perikanan yang sudah terdegradasi;
- j. mengembangkan wisata minat khusus pada aspek lingkungan hidup dan bahari;
- k. mengembangkan potensi desa untuk dikembangkan sebagai desa wisata;
- l. mengembangkan pariwisata dengan pengelolaan berbasis masyarakat dengan berpedoman pada prinsip lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- m. mengembangkan dan melestarikan wisata sejarah budaya;
- n. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi dan infrastruktur pendukung kegiatan wisata; dan
- o. mengembangkan prasarana dan sarana pada obyek daya tarik wisata

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Bulungan dibagi atas sistem pusat kegiatan atau sistem perkotaan dan sistem jaringan prasarana. Sistem perkotaan ditetapkan sebagai berikut:

1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) :
 - PKW Perkotaan Tanjung Selor, Kec. Tanjung Selor
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), terdiri dari :
 - PKL Salimbatu di Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
 - PKL Tanah Kuning di Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 - PKL Bunyu Tengah di Kecamatan Bunyu;
 - PKL Long Bia di Kecamatan Peso; dan



- PKL Sekatak Buji di Kecamatan Sekatak
3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), terdiri dari :
- PPK Long Beluah di Kecamatan Tanjung Palas Barat;
 - PPK Mangkupadi di Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 - PPK Long Tunggu di Kecamatan Peso Hilir;
 - PPK Tanjung Palas Hilir di Kecamatan Tanjung Palas; dan
 - PPK Tanjung Buka di Kecamatan Tanjung Palas Tengah.
4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), terdiri dari :
- PPL Long Buang di Kecamatan Peso;
 - PPL Long Lian di Kecamatan Peso;
 - PPL Long Peso di Kecamatan Peso;
 - PPL Lepak Aru di Kecamatan Peso;
 - PPL Naha Aya di Kecamatan Peso Hilir;
 - PPL Long Telenjau di Kecamatan Peso Hilir;
 - PPL Gunung Putih di Kecamatan Tanjung Palas;
 - PPL Antutan di Kecamatan Tanjung Palas;
 - PPL Mara Satu di Kecamatan Tanjung Palas Barat;
 - PPL Tanjung Selor Timur di Kecamatan Tanjung Selor;
 - PPL Tanjung Agung di Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 - PPL Wono Mulyo di Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 - PPL Pura Sajau di Kecamatan Tanjung Palas Timur;
 - PPL Silva Rahayu di Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
 - PPL Panca Agung di Kecamatan Tanjung Palas Utara;
 - PPL Ruhui Rahayu di Kecamatan Tanjung Palas Utara;
 - PPL Ardi Mulyo di Kecamatan Tanjung Palas Utara;
 - PPL Sekatak Bengara di Kecamatan Sekatak; dan
 - PPL Bunyu Timur di Kecamatan Bunyu



Gambar 2.15 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Bulungan

Sumber : RTRW Kab.Bulungan 2021-2041

Terkait dengan arahan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bulungan yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Bulungan 2021-2041, ditetapkan terbagi atas kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budi daya.



Untuk Kawasan lindung terdiri dari :

a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, seluas kurang lebih 212.755 (dua ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh lima) hektar, terdiri atas :

- Kawasan hutan lindung, seluas kurang lebih 206.961 (dua ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh satu) hektar, terdapat di Kecamatan Bunyu, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, dan Kecamatan Tanjung Palas Barat
- Kawasan Lindung Gambut, terdapat di Kecamatan Tanjung Palas Tengah
- Kawasan resapan air, terdapat di Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Selor, dan Kecamatan Sekatak

b. Kawasan perlindungan setempat;

Kawasan perlindungan setempat, seluas kurang lebih 33.721 (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh satu) hektar, terdiri atas :

- Sempadan Pantai, terdapat di Kecamatan Bunyu, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, dan Kecamatan Tanjung Palas Timur
- Sempadan Sungai, terdapat pada sepanjang sungai dan anak sungai yang tersebar pada Kawasan Perkotaan dan perdesaan di seluruh Daerah
- Kawasan sekitar danau atau waduk, terdapat di Kecamatan Peso dan Kecamatan Bunyu

c. Kawasan lindung geologi;

Kawasan lindung geologi ditetapkan seluas kurang lebih 4.986 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh enam) hektar, terdiri atas:

- Kawasan cagar alam geologi, terdiri dari : Kawasan keunikan batuan dan fosil, terdapat di Kecamatan Tanjung Palas Barat; dan Kawasan keunikan bentang alam, terdapat di Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Selor, dan Kecamatan Tanjung Palas Timur



- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, berupa sempadan mata air, terdapat di Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Bunyu, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Peso Hilir, dan Kecamatan Peso

d. Kawasan rawan bencana

Kawasan rawan bencana, seluas kurang lebih 622 (enam ratus dua puluh dua) hektar terdiri dari:

- Kawasan rawan bencana gerakan tanah dan/atau longsor, di Kecamatan Sekatak;
- Kawasan rawan banjir, di Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Peso, dan Kecamatan Peso Hilir; dan
- Kawasan rawan tsunami dan/atau abrasi, di sepanjang Kawasan pesisir Kabupaten Bulungan

e. Kawasan ekosistem *mangrove*.

Kawasan ekosistem *mangrove* ditetapkan seluas kurang lebih 14.102 (empat belas ribu seratus dua) hektar terdapat di Kecamatan Bunyu, Kecamatan Sekatak, dan Kecamatan Tanjung Palas Tengah.

Sedangkan untuk Kawasan budi daya, ditetapkan 9 (Sembilan) tipologi kawasan yang dikembangkan di Kabupaten Bulungan, antara lain:

a. Kawasan hutan produksi

Kawasan hutan produksi yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Bulungan 2021-2041 adalah seluas kurang lebih 742.769 hektar, terdiri atas:

- Kawasan hutan produksi terbatas;
Kawasan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 461.196 (empat ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh enam) hektar, terdapat di Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Selor, dan Kecamatan Tanjung Palas Timur
- Kawasan hutan produksi tetap



Kawasan hutan produksi tetap, seluas kurang lebih 275.976 hektar, terdapat di Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Timur, dan Kecamatan Bunyu

- Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi

Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, seluas kurang lebih 5.597 (lima ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) hektar, terdapat di Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas Timur, dan Kecamatan Sekatak

b. Kawasan perkebunan rakyat

Kawasan perkebunan rakyat seluas kurang lebih 4.048 (empat ribu empat puluh delapan) hektar, terdapat di Kecamatan Peso, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Sekatak, dan Kecamatan Tanjung Selor

c. Kawasan pertanian

Kawasan pertanian seluas kurang lebih 244.856 (dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam) hektar, terdiri atas:

- Kawasan tanaman pangan, terdapat di Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Utara, dan Kecamatan Bunyu
- Kawasan hortikultura, terdapat di Kecamatan Sekatak, Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Barat, dan Kecamatan Tanjung Palas
- Kawasan perkebunan, terdapat di Kecamatan Peso, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Utara, dan Kecamatan Bunyu

d. Kawasan perikanan

Kawasan perikanan, seluas kurang lebih 40.361 (empat puluh ribu tiga ratus enam puluh satu) hektar, terdiri atas:



- Kawasan perikanan tangkap, Kawasan perikanan tangkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa sarana penunjang perikanan terdiri atas:
 - (1) tempat pelelangan ikan, terdiri atas:
 - Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Selor;
 - Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Bunyu; dan
 - Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Tanah Kuning.
 - (2) sarana dan prasarana perikanan, terdiri atas:
 - Balai Benih Ikan (BBI) Bunyu;
 - Balai Benih Ikan (BBI) Tanjung Selor;
 - *cold storage* di Kecamatan Tanjung Selor; dan
 - Balai Benih Udang di Kecamatan Tanjung Palas Timur.
- Kawasan perikanan budi daya, terdapat di Kecamatan Bunyu, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, dan Kecamatan Tanjung Palas.
Kawasan perikanan budi daya lainnya pada perairan umum dalam bentuk sungai dan kolam air tawar yang tersebar di seluruh kecamatan

e. Kawasan pertambangan dan energi;

Kawasan pertambangan dan energi seluas kurang lebih 10.655 (sepuluh ribu enam ratus lima puluh lima) hektar, terdiri atas:

- Kawasan pertambangan mineral, berupa pertambangan mineral logam terdapat di Kecamatan Bunyu
- Kawasan pertambangan batubara, terdapat di Kecamatan Tanjung Palas Timur, dan Kecamatan Tanjung Selor
- Kawasan peruntukan pertambangan batuan, tersebar di seluruh Kecamatan
- Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, terdapat di Kecamatan Bunyu

f. Kawasan industri

Kawasan industri, seluas kurang lebih 11.549 (sebelas ribu lima ratus empat puluh sembilan) hektar, terdiri atas:

- Kawasan industri, terdapat di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Bunyu, dan Kecamatan Tanjung Selor



- sentra industri kecil dan menengah, terdapat di Kecamatan Tanjung Palas. Sentra industri kecil dan menengah dan industri kecil menengah lainnya dapat dikembangkan pada setiap kecamatan dengan bidang usaha komoditas kerajinan rakyat yang dikelola dengan kearifan lokal

g. Kawasan pariwisata;

Kawasan pariwisata, seluas kurang lebih 79 (tujuh puluh sembilan) hektar terdiri atas:

- Kawasan pariwisata alam, terdiri atas :
 - (1) Kawasan wisata pantai, di Kecamatan Tanjung Palas Timur dan Kecamatan Bunyu; dan
 - (2) Kawasan Kawasan wisata sungai, pada:
 - Kawasan wisata Giram Sungai di Kecamatan Peso;
 - Kawasan wisata Giram Sungai di Kecamatan Peso Hilir;
 - Kawasan wisata Giram Km.4 di Kecamatan Tanjung Palas Barat;
 - Kawasan wisata Giram Bekiak di Kecamatan Tanjung Palas Barat;
 - Kawasan wisata Air Terjun Km.18 dan Km.12 di Kecamatan Tanjung Selor;
 - Kawasan wisata Air Terjun Ramban di Kecamatan Sekatak;
 - Kawasan wisata Air Terjun Anang Dachlan di Kecamatan Peso Hilir;
 - Kawasan wisata Air Terjun Km. 36 di Kecamatan Tanjung Selor;
 - Kawasan wisata Air Terjun Sulok di Kecamatan Tanjung Palas Utara;
 - Kawasan wisata alam Batu Tumpuk Panca Agung di Kecamatan Tanjung Palas Utara;
 - Kawasan water sport Km.16 di Kecamatan Tanjung Selor; dan
 - Kawasan wisata Air Terjun Lutung di Kecamatan Peso
- Kawasan pariwisata budaya, terdiri atas :
 - (1) Kawasan wisata miniatur etnis budaya di Kecamatan Tanjung Palas;
 - (2) Kawasan wisata rumah adat di Kecamatan Tanjung Selor;
 - (3) Kawasan wisata Masjid Kesultanan di Kecamatan Tanjung Palas;
 - (4) Kawasan wisata Makam Sultan Bulungan di Kecamatan Tanjung Palas;
 - (5) Kawasan wisata Makam Syaid Abdullah Bil Faqih di Kecamatan Tanjung Palas Tengah;



- (6) Kawasan wisata Makam Syaid Achmad Maghribi di Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
- (7) Kawasan wisata Makam Datu Adil di Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
- (8) Kawasan wisata Makam Keramat Aji Kuning di Kecamatan Tanjung Palas Timur;
- (9) Kawasan wisata Makam Makan Orang Kayan Kuno di Kecamatan Peso;
- (10) Kawasan wisata Makam Keramat Syaid Ali Al Idrus di Kecamatan Tanjung Palas Tengah; dan
- (11) Kawasan wisata Makam Pangeran Bendahara di Kecamatan Tanjung Palas

h. Kawasan permukiman

Kawasan permukiman, seluas kurang lebih 35.246 (tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam) hektar, terdiri atas:

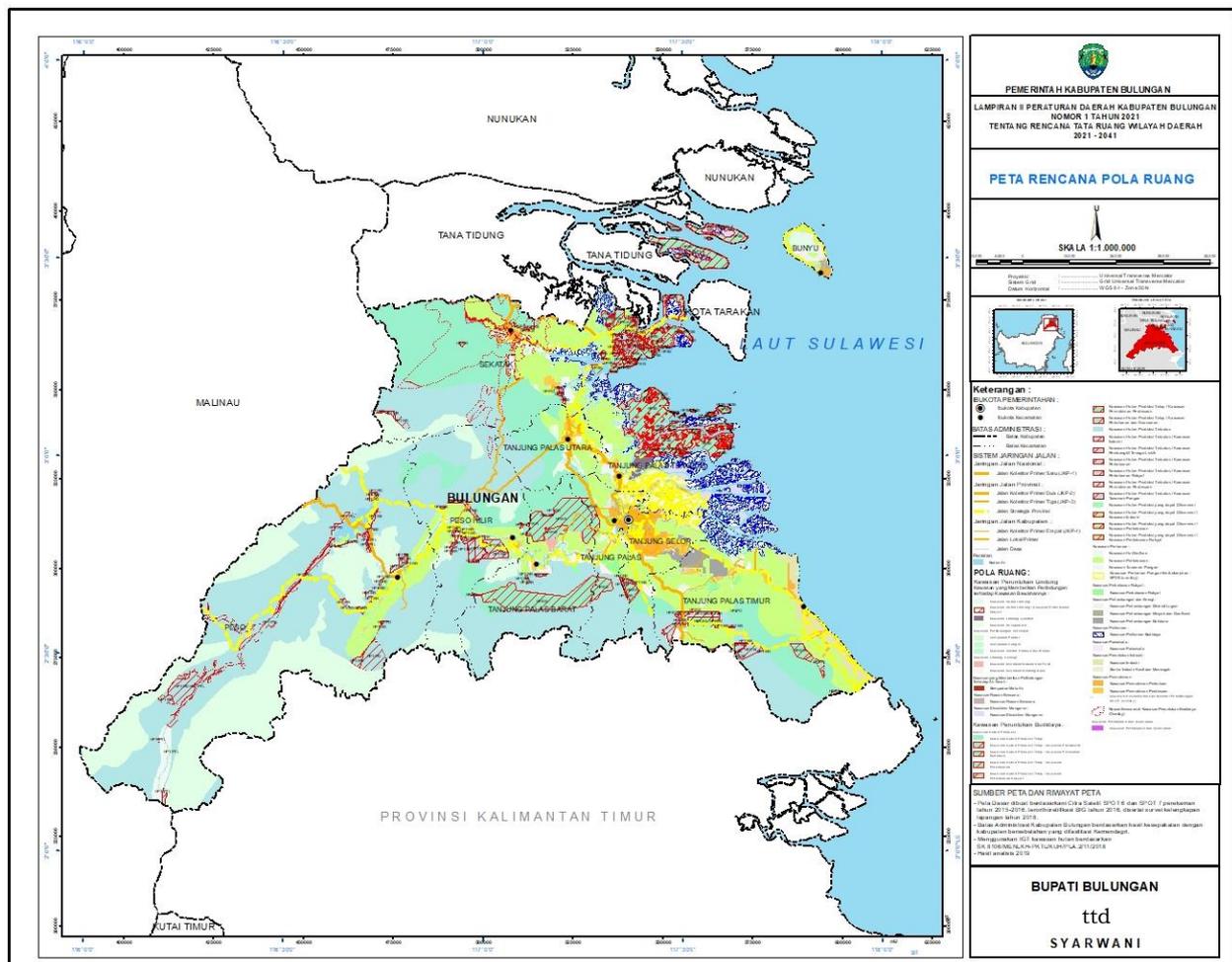
- Kawasan permukiman perkotaan, terdapat di Kecamatan Sekatak, Kecamatan Bunyu, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, Kecamatan Tanjung Selor, dan Kecamatan Tanjung Palas Timur; dan
- Kawasan permukiman perdesaan, tersebar di seluruh kecamatan

i. Kawasan pertahanan dan keamanan.

Kawasan pertahanan dan keamanan, seluas kurang lebih 31 hektar antara lain terdiri dari :

- Kawasan Brigadir Infantri (BRIGIF) 24/BC Bulungan Cakti di Kecamatan Tanjung Selor;
- Kawasan Markas Brigadir Infantri (MABRIGIF) 24/ Bulungan Cakti di Kecamatan Tanjung Selor;
- Kawasan Kompi Senapan (KIPAN) B Batalyon Infanteri (YONIF) 613/Raja Alam di Kecamatan Tanjung Selor;
- Kawasan Komando Distrik Militer (KODIM) 0903 di Kecamatan Tanjung Selor;
- Kawasan Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) Pindada di Kecamatan Tanjung Palas Timur;
- Kawasan Pos Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) Tanah Kuning di Kecamatan Tanjung Palas Timur;

- Kawasan Kompilasi Senapan (KIPAN) B Batalyon Infanteri (YONIF) 613/Raja Alam di Kecamatan Tanjung Selor;
- Kawasan Markas Komando Distrik Militer (MAKODIM) 0903 di Kecamatan Tanjung Selor;
- Pos TNI AL Bunyu, POSAL Pulau Bunyu di Kecamatan Bunyu;
- Pos TNI AL Tanjung Selor di Kecamatan Tanjung Selor; dan
- Komando Rayon Militer yang tersebar di wilayah Daerah.

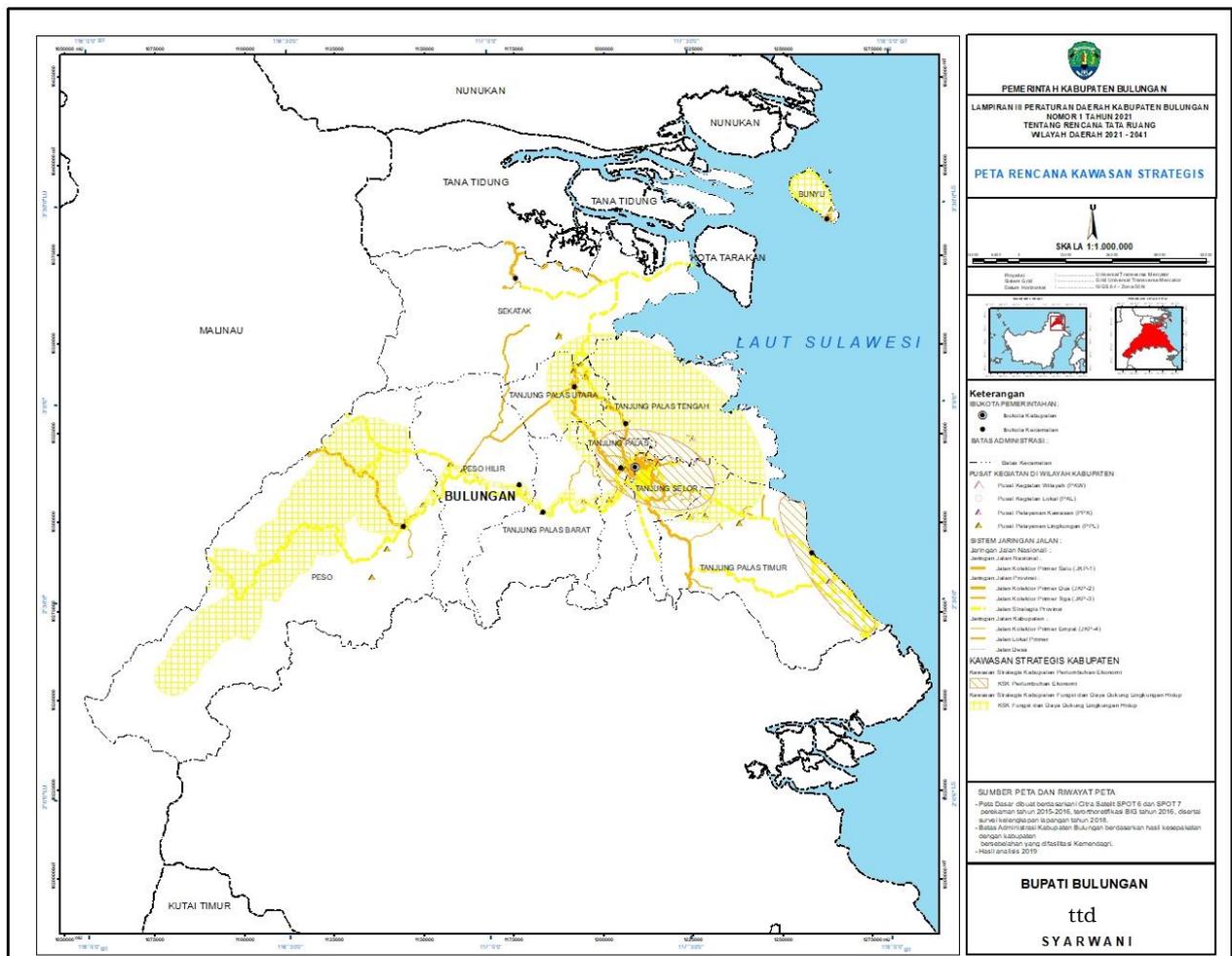


Gambar 2.16 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bulungan

Sumber : RTRW Kab.Bulungan 2021-2041

Berdasarkan RTRW Kabupaten Bulungan 2021-2041, ditetapkan kawasan strategis pada wilayah daerah kabupaten, terdiri dari :

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, berupa:
- Kawasan pertanian tanaman pangan terpadu *food estate and rice estate* di Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas;
 - Kawasan Perkotaan Tanjung Palas di Kecamatan Tanjung Palas; dan
 - Kawasan Perkotaan Tanah Kuning-Mangkupadi di Kecamatan Tanjung Palas Timur.
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, berupa:
- Kawasan hulu Sungai Kayan pada Pembangkit Tenaga Listrik (PLTA) Peso dan Kawasan Delta Kayan sebagai satu kesatuan hulu hilir untuk konservasi sumber daya air dan ekosistem; dan
 - Kawasan sekitar Hutan Lindung Pulau Bunyu di Kecamatan Bunyu.



Gambar 2.17 Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Bulungan

Sumber : RTRW Kab.Bulungan 2021-2041



3 | GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pada bab ini akan disampaikan mengenai gambaran umum keuangan daerah Kabupaten Bulungan pada 5 tahun terakhir yang menjadi gambaran kemampuan daerah dalam pendanaan pembangunan dan menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan dan program kegiatan dengan menyesuaikan serta mempertimbangkan kemampuan pendanaan daerah

3.1. Gambaran Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Rancangan Teknokratik RPJM ini merupakan masukan bagi penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 Kabupaten Bulungan dimana dalam penyusunan rencana pembangunan nantinya membutuhkan masukan terkait dengan arah kebijakan keuangan daerah yang sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintah Daerah, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan sistem yang menyeluruh mengenai pendanaan dalam pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilakukan secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah.

Pemerintah pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama, yaitu fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi dilaksanakan oleh pemerintah Pusat, sedangkan fungsi alokasi oleh pemerintah Daerah, yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi dan situasi masyarakat setempat. Pendanaan untuk pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut diatas menganut prinsip *Money follows Function*, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Lebih dalam lagi maknanya adalah bahwa pengeluaran (belanja daerah) harus berdasarkan kepada program dan kegiatan prioritas tinggi



yang nantinya saat digunakan oleh Bupati Terpilih benar-benar untuk mewujudkan visi dan misi, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulungan.

Agar pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dapat terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan Pusat dibiayai dari APBN, baik dalam hal kewenangan pusat yang didekosentrasikan kepada Gubernur ataupun yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka tugas pembantuan.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Bulungan yang baik di masa periode 2025-2029 ini, maka dalam penyusunan rancangan teknokratik ini perlu dilakukan kajian awal terkait dengan gambaran keuangan agar memudahkan dalam memberi masukan dalam perencanaan keuangan, upaya penggalan potensi pendapatan, melakukan efisiensi belanja, serta mengembangkan sumber pembiayaan.

3.2. Kinerja Keuangan Kabupaten Bulungan

3.2.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD ditunjukkan dengan perkembangan pendapatan dan belanja, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah sebagaimana penjelasan berikut.

Gambaran mengenai perkembangan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan selama kurun waktu 5 tahun (2019-2023) dapat dilihat pada tabel dibawah. Analisis terhadap perkembangan pendapatan dan belanja daerah ini dapat dijelaskan antara lain:

- 1) Total pendapatan cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan total pendapatan mencapai sebesar 5,45%. Kenaikan ini didominasi oleh kenaikan pajak daerah yang mencapai 8,57%, peningkatan cukup signifikan retribusi daerah mencapai rata-rata 12,8%, dan pendapatan lain-lain yang sah mencapai 11,53%, namun pendapatan dari hasil pengelolaan secara-rata-rata minus 8,81%.



- 2) Kenaikan transfer Pemerintah Pusat karena adanya kenaikan komponen dana perimbangan yang terdiri dari: Dana Alokasi Khusus (fisik reguler dan non fisik), Dana Alokasi Umum, dan Dana Penyesuaian, walaupun disisi lain, komponen Bagi Hasil SDA dan Dana Bagi Hasil Pajak cenderung menurun.
- 3) Perumbuhan pendapatan transfer adalah 5,81%, angka ini tidak cukup signifikan namun jumlah transfer dari Pemerintah Provinsi berupa Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan cenderung meningkat secara linier, walaupun tidak mempengaruhi kenaikan secara signifikan bagi pendapatan transfer secara total.
- 4) PAD cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 6.5% yang didominasi oleh Pajak Daerah dan adanya kenaikan Retribusi Daerah, walaupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah cenderung menurun.
- 5) Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berupa Dana Hibah cenderung menurun terutama untuk komponen hibah dimana pada rentang tahun 2019-2023 pendapatan melalui hibah hanya didapat pada tahun 2019 dan 2020
- 6) Total Belanja cenderung fluktuatif dengan rata-rata angka pertumbuhan sebesar 11,81%. Secara keseluruhan pada mulai tahun 2019-2023 kenaikan belanja terjadi pada semua komponen belanja, dan terlihat adanya kenaikan secara signifikan untuk Belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang mengalami peningkatan diatas 70% yaitu 72,35% dan 70,85%.
- 7) Defisit Anggaran (Pendapatan dikurangi Belanja) cenderung fluktuatif namun di akhir tahun data atau memasuki tahun 2023 defisit meningkat cukup tinggi mencapai 113%.
- 8) Dari sisi Pembiayaan, Pembiayaan Neto setiap tahun menurun, sehingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan kurang efektifnya penggunaan anggaran pembangunan



Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019-2023 Kabupaten Bulungan

No.	Uraian	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	RATA-RATA PERTUMBUHAN
1.	PENDAPATAN	1,232,663,072,491.48	1.211.984.487.657	1.343.444.261.676	1.304.531.279.524	1.507.009.850.992	5,45%
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	132,587,083,681.32	139.835.445.548	126.595.060.000	141.496.436.554	167.311.005.550	6,50%
1.1.1	Pajak Daerah	40,825,412,552.42	35.224.884.278	47.370.000.000	49.034.520.000	53.950.030.000	8,57%
1.1.2	Retribusi Daerah	8,321,179,693.00	8.738.466.394	7.154.060.000	7.538.465.400	11.982.952.250	12,80%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	18,617,998,089.62	10.739.852.281	11.500.000.000	11.500.000.000	11.500.000.000	-8,81%
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	64,822,493,346.28	85.132.242.594	60.571.000.000	73.423.451.154	89.878.023.300	11,53%
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,076,617,078,810.16	1.044.564.602.108	1.106.793.041.477	1.163.034.842.970	1.339.698.845.442	5,81%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	897,070,061,651.00	837.332.156.971	1.030.604.047.000	1.070.772.600.000	1.214.920.245	-19,89%
1.2.2	Transfer Antar Daerah	95,583,654,159.16	49.521.527.506	76.188.994.477	92.262.242.970	124.778.600.442	15,50%
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	23,458,910,000.00	27.584.440.000	36.726.830.231	0	0	25,36%
1.3.1	Hibah	23,458,910,000.00	27.584.440.000				-41,21%
1.3.2	Lain-lain pendapatan sesuai dengan	0	0	36.726.830.231	0	0	



No.	Uraian	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	RATA-RATA PERTUMBUHAN
	ketentuan peraturan perundang- undangan						
2	BELANJA	1,276,281,497,312.05	1.060.889.063.122	1.314.671.327.385	1.484.046.377.585	1.889.439.766.554	11,81%
2.1	BELANJA OPERASI	636,664,162,686.00	852.953.024.558	928.798.784.736	989.815.899.840	1.197.039.860.094	17,59%
2.1.1	Belanja Pegawai	446,542,699,563.00	415.365.642.233	487.706.672.032	522.646.342.735	578.098.133.910	7,05%
	Belanja Barang dan Jasa	346.649.061.757	340.758.377.509	386.638.440.243	377.394.053.802	477.386.183.506	8,97%
	Belanja Subsidi	0	0		500.000.000	2.000.000.000	
2.1.2	Belanja Hibah	30,803,120,000.00	96.529.004.816	53.953.672.461	87.100.850.732	138.229.712.379	72,35%
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	1,440,080,000.00	300.000.000	500.000,000	2.174.652.571	1.325.830.299	70,85%
2.2	BELANJA MODAL	639,617,334,626.05	185.134.895.930	211.495.055.649	326.877.214.536	484.060.287.460	11,46%
2.2.1	Belanja Modal Tanah	8.958.200	0	0	0	162.000.000	
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.106.775.107	35.067.767.789	52.308.207.167	71.897.519.729	98.692.494.761	45,63%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67,343,303,120.00	36.992.412.142	93.824.620.662	152.169.692.914	99.696.119.024	34,07%



No.	Uraian	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	RATA-RATA PERTUMBUHAN
2.2.2	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	326,245,421,519.70	112.864.641.379	64.388.575.900	101.014.726.893	275.793.812.176	30,39%
2.2.3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	246,028,609,986.35	894.271.720	973.551.860	795.275.000	3.566.171.499	59,83%
	SURPLUS/ (DEFISIT)	-43,618,424,820.57	(13.011.167.469)	(44.556.395.677)	(179.515.098.061)	(382.429.915.562)	147,05%
3	PEMBIAYAAN						
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	101,653,037,259.45	61.067.563.146	44.557.760.695	179.524.808.816	382.429835.608	87,24%
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	101,549,965,158.03	46.056.395.677	174.287.098.061	382.429.915.562	528.070.128.523	95,32%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	101.653.037.259	46.056.395.677	174.287.098.061	382.429.915.562	528.070.128.523	95,31%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0	0	
	PEMBIAYAAN NETTO	101,653,037,259.45	59.067.563.146	44.556.395.677	179.524.808.816	382.429.915.562	87,37%
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	58,034,612,438.88	46.056.395.677	174.287.098.061	382.429.915.562	528.070.128.523	103,82%



No.	Uraian	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	RATA-RATA PERTUMBUHAN
	DAERAH TAHUN BERKENAAN						

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019-2023, Kabupaten Bulungan

3.2.2. Neraca Daerah

Gambaran mengenai perkembangan posisi keuangan pada Neraca Kabupaten Bulungan selama kurun waktu 3 tahun (2021-2023) dapat dilihat pada tabel dibawah. Analisis terhadap perkembangan Neraca ini dapat dijelaskan antara lain:

- 1) Total Aset cenderung relatif meningkat dengan angka pertumbuhan rata-rata mencapai 1,34% per tahunnya
- 2) Aset Lancar cenderung meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 3,74%.
- 3) Investasi Jangka Panjang cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 17,04%. Peningkatan ini karena didominasi oleh kenaikan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang meningkat rata-rata 17.29%, dan juga investasi pada Dana Bergulir (Investasi Jangka Panjang Non-Permanen) yang meningkat rata-rata 1,35%
- 4) Nilai Aset Tetap cenderung meningkat dengan rata-rata kenaikan sebesar 10,36%. Semua komponen asset tetap naik, kecuali Aset Tetap Lainnya cenderung menurun.
- 5) Kewajiban (Utang) cenderung menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 0,51%. Semua komponen utang cenderung turun, kecuali Utang Beban cenderung naik.
- 6) Ekuitas Dana (Modal Sendiri) cenderung menurun namun tidak signifikan dengan rata-rata perubahan sebesar 0,36%.

Secara detail terkait dengan neraca daerah Kabupaten Bulungan pada tahun 2021-2023 disampaikan pada tabel berikut,

**Tabel 3.2** Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah per 31 Desember 2021, 2022, dan 2023 Kabupaten Bulungan

Uraian	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan
ASET	6.098.520.093.288	6.179.939.008.591	6.262.444.915.438	1,34%
ASET LANCAR	276.692.162.258	287.038.234.064	297.771.166.130	3,74%
Kas	24.205.055.725	15.423.609.006	9.828.017.646	-36,28%
Piutang Pendapatan	168.583.093.843	280.067.804.897	465.277.825.621	66,13%
Piutang Lainnya	7.386.229.766	6.704.496.371	6.085.685.527	-9,23%
Penyisihan Piutang	(122.923.633.187)	(398.600.274.572)	(1.292.527.521.113)	224,27%
Beban dibayar diuka	810.487	126.196	19.649	-84,43%
Persediaan	84.841.010.414	124.971.700.142	184.084.627.944	47,30%
	-			
INVESTASI JANGKA PANJANG	592.327.811.494	693.276.620.586	811.429.859.150	17,04%
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.328.238.801	5.400.035.002	5.472.798.633	1,35%
Dana Bergulir	5.328.238.801	5.400.035.002	5.472.798.633	1,35%
	-			
Investasi jangka Panjang Permanen	587.716.693.284	689.344.553.570	808.545.884.382	17,29%
Penyertaan Modal Pemerinah Daerah	587.716.693.284	689.344.553.570	808.545.884.382	17,29%
Investasi Permanen Lainnya	-			
	-			



Uraian	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan
ASET TETAP	6.314.882.401.317	6.968.846.612.843	7.690.534.839.286	10,36%
Tanah	3.291.865.562.447	3.840.005.808.618	4.479.418.837.281	16,65%
Peralatan dan Mesin	400.193.862.509	411.718.584.529	423.575.193.742	2,88%
Gedung dan Bangunan	1.146.383.092.050	1.175.564.178.988	1.205.488.068.084	2,55%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.699.896.418.589	5.517.495.606.364	6.477.325.254.625	17,40%
Aset Tetap Lainnya	10.863.676.766	9.404.020.090	8.140.484.640	-13,44%
Konstruksi Dala Pengerjaan	566.687.441.051	1.172.636.834.411	2.426.517.769.419	106,93%
Akumulasi Penyusutan	(3.520.883.055.346)	(4.395.440.063.297)	(5.487.229.495.084)	24,84%
DANA CADANGAN				
Dana Cadangan	-	-	-	
ASET LAINNYA	93.145.722.764	70.177.958.286	52.873.558.582	-24,66%
Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-	-	
Aset Tidak Berwujud	2.337.681.293	2.059.481.472	1.814.389.303	-11,90%
Aset Lainnya	90.758.144.949	68.348.203.817	51.471.710.530	-24,69%
KEWAJIBAN	89.485.343.545	89.025.455.521	88.567.930.980	-0,51%
Kewajiban Jangka Pendek	89.485.343.545	89.025.455.521	88.567.930.980	-0,51%



Uraian	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFI)	-	-	-	5,00%
Utang Bunga	-	-	-	
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	
Pendapatan Diterima Dimuka	659.101.803	585.244.750	519.663.906	-11,21%
Utang Beban	30.310.696.212	42.432.224.949	59.401.265.532	39,99%
Utang Jangka Pendek Lainnya	67.944.102.285	65.058.930.765	62.296.274.877	-4,25%
Kewajiban Jangka Panjang				
Utang dalam Negeri	-	-	-	
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	
EKUITAS DANA	5.806.681.281.892	5.785.897.106.793	5.765.187.325.640	-0,36%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	5.894.661.984.346	5.872.673.552.700	5.850.767.142.912	-0,37%

Sumber: Laporan Neraca 2021-2023, Kabupaten Bulungan

Analisis neraca daerah menjelaskan tentang perkembangan neraca daerah dan analisis rasio keuangan daerah dengan menghitung rasio-rasio: likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas aset, beserta penafsiran rasio-rasio tersebut. Analisis rasio keuangan daerah adalah perhitungan pos-pos neraca untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan keuangan daerah. Rasio likuiditas adalah rasio untuk mengetahui seberapa besar Aset Lancar dapat menutupi Kewajiban Jangka Pendek (hutang). Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengetahui seberapa besar Jumlah Aset dapat menutupi Jumlah Kewajiban. Rasio aktivitas adalah rasio untuk mengetahui seberapa efektif Jumlah Aset dikelola.

Tabel 3.3 Rasio-rasio Keuangan Tahun 2021-2023 Kabupaten Bulungan

No	Uraian	Realisasi		
		Tahun	Tahun	Tahun
		2021	2022	2023
A	Rasio-Rasio Likwiditas			
1	Rasio Lancar	256%	250%	174%
2	Rasio Kas	159%	96%	66%
B	Rasio-Rasio Solvabilitas			
1	Rasio total utang terhadap total aset	1.56%	1.75%	1.52%
2	Rasio total uang terhadap modal	1.58%	1.78%	1.55%
C	Rasio aktivitas			
1	Perputaran Piutang (Kali Per tahun)	8	6	6
2	Rata-rata umur piutang (hari)	45	64	61

Dari tabel diatas, diperoleh informasi tentang rasio-rasio keuangan yang menunjukkan kekuatan dan kelemahan keuangan Pemerintah Kabupaten Bulungan selama tahun 2021, 2022, dan 2023. Analisis terhadap rasio-rasio keuangan tersebut dapat dijelaskan antara lain:

1) Likuiditas:

- a. Rasio Lancar menunjukkan semakin kecil jaminan Jumlah Aset Lancar (Kas, Piutang, Persediaan) dapat menutupi Kewajiban (hutang) Jangka Pendek.



- b. Rasio Kas menunjukkan semakin kecil jaminan Jumlah Kas dapat menutupi Kewajiban (hutang) Jangka Pendek. Bahkan pada tahun 2022 dan 2023, jumlah Kas sudah lebih kecil dari jumlah Kewajiban (illikuid).

2) Solvabilitas:

- a. Rasio Total Utang terhadap Total Aset menunjukkan relative semakin menurun porsi Jumlah Utang terhadap Jumlah Aset, artinya semakin besar jaminan Jumlah Aset untuk membayar hutang. Porsi Jumlah Utang masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan Jumlah Aset, sehingga jaminan Jumlah Aset untuk membayar Utang masih sangat besar.
- b. Rasio Total Utang terhadap Modal (Ekuitas Dana) menunjukkan relatif semakin menurun porsi Jumlah Utang terhadap Ekuitas Dana (Modal Sendiri), artinya semakin besar jaminan Jumlah Modal Sendiri untuk membayar hutang. Porsi Jumlah Utang masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan Jumlah Ekuitas Dana, sehingga jaminan Ekuitas Dana untuk membayar Utang masih sangat besar.

3) Aktivitas:

- a. Rasio perputaran piutang menunjukkan semakin menurun jumlah (kali) berputarnya piutang dalam satu tahun. Tahun 2019, Piutang berputar 8 kali; Tahun 2020, Piutang berputar 6 kali; dan tahun 2021, Piutang berputar 6 kali. Semakin sedikit jumlah (kali) berputarnya, semakin tidak baik.
- b. Rasio rata-rata Umur Piutang menunjukkan relatif semakin lambat piutang dapat ditagih. Tahun 2019, dana tertahan pada Piutang selama 45 hari; Tahun 2020, dana tertahan pada Piutang selama 64 hari; dan tahun 2021, dana tertahan pada Piutang selama 61 hari. Semakin lama dana yang tertahan pada Piutang, semakin tidak baik.

3.2.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dapat diketahui dengan menganalisis proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan. Gambaran kebijakan terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan dijelaskan pada bagian berikut.



A. Proporsi Penggunaan Anggaran

Kebijakan penggunaan anggaran selama periode 2021-2023 dapat diidentifikasi dengan menganalisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, yang disajikan pada tabel dibawah sebagai berikut.

Tabel 3.4 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2021-2023 Kabupaten Bulungan

No.	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan Kebutuhan aparatur (Rp) (a)	Total pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pebiayaan) (Rp) (b)	Presentase (a)/(b)x100%
1	Tahun Anggaran 2021	761.970.920.808,46	1.106.593.251.512,71	69%
2	Tahun Anggaran 2022	784.560.490.405,98	1.156.247.968.064,45	68%
3	Tahun Anggaran 2023	840.131.424.202,70	1.276.281.497.312,05	66%

Sumber: Laporan Realiasi Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah Tahun 2021-2023, Kabupaten Bulungan

Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur sebagaimana disajikan pada tabel diatas adalah sebesar 69% pada tahun 2021, 68% pada tahun 2022, dan 66% pada tahun 2023 dari total pengeluaran (belanja dan pembiayaan pengeluaran). Data ini menunjukkan semakin menurun porsi belanja kebutuhan aparatur yang berarti semakin besar porsi belanja untuk kebutuhan pembangunan selama periode tersebut. Namun, kondisi ini masih kurang baik karena lebih dari 60% dari APBD digunakan untuk belanja kebutuhan aparatur.

Sebenarnya, total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur tidak mungkin dikurangi lagi, karena jumlah itu yang memang diperlukan. Hal ini hendaknya menjadi perhatian untuk tetap berupaya melakukan efisiensi anggaran aparatur untuk perencanaan di masa yang akan datang.

B. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang diterima baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan dibayar baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian bantuan kepada pemerintah kecamatan atau desa.

Analisis pembiayaan daerah ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis pembiayaan daerah dilakukan melalui analisis terhadap: (1) Defisit Riil Anggaran; (2) Komposisi Penutup Defisit Anggaran; dan (3) Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan.

Analisis Defisit Riil Anggaran dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kekurangan pendanaan anggaran Pemerintah Daerah, yang dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Defisit Riil Anggaran tahun 2021-2023 Kabupaten Bulungan

No	Uraian	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.343.444.261.676	1.304.531.279.524	1.507.009.850.992
	Dikurangi realisasi :			
2	Belanja Daerah	1.314.671.327.385	1.484.046.377.585	1.889.439.766.554



No	Uraian	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	44.556.395.677	179.524.808.816	382.429.915.562
	Defisit riil	-44.556.395.677	-179.515.098.061	-382.429.915.562

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kab Bulungan 2021-2023

Dari tabel diatas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2021 terjadi defisit riil anggaran sebesar Rp. 44.556.395.677. Tahun 2022 defisit riil anggaran meningkat mencapai sebesar Rp. 179.515.098.061. Sedangkan pada tahun 2023 terjadi peningkatan cukup signifikan defisit riil anggaran sebesar Rp. 382.429.915.562. Selama periode 2021-2023 defisit riil anggaran cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya selisih (kekurangan) pendapatan daerah terhadap belanja daerah.
- 2) Semakin meningkatnya defisit riil anggaran yang disebabkan oleh realisasi Pendapatan Daerah lebih besar dari kenaikan Realisasi Belanja Daerah. Artinya bahwa Belanja Daerah dilakukan untuk hal-hal yang memang diperlukan atau dibutuhkan namun kurang dari sisi realisasi belanja daerah.

Data Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran selama periode tahun 2021-2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2021-2023 Kabupaten Bulungan

No	Uraian	Proporsi dari Total Surplus/defisit riil		
		2021	2022	2023
		(%)	(%)	(%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun	-	-	-
	Anggaran Sebelumnya	-242,45%	-302,89%	-113,03%
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-



No	Uraian	Proporsi dari Total Surplus/defisit riil		
		2021	2022	2023
		(%)	(%)	(%)
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kab Bulungan 2021-2023

Dari tabel diatas dapat dijelaskan tentang Komposisi (proporsi atau prosentase) Penutup Defisit Riil Anggaran bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya, yaitu tahun 2020 adalah sebesar 242,45% dari total defisit tahun 2021. SiLPA tahun 2021 adalah sebesar 302,89% dari total deficit tahun 2022. Sedangkan SiLPA tahun 2022 adalah sebesar 113,03 % dari total defisit tahun 2023. Mknanya adalah defisit anggaran selama periode tahun berkenaan selalu dapat ditutupi oleh SiLPA tahun sebelumnya, karena proporsi SiLPA tahun sebelumnya selalu diatas 100% atau selalu melebihi total defisit selama periode tahun 2021-2023.

Data Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) selama periode tahun 2021-2023 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.7** Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2021-2023

No	Uraian	2021		2022		2023		Rata-rata Pertumbuhan (%)
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	
1	Jumlah SiLPA	174.287.098.061	100%	382.429.915.562	100%	528.070.128.523	100%	103,82%
2	Pelampauan Penerimaan PAD	0	0%	0	0%	0	0%	
3	Pelampauan Penerimaan dana Perimbangan	0	0%	0	0%	0	0%	
4	Pelampauan Penerimaan lain- lain pendapatan daerah yang sah	0	0%	0	0%	0	0%	
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	0	0%	0	0%	0	-	-
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai	0	0%	0	0%	0	0%	0%



No	Uraian	2021		2022		2023		Rata-rata Pertumbuhan (%)
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	
	dengan akhir tahun belum terselesaikan							
7	Kegiatan Lanjutan	0	0%	0	0%	0	0%	0%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kab Bulungan 2021-2023

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah membuat proyeksi pendapatan dan belanja Kabupaten Bulungan tahun 2025-2029. Selanjutnya, langkah akhir adalah menghitung kerangka pendanaan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Perhitungan proyeksi pendapatan dan belanja Kabupaten Bulungan tahun 2025-2029, menggunakan tahun dasar 2024. Asumsi yang digunakan untuk memproyeksi dan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi proyeksi data, antara lain sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD), khususnya pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2) Menurunnya pendapatan asli daerah (PAD) dari komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.
- 3) Meningkatnya pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat, yaitu dana perimbangan untuk komponen: dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (fisik regular dan non fisik), serta dana penyesuaian.
- 4) Menurunnya pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat, yaitu dana perimbangan untuk komponen: dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam.
- 5) Pendapatan transfer Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Lain relatif stabil.
- 6) Meningkatnya belanja tidak langsung untuk komponen: belanja pegawai dan belanja bantuan keuangan untuk desa.
- 7) Menurunnya belanja tidak langsung untuk komponen: belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
- 8) Menurunnya belanja langsung untuk semua komponen: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan modal.
- 9) Menurunnya penerimaan pembiayaan daerah, yaitu Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).



- 10) Kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten Bulungan yang terkait dengan Pertumbuhan ekonomi, inflasi, APBN, dan APBD, menjadi pertimbangan dalam menentukan proyeksi pendapatan dan belanja Kabupaten Bulungan untuk 5 tahun kedepan.

Proyeksi pendapatan dan belanja Kabupaten Bulungan tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.8** Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten Bulungan

No.	Uraian	2025 (Rp)	2026 (Rp)	2027 (Rp)	2028 (Rp)	2029 (Rp)	RATA-RATA PERTUMBUHAN
1.	PENDAPATAN	1.675.700.590.821	1.767.000.158.939	1.863.274.130.709	1.964.793.533.610	2.071.844.161.892	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	189.780.078.007	202.122.041.701	215.266.640.052	229.266.070.782	244.175.926.187	
1.1.1	Pajak Daerah	63.598.869.636	69.052.316.115	74.973.382.202	81.402.165.127	88.382.200.359	3,51%
1.1.2	Retribusi Daerah	15.247.866.257	17.200.128.704	19.402.349.316	21.886.531.517	24.688.776.295	5,37%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	9.563.123.451	8.720.687.479	7.952.463.491	7.251.913.995	6.613.077.400	0,00%
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	111.793.714.356	124.680.726.048	139.053.287.006	155.082.643.806	172.959.783.460	21,22%
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.499.976.614.445	1.587.168.884.245	1.679.429.561.006	1.777.053.266.591	1.880.351.748.967	
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	779.657.923	624.571.640	500.334.470	400.810.036	321.082.585	3,90%
1.2.2	Transfer Antar Daerah	166.457.647.267	192.258.510.298	222.058.495.893	256.477.466.313	296.231.362.198	21,10%
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	-	-	
1.3.1	Hibah	-	-	-	-	-	
1.3.2	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan	-	-	-	-	-	



No.	Uraian	2025 (Rp)	2026 (Rp)	2027 (Rp)	2028 (Rp)	2029 (Rp)	RATA-RATA PERTUMBUHAN
	perundang-undangan						
2	BELANJA	1.974.478.314.940	2.143.991.087.426	2.328.220.752.966	2.528.460.266.950	2.746.117.582.269	
2.1	BELANJA OPERASI	1.396.227.292.814	1.507.925.476.239	1.628.559.514.338	1.758.844.275.485	1.899.551.817.524	
2.1.1	Belanja Pegawai	674.293.663.393	728.237.156.464	786.496.128.981	849.415.819.300	917.369.084.844	7,16%
	Belanja Barang dan Jasa	556.823.244.441	601.369.103.997	649.478.632.316	701.436.922.902	757.551.876.734	-2,39%
	Belanja Subsidi	2.332.800.000	2.519.424.000	2.720.977.920	2.938.656.154	3.173.748.646	
2.1.2	Belanja Hibah	161.231.136.519	174.129.627.440	188.059.997.636	203.104.797.446	219.353.181.242	61,44%
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	1.546.448.461	1.670.164.338	1.803.777.485	1.948.079.683	2.103.926.058	334,93%
2.2	BELANJA MODAL	578.251.022.127	636.065.611.187	699.661.238.628	769.615.991.465	846.565.764.746	
2.2.1	Belanja Modal Tanah	175.219.200	182.227.968	189.517.087	197.097.770	204.981.681	8,23%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	119.417.918.661	131.359.710.527	144.495.681.580	158.945.249.738	174.839.774.711	37,45%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	120.632.304.019	132.695.534.421	145.965.087.863	160.561.596.649	176.617.756.314	62,19%
2.2.2	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	333.710.512.733	367.081.564.006	403.789.720.407	444.168.692.448	488.585.561.692	56,88%
2.2.3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.315.067.514	4.746.574.265	5.221.231.692	5.743.354.861	6.317.690.347	-18,31%



No.	Uraian	2025 (Rp)	2026 (Rp)	2027 (Rp)	2028 (Rp)	2029 (Rp)	RATA-RATA PERTUMBUHAN
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(298.777.724.119)	(376.990.928.487)	(464.946.622.256)	(563.666.733.341)	(674.273.420.378)	
3	PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	298.777.724.119	376.990.928.487	464.946.622.256	563.666.733.341	674.273.420.378	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	476.583.290.992	452.754.126.442	430.116.420.120	408.610.599.114	388.180.069.159	119,43%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	476.583.290.992	452.754.126.442	430.116.420.120	408.610.599.114	388.180.069.159	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	
	PEMBIAYAAN NETTO	298.777.724.119	376.990.928.487	464.946.622.256	563.666.733.341	674.273.420.378	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN	476.583.290.992	452.754.126.442	430.116.420.120	408.610.599.114	388.180.069.159	

Sumber : Hasil Analisis, 2024



3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Langkah akhir kerangka pendanaan adalah menghitung kerangka pendanaan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Kabupaten Bulungan dapat dilihat pada tabel dibawah. Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah untuk tahun 2025-2029 dapat dijelaskan antara lain:

- 1) Penerimaan yang terdiri dari pendapatan daerah cenderung meningkat.
- 2) Sisa lebih riil perhitungan anggaran cenderung meningkat.
- 3) Belanja tidak langsung sebagai pengurang cenderung meningkat.
- 4) Pengeluaran pembiayaan sebagai pengurang diasumsikan nihil.
- 5) Kapasitas riil kemampuan keuangan cenderung meningkat karena lebih besarnya proporsi kenaikan total penerimaan daripada kenaikan belanja.

Berdasarkan data pada tabel dibawah maka dapat disusun rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (empat) tahun ke depan sejak tahun 2025 hingga tahun 2029 sebagaimana disajikan pada tabel berikut

**Tabel 3.9** Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten Bulungan

No.	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2026 (Rp)	Tahun 2027 (Rp)	Tahun 2028 (Rp)	Tahun 2029 (Rp)
1	Pendapatan	1.760.659.867.882	1.863.739.260.147	1.972.866.951.969	2.088.398.625.831	2.210.710.928.033
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	476.583.290.992	452.754.126.442	430.116.420.120	408.610.599.114	388.180.069.159
	Total penerimaan	2.237.243.158.874	2.316.493.386.590	2.402.983.372.089	2.497.009.224.945	2.598.890.997.192
	Dikurangi:					
4	Belanja Tidak Langsung	578.251.022.127	636.065.611.187	699.661.238.628	769.615.991.465	846.565.764.746
5	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0	0
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.658.992.136.747	1.680.427.775.403	1.703.322.133.461	1.727.393.233.479	1.752.325.232.446

Sumber : Hasil Analisis, 2024

**Tabel 3.10** Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten Bulungan

No.	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2026 (Rp)	Tahun 2027 (Rp)	Tahun 2028 (Rp)	Tahun 2029 (Rp)
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan	841.015.866.060	808.567.910.351	774.423.857.752	738.164.949.460	699.339.179.668
	Dikurangi:					
2	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I (Proyeksi Belanja Langsung)	1.396.227.292.814	1.507.925.476.239	1.628.559.514.338	1.758.844.275.485	1.899.551.817.524
	Sisa Dana untuk:					
3	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II (1 - 2)	578.251.022.127	636.065.611.187	699.661.238.628	769.615.991.465	846.565.764.746

Sumber : Hasil Analisis, 2024

4 | PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Pada bab ini akan disampaikan terkait dengan rumusan awal gambaran permasalahan umum terkait dengan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bulungan dan juga rumusan isu strategis dalam pembangunan jangka menengah daerah.

4.1. Isu Strategis Global

4.1.1. Isu Strategis terkait SDGs

Dengan berakhirnya agenda pembangunan global Millenium Development Goals (MDG's) tahun 2015, mulai dirumuskan agenda universal untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim dari muka bumi tahun 2030 dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dalam agenda pembangunan global yang berkelanjutan tersebut terdapat 17 tujuan yang ingin dicapai yaitu:

- 1) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
- 2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi serta mendorong pertanian yang berkelanjutan.
- 3) Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.
- 4) Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
- 5) Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan.
- 6) Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang.
- 7) Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi semua orang.
- 8) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif, dan berkelanjutan serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
- 9) Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.



- 10) Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara.
- 11) Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
- 12) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
- 13) Mengambil tindakan mendesak untuk mengurangi dampak perubahan iklim.
- 14) Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumberdaya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
- 15) Melindungi, memperbaiki serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
- 16) Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses yang sama bagi semua orang, serta membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
- 17) Memperkuat cara-cara implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

4.1.2. Isu Terkait Perkembangan Demografi Global

Perkembangan demografi dunia adalah salah satu factor yang memberikan pengaruh terhadap pembangunan ekonomi dan social masyarakat global. World Population Prospect (2022) menjelaskan bahwa saat ini dunia memiliki populasi sebesar 7 miliar jiwa. Hal ini diperkirakan mencapai 9,7 Miliar jiwa pada tahun 2050. Tantangan utama yang dihadapi dengan peningkatan populasi global tersebut adalah penyesuaian kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya lahan dan sumberdaya alam. Untuk itu diperlukan penyesuaian pada sektor produksi dalam ekonomi yang bertujuan untuk mendorong rentang kehidupan yang semakin panjang. Meskipun jumlah penduduk dunia terus bertambah namun lajunya terjadi perlambatan.

PBB memperkirakan bahwa pada tahun 2030 dan 2045 jumlah penduduk dunia mencapai 8,5 miliar dan 9,5 miliar jiwa. Kondisi ini bisa terjadi karena meningkatnya angka harapan hidup dan menurunnya tingkat kematian, penurunan angka kelahiran, terjadi penambahan penduduk usia tua, dan meningkatnya jumlah penduduk usia muda. Berkembangnya penggunaan teknologi memberikan dampak mikro terhadap mobilitas dan kualitas struktur keluarga. Penduduk dunia



memiliki resiko tidak fenomena tidak memiliki anak, menunda pernikahan dan perilaku menyimpang sesama jenis yang berdampak terjadinya penurunan angka kelahiran. Penduduk dunia dalam beberapa periode ke depan di kawasan Asia dan Afrika yang disertai dengan beberapa negara dapat memainkan perekonomian global. Jumlah penduduk yang besar dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil menjadi salah satu daya tarik bagi penanaman modal di kawasan tersebut. Beberapa negara di Asia akan memimpin dalam penguasaan teknologi dan inovasi dunia di masa datang.

4.2. Isu Strategis Pembangunan Nasional

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, dijelaskan terkait dengan isu dan tantangan pembangunan kedepan, khususnya dalam rangka mencapai visi Indonesia Emas 2045. Indonesia telah mencatat kemajuan dari tahapan pembangunan selanjutnya, tetapi menghadapi berbagai perubahan lingkungan strategis yang sangat pesat di masa depan. Berbagai perubahan tersebut menimbulkan tantangan terhadap upaya pencapaian sasaran Indonesia Emas 2045 yang meliputi berbagai aspek ekonomi, sosial, tata Kelola, supremasi hukum, stabilitas, pertahanan dan diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, kewilayah dan infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan. Beberapa isu dan tantangan pembangunan kedepan antara lain :

1. Rendahnya tingkat produktifitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat

Hal ini terlihat dari rata-rata produktifitas Tital Factor Productivity (TFP) Indonesia selama tahun 2005-2019 tumbuh negatif sebesar 0,66. Capaian tersebut relative tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,61 ketika masih berada pada posisi negara maju periode 1971-1995 dan juga Tiongkok sebesar 1,60 selama kurun waktu 2005-2019.

2. Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN)

Kapasitas IPTEKIN untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan efisiensi dan berteknologi tinggi, namun peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi masih dihadapkan pada lemahnya komitmen Pemerintah, terutama dari segi anggaran yang hanya mencapai 1,28 persen PDB.

3. Kuantitas dan kualitas SDM Peneliti belum memadai

Hal ini tercermin dari jumlah peneliti riset dan inovasi per satu juta penduduk yang hanya mencapai 388, jauh lebih rendah dibandingkan Thailand (1.790), Singapura (7.287), dan Korea Selatan (8.408)

4. Deindustrialisasi dini dan produktifitas sektor pertanian masih rendah

Beberapa penyebab kontribusi manufaktur terhadap PDB terus menurun diantaranya terjadi akibat pelemahan sektor manufaktur (dutch diseases), rendahnya produktifitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi, keterbatasan dukungan ekosistem industri di luar Jawa, dan terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat biaya logistik dan tingkat suku bunga.

5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata

Kinerja pariwisata masih berada dibawah potensinya disebabkan terutama oleh masih terbatasnya atraksi, aksesibilitas, dan amenitas, serta kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan cenderung masih rendah.

6. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut

Indonesia memiliki potensi ekonomi laut yang tinggi, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal untuk penciptaan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan juga peningkatan kesejahteraan secara inklusif dan berkelanjutan

7. Rendahnya kontribusi UMKM dan Koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi

UMKM dan Koperasi berkontribusi tinggi pada penyerapan tenaga kerja, tetapi kontribusinya terhadap perekonomian masih relative rendah. Proporsi UMKM mencapai 99,99 persen dari total pelaku usaha dan mampu menyerap tenaga kerja mencapai 96,92 persen pada tahun 2019. Kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,15 persen pada tahun 2019, sementara proporsi volume usaha koperasi terhadap PDB sebesar 1,07 persen pada tahun 2019

8. Produktifitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal

Hal ini terlihat dari tingkat produktifitas sebesar US\$ 7.274,9 per pekerja, dibawah rata-rata Kawasan ASEAN sebesar US\$ 8.449 per pekerja. Tantangan untuk meningkatkan produktifitas diantaranya rendahnya kualitas SDM (56,3 persen tenaga kerja Indonesia masih didominasi lulusan SMP kebawah), ketidaksesuaian keahlian antara lulusan



Pendidikan dengan pasar tenaga kerja, informasi pasar tenaga kerja belum mampu menjadi intelijen pasar kerja yang baik, dan pasar kerja Indonesia belum mampu merepon perubahan cepat jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur penduduk, serta pola budaya kerja.

9. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan

Untuk menjaga keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan, pembangunan perlu menerapkan ekonomi hijau secara menyeluruh. Hambatan dalam penerapan ekonomi hijau salah satunya yaitu penggunaan energi fosil yang masih tinggi. Hal ini tercermin dari porsi energi fosil untuk produksi listrik sebesar 87,1 persen (2021) dan emisi GRK 1.317 GtCO₂eq (2021) berasal dari pembangkit listrik dan transportasi

10. Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau

Pencemaran air, udara, dan tanah terus terjadi sebagai dampak aktifitas pembangunan yang tidak berkelanjutan (brown economy). Timbulan limbah B3 tercatat terus meningkat hingga mencapai 74 juta ton pada tahun 2022

4.3. Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara

Terkait dengan isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Utara, mengacu kepada isu strategis daerah pada rancangan RPJPD Provinsi Kalimantan Utara, diidentifikasi beberapa isu strategis antara lain :

1. Akselerasi Hilirisasi Industri Hasil SDA

Provinsi Kalimantan Utara memiliki sumber daya alam yang melimpah dengan komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, rumput laut, batu bara serta komoditas hasil alam lainnya. Kontribusi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan terhadap perekonomian daerah mencapai 14,06 persen sedangkan sektor pertambangan dan penggalian mencapai 36,42 persen pada tahun 2022. Tingginya produksi di kedua sektor tersebut sayangnnya belum sepenuhnya diolah untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi. Kontribusi industri pengolahan di Provinsi Kalimantan Utara baru mencapai 7,77 persen dengan pertumbuhan sebesar 7,1 persen pada tahun 2022.



Pengolahan komoditas-komoditas di atas menunjukkan bahwa sumber daya alam yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi untuk memberikan nilai tambah yang jauh lebih tinggi. Terlebih lagi sejumlah komoditas yang diunggulkan merupakan sumber daya alam terbarukan yang dapat terus diproduksi jika pengelolaannya dilakukan secara berkelanjutan. Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara dapat bertumbuh lebih cepat dan kuat apabila hasil sumber daya alam tidak dijual dalam keadaan mentah atau terbatas sebagai bahan baku yang bernilai tambah rendah. Oleh karena itu, agenda hilirisasi sumber daya alam perlu diakselerasi dan diangkat sebagai salah satu isu strategis

Provinsi Kalimantan Utara agar pembangunan daerah selama 20 tahun mendatang dapat menghasilkan perekonomian yang bernilai tambah tinggi, kuat, dan berkelanjutan.

2. Transformasi Ekonomi Hijau, Biru, dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan

Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi pengembangan ekonomi hijau dan biru berkat karakteristik daerah yang didominasi oleh hutan dan berada di wilayah perairan yang cukup luas. Kondisi tersebut menjadikan Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi untuk menerapkan ekonomi hijau dan biru sekaligus menjadi tempat pengembangan sumber energi baru terbarukan. Penerapan ekonomi hijau dan biru masuk ke dalam agenda transformasi ekonomi yang dirumuskan di tingkat nasional. Penerapan ekonomi hijau dan biru ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa mengesampingkan aspek sosial dan lingkungan.

3. Kesejahteraan dan Pemerataan Pembangunan Wilayah

Kesejahteraan merupakan tujuan utama pembangunan. Kesejahteraan masyarakat di suatu daerah menjadi cermin bagi keberhasilan pembangunan di daerah tersebut. Kesejahteraan Masyarakat umumnya diukur dengan menggunakan indikator Tingkat kemiskinan atau PDRB per kapita. Indikator makro ekonomi tersebut dipengaruhi oleh hampir semua urusan pemerintahan, mulai dari rumpun sumber daya manusia, ekonomi, lingkungan dan infrastruktur hingga tata kelola pemerintahan.



Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan tren yang semakin meningkat sebesar 0,53 persen dari tahun 2015 hingga 2022. Tingkat kemiskinan sempat peningkatan selama masa pandemi Covid 19. Kemiskinan tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara terdapat di Kabupaten Bulungan. Tren tingkat kemiskinan di Kabupaten Bulungan menunjukkan penurunan sebesar 2,72 persen selama tahun 2013 hingga 2022. Kemiskinan berhubungan dengan berbagai faktor indikatif seperti pengangguran, pendapatan petani, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, akses terhadap infrastruktur, tata Kelola pemerintahan dan berbagai faktor yang bersifat multidimensional lainnya. Tingkat kemiskinan dapat diturunkan jika diintervensi dengan kebijakan yang inovatif dan kolaboratif.

4. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM

Isu strategis peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing didasarkan pada capaian pembangunan Provinsi Kalimantan Utara serta isu kewilayahan di pulau Kalimantan. Salah satunya dilihat dari capaian indeks pembangunan manusia (IPM) yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Selama delapan tahun (2015-2022), IPM Provinsi Kalimantan Utara naik 3,07 poin menjadi 71,83. Capaian tersebut menempati urutan ke-21 di level nasional dan menempati urutan ketiga di Pulau Kalimantan. Meskipun mengalami peningkatan, namun dilihat dari komponen pembentuk IPM seperti AHH, HLS, dan pengeluaran perkapita masih dibawah rata-rata nasional. Selain itu, pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan terutama di wilayah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan) masih belum optimal.

5. Inklusi Sosial dan Kesetaraan Gender

Inklusi sosial dan kesetaraan gender bertujuan untuk memberdayakan kelompok rentan dan perempuan. Proses pemberdayaan tersebut memastikan bahwa kebutuhan dan hak-hak dasar mereka tidak terabaikan dan dapat dilindungi. Kelompok rentan mengalami stigmatisasi, diskriminasi, dan marginalisasi baik secara formal (melalui hukum, kebijakan, program) maupun informal (melalui praktik sosial budaya). Kelompok-kelompok ini menjalani perjuangan untuk pemenuhan hak asasi manusia



mereka, termasuk dalam akses pendidikan, layanan kesehatan dan sosial, perumahan yang layak, pekerjaan, dan upah yang setara.

6. Penguatan Ketahanan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

Tripple Planetary Criysis yang mencakup perubahan iklim, pencemaran dan kerusakan lingkungan dan kehilangan keanekaragaman hayati menjadi isu global yang mempengaruhi kestabilan permukaan bumi. Ketiga isu tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga dalam implementasi adaptasinya, diperlukan upaya yang komprehensif dan holistik. Banjir, tanah longsor, kekeringan, gelombang laut, potensi tsunami dan gempa merupakan serangkaian ancaman kebencanaan di Provinsi Kalimantan Utara yang juga sekaligus, pada beberapa ancaman kebencanaan tersebut, merupakan dampak dari perubahan iklim global. Kondisi tersebut menjadi bukti bahwa antara kebencanaan dan perubahan iklim memiliki keterhubungan.

7. Penguatan Tata Kelola Lingkungan Hidup

Penguatan tata kelola lingkungan hidup mencakup pengaturan dan pengelolaan aspek jasa lingkungan dan sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Utara, dengan harapan dapat menghindarkan pada ancaman degradasi lingkungan, sehingga dapat merasakan kebermanfaatannya lingkungan secara berkelanjutan. Terdapatnya potensi sumber daya alam, khususnya sektor tambang dan hutan, mengharuskan pengaturan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Utara perlu untuk semakin diperkuat. Termasuk didalamnya, juga mencakup pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Utara. Pelaksanaan AMDAL, UKL/UPL, maupun dokumen lingkungan lainnya, yang berhubungan dengan pemberian izin lingkungan maupun pemanfaatan sumber daya alam, yang memiliki risiko (dampak) terhadap lingkungan perlu untuk semakin diperketat dan ditingkatkan pemanfaatannya. Optimalisasi upaya tersebut diharapkan dapat menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Utara.

8. Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah

Isu konektivitas dan aksesibilitas wilayah menjadi permasalahan utama tingginya biaya logistik serta mahalnya biaya pembangunan daerah perbatasan dan daerah pedalaman



di Kalimantan Utara. Ketersediaan dan kualitas jalan daerah yang masih rendah menjadi faktor penyumbang utama permasalahan konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Pemenuhan jalan kondisi mantap di Provinsi Kalimantan Utara masih belum merata, jalan mantap berdasarkan kewenangan nasional mencapai 86 persen; provinsi 65,88 persen; kabupaten 55,55 persen. Di samping itu, masih banyak jalan yang belum dilengkapi dengan penerangan jalan yang memadai. Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasana transportasi yang belum optimal.

9. Infrastruktur Dasar Permukiman

Penyediaan infrastruktur dasar permukiman di Kalimantan Utara juga masih menjadi permasalahan yang cukup mendasar. Secara umum, permasalahan infrastruktur dasar permukiman di Provinsi Kalimantan Utara meliputi belum optimalnya akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak. Akses rumah tangga terhadap air minum layak masih berada pada angka 89,96 persen pada tahun 2022, sedangkan akses terhadap sanitasi layak berada pada 82,22 persen. Padahal pada tahun 2030, tujuan pembangunan berkelanjutan menargetkan akses terhadap air minum dan sanitasi layak mencapai 100%.

10. Tata Kelola Perbatasan

Tata kelola perbatasan tetap menjadi isu strategis ke depan mengingat Kalimantan Utara memiliki perbatasan langsung dengan negara lain. Tata Kelola perbatasan ke depan diarahkan pada transformasi dari pendekatan hard border ke soft border. Pendekatan soft border menghendaki bahwa pengelolaan perbatasan tidak hanya didominasi oleh satu pihak (rezim) saja, namun di dalamnya ada keragaman dan keterlibatan banyak pihak, seperti pusat, provinsi, kab/kota, dan negara lain yang berbatasan, swasta, dan actor-aktor internasional. Dengan kata lain, tata kelola lintas batas merupakan konstestasi antar berbagai aktor dan berkaitan dengan politik lokal. Sehingga hal tersebut harus dipertimbangkan dalam setiap perumusan kebijakan Pembangunan Kawasan perbatasan.

11. Penguatan Tata Kelola yang Responsif Berbasis Digital



Tata kelola pemerintahan masih menjadi salah satu masalah pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini didasarkan pada tuntutan reformasi birokrasi untuk menciptakan pelayanan yang tidak hanya berdampak secara internal, namun juga bagi pihak eksternal seperti masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks Provinsi Kalimantan Utara, terdapat dua aspek yang perlu mendapatkan perhatian khusus, yaitu responsivitas dan digitalisasi. Kedua aspek ini datang dari pendekatan perencanaan jangka panjang yang berbasis masalah dan visi.

4.4. Arahan dalam RPJPD Kabupaten Bulungan 2025-2045

Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang di Kabupaten Bulungan dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas dan urgensi pembangunan. Sesuai dengan Visi dan Misi yang telah dicanangkan, maka tahapan pembangunan dilakukan dalam tahapan 5 (lima) tahunan, sekaligus menjadi Rencana agenda Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Secara keseluruhan tahapan dalam RPJP ini menggambarkan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang terdiri dari RPJM Pertama dimulai dari tahun 2025 – 2030, RPJM Kedua dimulai dari tahun 2031 – 2035, RPJM Ketiga dimulai dari tahun 2036 – 2040 dan RPJM Keempat dimulai dari tahun 2041 – 2045.

Secara umum permasalahan yang sangat mendesak merupakan skala prioritas yang utama dalam pemecahan masalah dalam skala pelaksanaan pembangunan, sehingga memerlukan penanganan yang lebih strategis. Hal ini berkaitan dengan distribusi penduduk dalam area yang sangat luas dan terkonsentrasi di pedesaan dan kecamatan yang secara keseluruhan memerlukan peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), dan salah satu bagian yang terpenting adalah melalui peningkatan kualitas pendidikan. Selanjutnya pergerakan ekonomi utama di Kabupaten Bulungan kondisi saat ini adalah dari hasil pengelolaan hasil hutan, serta pengelolaan migas dan pertambangan yang merupakan sumberdaya yang tidak terbarukan.

Dalam jangka panjang pengelolaan hasil hutan, migas dan pertambangan sangat mempengaruhi struktur ekonomi, sehingga diperlukan perubahan struktur dasar ekonomi yang lebih mengandalkan agribisnis dan industri pengolahan berbasis bahan terbarukan dengan didukung sumberdaya manusia yang handal, sekaligus memiliki kemampuan penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Berbagai hal yang diperlukan untuk menjamin kondisi daerah yang



selalu kondusif dan diminati oleh investor adalah peningkatan iklim investasi daerah, kepastian hukum, peningkatan partisipasi masyarakat dan berbagai deregulasi. Untuk menunjang keadaan tersebut tentu diperlukan berbagai sarana dan prasarana yang memadai diantaranya adalah melalui penyediaan infrastruktur berupa transportasi darat, laut/sungai dan udara, serta energi listrik yang dapat memasok kebutuhan pengembangan Daerah, Kecamatan dan Pedesaan serta sentra ekonomi. Permasalahan lain yang memerlukan penanganan segera adalah Wilayah tertinggal dan Kemiskinan, khususnya untuk mengejar ketertinggalan dan penurunan kemiskinan dibandingkan dengan daerah lain, disamping itu penataan ruang yang dilaksanakan secara konsisten terutama dalam meningkatkan pemerataan pembangunan yang disertai dengan penanganan masalah lingkungan hidup.

Terkait dengan kebutuhan akan peningkatan pelayanan masyarakat dan mendorong kemandirian wilayah, serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) dan sumberdaya manusia (SDM) yang lebih optimal, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintah pada masyarakat maka perlu pengkajian lebih lanjut tentang kemungkinan dilakukannya pemekaran wilayah Kecamatan di kabupaten Bulungan. Pelaksanaan pemekaran wilayah Kecamatan harus diimbangi dengan semangat peningkatan kinerja pembangunan berbasis keseimbangan wilayah.

Kaitannya dengan Naskah Teknokratik RPJMD dimana menjadi masukan untuk salah satu bagian rencana pembangunan jangka menengah pada tahap pertama RPJPD Kabupaten Bulungan 2025-2045. Pada tahapan pertama ini, pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini dijadikan sebagai Pijakan Dasar dalam perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun pertama, terutama digunakan untuk menata pijakan dasar pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan lingkungan.

Peletakan dasar masa pembangunan jangka panjang pada tahap pertama terutama peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) yang tangguh sehingga dalam jangka panjang memiliki daya saing yang tinggi. Sedangkan pengembangan ekonomi diarahkan pada pembentukan struktur ekonomi yang mapan dan berpihak pada masyarakat, dukungan infrastruktur dasar lebih diarahkan kepada pengembangan wilayah tertinggal, pemerintahan di wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Desa berjalan lebih efisien dan efektif, dan penegakan



aturan lebih diutamakan serta penataan ruang menjadi dasar kebijakan pembangunan dengan mengedepankan kelestarian alam dan lingkungan. Tema pembangunan pada RPJM tahap pertama ini adalah **Penopang Akselerasi Pusat Pertumbuhan Hijau Berkelanjutan, Masyarakatnya Maju dan Sejahtera, serta Memantapkan Penataan Kelembagaan dan Peningkatan Pelayanan Publik serta Penataan Seluruh Sektor dengan Menekankan Peningkatan Pelayanan Dasar**. Fokus arah kebijakan yang menjadi prioritas untuk dicapai dalam RPJM awal atau tahap Pertama ini antara lain adalah:

- a. Pembangunan berkelanjutan pada semua sektor dalam rangka mengatasi keterbatasan ruang dan meningkatkan infrastruktur hijau di Kabupaten Bulungan
- b. Peningkatan kualitas perekonomian wilayah melalui peningkatan produksi pertanian dan peningkatan kualitas produk hasil pertanian
- c. Peningkatan Pelayanan Pendidikan melalui pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan pra-sekolah sampai Pendidikan wajib 9 tahun hingga tingkat desa kelurahan
- d. Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- e. Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur di tingkat Pusat Pertumbuhan
- f. Transformasi digital dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
- g. Pembangunan ketakwaan dan kerukunan masyarakat

4.5. Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Bulungan

Berdasarkan Gambaran kondisi umum daerah Kabupaten Bulungan dan berdasarkan hasil evaluasi Pembangunan serta penyelenggaraan Pembangunan di Kabupaten BULungan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan terkait Pembangunan daerah kabupaten Bulungan sebagai berikut :

1. Ketimpangan Pembangunan antara Kawasan perkotaan dan Kawasan perdesaan masih terjadi, ketersediaan infrastruktur masih belum merata antara wilayah pusat Pemerintahan dan perdesaan terutama di perbatasan dengan wilayah administrative sekitar
2. Terkait dengan kualitas sumber daya manusia, Tingkat partisipasi Pendidikan hingga Pendidikan tinggi Masyarakat Bulungan yang masih kurang menjadikan tujuan untuk mencapai SDM yang unggul akan sulit untuk diwujudkan;



3. Terkait dengan infrastruktur, permasalahan sanitasi dan persampahan dimana melihat peningkatan jumlah penduduk pada beberapa tahun terakhir dan proyeksi kedepan diprediksi daya dukung infrastruktur persampahan memerlukan peningkatan;
4. Terkait dengan pengelolaan sumber daya air, khususnya dalam kebutuhan infrastruktur air bersih, ketersediaan air bersih belum merata ke seluruh wilayah hingga perdesaan di Kabupaten Bulungan;
5. Terkait dengan infrastruktur khususnya terkait dengan transportasi, ketersediaan jalan masih belum terjamin kemantapannya hingga ke Tingkat desa diluar kawasn perkotaan, serta belum adanya layanan transportasi umum yang menjangkau Kawasan perkotaan hingga ke Kawasan perdesaan;
6. Terkait Kesehatan, ketersediaan fasilitas Kesehatan yang ditandai dengan ketersediaan fasilitas serta layanan pada Puskesmas dan RSUD di Kabupaten BULungan yang masih belum dapat menyediakan seluruh kebutuhan layanan Kesehatan, sehingga beberapa kasus masih perlu dirujuk ke Rumah Sakit di wilayah lain;
7. Terkait dengan prevalensi stunting, meskipun Kabupaten Bulungan selalu menjadi yang terbaik dalam penanganan stunting di Provinsi Kalimantan Utara, namun dengan peningkatan pertumbuhan penduduk baik yang tumbuh secara alamiah dari kelahiran maupun dari migrasi menjadikan risiko peningkatan dalam prevalensi stunting apabila tidak dilakukan intervensi dalam penanganannya;
8. Terkait pengembangan ekonomi dari sektor kepariwisataan, Kabupaten Bulungan memiliki banyak potensi wisata mulai dari wisata budaya, wisata alam, maupun potensi untuk mengembangkan wisata buatan, namun saat ini sektor wisata belum dikelola dengan optimal sebagai salah satu potensi pendapatan perekonomian daerah;
9. Terkait dengan lingkungan hidup, kurangnya peran serta Masyarakat dalam pelestarian maupun pemanfaatan alam yang berbasis ekologi atau berorientasi pada kelestarian lingkungan hidup namun tetap memberikan manfaat bagi Masyarakat secara ekonomi;

4.6. Isu Strategis Daerah Kabupaten Bulungan

Berdasarkan rumusan permasalahan dalam Pembangunan daerah dan juga menganalisis berdasarkan kondisi umum daerah Kabupaten Bulungan, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis Pembangunan jangka Panjang daerah Kabupaten Bulungan untuk tahun 2025-2029 antara lain sebagai berikut :



1. Kualitas sumber daya manusia

Kualitas sumber daya manusia merupakan pendorong utama bagi pembangunan daerah dalam memajukan kemampuan dan daya saing masyarakat. Semakin baik kualitas SDM semakin besar pula peluang untuk dapat berkembang dan berinovasi. Peningkatan kualitas SDM dapat meningkatkan implementasi hasil-hasil pembangunan dan dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan daerah Bulungan. Belum meratanya kualitas SDM dapat mengurangi kemajuan daerah, terlebih dalam era globalisasi baik persaingan dalam dunia kerja maupun kegiatan bisnis dibutuhkan SDM yang unggul, namun bila kualitasnya rendah, maka peluang untuk bersaing menjadi lemah bahkan akan terpinggirkan oleh tenaga kerja dari daerah lain maupun negara tetangga.

Pembangunan daerah di Kabupaten Bulungan tentunya memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang ditandai dengan meningkatnya berbagai indikator sumber daya manusia, antara lain pendapatan perkapita, penurunan angka kemiskinan, penurunan angka pengangguran, yang secara berkesinambungan sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi wilayah yang disertai dengan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Bulungan. Agar pembangunan daerah dapat berhasil sesuai dengan tujuannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan harus tanggap terhadap kondisi yang ada di masyarakat. Kondisi tersebut menyangkut beberapa masalah strategis yang saat ini menjadi hambatan dan kendala dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Bulungan yang lebih baik bagi semua. Permasalahan pembangunan terjadi karena adanya GAP antara kinerja pembangunan saat ini dengan perencanaan pembangunan yang telah disusun sebelumnya.

2. Kualitas Kesehatan Masyarakat

Kesehatan menjadi prasyarat manusia untuk tumbuh, berkembang dan berperan dalam pembangunan secara optimal. Oleh karena itu derajat kesehatan masyarakat menjadi aspek yang sangat penting untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan. Seluruh sumberdaya kesehatan sedang berfokus peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dan selain itu perlu adanya peningkatan terhadap penanganan bagi penderita penyakit kronis agar



mendapatkan penanganan yang optimal sehingga dapat menurunkan implikasi terhadap penurunan derajat kesehatan masyarakat.

Pembangunan bidang kesehatan, tidak hanya berfokus terhadap pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana kesehatan untuk tujuan kuratif semata, tetapi juga yang sifatnya preventif, termasuk Pemerintah Kabupaten Bulungan pun telah melaksanakannya, tetapi derajat kesehatan masyarakat belum dapat optimal. Upaya preventif yang telah dilakukan, diantaranya pemberian tambahan asupan gizi, terutama kepada bayi dan balita yang membutuhkan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang maupun gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS). Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bulungan ini, ditunjukkan dengan Usia Harapan Hidup (UHH) pada tahun 2023 sebesar 71,28. Seharusnya UHH tersebut masih terus untuk ditingkatkan secara optimal, melalui pembangunan bidang kesehatan secara terintegrasi, baik dari sisi preventif maupun kuratif serta didukung peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Terkait dengan prevalensi stunting dimana hal ini menjadi amanat Pemerintah Pusat dimana Pemerintah daerah perlu meningkatkan upaya-upaya dalam menurunkan angka stunting, namun demikian secara umum sebetulnya angka prevalensi stunting di Kabupaten Bulungan cenderung mengalami penurunan tahun ke tahun, namun hal ini bukan berarti menjadikan Pemerintah lengah terhadap aspek ini, prestasi yang telah diraih diupayakan ditingkatkan selain sebagai masukan bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga untuk mewujudkan Kabupaten Bulungan bebas stunting.

3. Meningkatnya kebutuhan energi

Pertumbuhan Kabupaten Bulungan yang juga sebagai ibukota Provinsi meningkat pesat dalam periode pembangunan jangka panjang terakhir. Pertambahan penduduk baik yang terjadi akibat angka kelahiran dan juga migrasi karena adanya data Tarik Kabupaten Bulungan sebagai pusat kegiatan serta rencana pengembangan KIH/KIPI menjadikan pertumbuhan penduduk meningkat pesat yang tentunya berimplikasi pada kebutuhan energi. Dinamika pembangunan dan aktivitas masyarakat belum didukung oleh penyediaan energi listrik yang memadai. Kapasitas terpasang hanya sekitar 6,00 MW dengan beban



puncak 5,70 MW yang dimiliki PLN, sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat saat ini.

4. Angka kemiskinan

Tugas berat dan permasalahan pembangunan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan adalah tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan terjadi bukan disebabkan kurangnya sumber daya alam yang ada, namun lebih kepada pola perilaku dan budaya kehidupan yang bersahaja. Kegiatan masyarakat yang bersifat ekstraktif (mengambil tanpa perlakuan) lebih dominan ketimbang yang bersifat budi daya. Selain itu kualitas SDM Kabupaten Bulungan pun perlu ditingkatkan untuk meningkatkan daya saing agar peningkatan kualitas SDM secara signifikan dapat meningkatkan kualitas taraf hidup.

5. Perlunya akselerasi peningkatan kontribusi sektor pertanian

Peningkatan Sektor Pertanian pada periode RPJMD sebelumnya cukup signifikan dengan program-program unggulan yang telah dijalankan, namun peranan Kabupaten Bulungan yang bukan hanya lumbung pertanian bagi Provinsi Kalimantan Utara namun menjadi penyedia bagi kebutuhan secara regional menjadikan peningkatan yang sebelumnya telah sukses perlu diakselerasi, terutama dalam hal mendukung keberadaan IKN nantinya. Salah satu tantangan terbesar bagi Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam upaya mewujudkan swasembada pangan (berdaulat pangan) adalah menjaga kestabilan dan meningkatkan produksi pertaniannya untuk seluruh subsektor pertanian antara lain tanaman pangan, hortikultura, perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan perkebunan. Suatu daerah dikatakan berdaulat pangan tecermin dari kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian daerahnya.

Secara umum sektor pertanian Kabupaten Bulungan mengalami peningkatan peran dalam kontribusi ekonomi daerah dari tahun 2019 ke tahun 2020, namun jika melihat 4 tahun ke belakang, kontribusinya masih fluktuatif, bahkan di tahun 2017 kontribusi sektor pertanian lebih besar dibandingkan kontribusi pada tahun 2020.

Terkait dengan pertanian tanaman pangan, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penurunan kontribusi sektor pertanian khususnya subsektor tanaman pangan ini, yaitu



belum optimalnya pemanfaatan sumber daya pertanian, belum optimalnya pengembangan produksi pertanian berbasis potensi lokal, dan masih minimnya fasilitasi pemerintah untuk pengembangan industri hulu - hilir sektor pertanian guna mengolah komoditas tanaman pangan daerah.

Dalam sub-sektor lain, pengembangan pertanian perikanan khususnya perikanan tangkap dan perikanan budidaya juga perlu dilakukan akselerasi dan juga peningkatan nilai tambah hasil perikanan melalui pengolahan maupun pengemasan.

6. Perlunya dukungan infrastruktur wilayah

Pemenuhan kebutuhan Infrastruktur wilayah mempunyai peranan sangat penting terutama dalam melayani pergerakan orang, barang dan jasa, serta menjalankan roda ekonomi daerah. Namun demikian, pendanaan yang terbatas merupakan kendala utama dalam upaya percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur terutama ketersediaan sarana dan prasarana permukiman dan jalan yang menghubungkan antar kecamatan dan kecamatan dengan ibukota kabupaten, yang berdampak pada tidak optimalnya kegiatan ekonomi masyarakat.

Peningkatan jumlah penduduk yang cukup cepat di Kabupaten Bulungan karena posisinya sebagai ibukota Provinsi dan juga rencana pengembangan KIH/KIPI diprediksi kedepan akan terjadi peningkatan jumlah penduduk yang cukup pesat pula, yang tentunya secara langsung akan berdampak pada kebutuhan infrastruktur, terutama yang terkait dengan jumlah penduduk antara lain kebutuhan sanitasi, air bersih, dan perumahan permukiman.

7. Aspek Infrastruktur Transportasi

- Jaringan Jalan

Dari sisi jaringan infrastruktur jalan, kondisi kemantapan jalan di Kabupaten Bulungan cukup baik namun dengan kondisi geografis dan juga geologis menjadikan kemantapan jalan ini kadang menjadi kendala dalam penyediaan infrastruktur jalan. Selain itu, terkait dengan infrastruktur jalan ini masalah keterhubungan antar wilayah juga menjadi permasalahan, luasan wilayah yang cukup besar menjadi kendala. Keterhubungan antar



wilayah ini menjadi salah satu aspek yang penting dalam pengembangan perekonomian.

- Transportasi Umum

Kabupaten Bulungan merupakan wilayah administrasi Kabupaten yang memiliki wilayah perkotaan karena fungsinya sebagai ibukota Provinsi, aktifitas pergerakan seharusnya cukup tinggi karena fungsi sebagai ibukota Provinsi namun ketersediaan transportasi umum baik secara internal maupun keterhubungannya dengan pergerakan eksternal masih belum cukup handal, oleh karena itu perlu adanya penyediaan angkutan umum yang terintegrasi yang dapat menghubungkan pergerakan internal ke seluruh wilayah, pergerakan di wilayah perkotaan, dan keterhubungan antar jaringan ke jaringan eksternal seperti Pelabuhan sungai, Pelabuhan laut, dan Bandar Udara, serta pengembangan angkutan darat menuju wilayah diluar wilayah Kabupaten

8. Perekonomian

Pemerataan ekonomi dapat dicapai melalui program penataan pemanfaatan ruang, peningkatan sarana dan prasarana penunjang permukiman, peningkatan investasi, secara umum target program serta indikatornya tercapai pada 2 tahun pelaksanaan pembangunan pada periode RPJMD ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan tercapainya indikator pada program yang direncanakan, secara signifikan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat hingga seluruh Kawasan yang ada di wilayah kabupaten Bulungan.

Pengembangan ekonomi wilayah di Kabupaten Bulungan masih menghadapi kendala isolasi wilayah. Adanya beberapa wilayah yang terisolir (dari prasarana perhubungan darat) menyebabkan perkembangan ekonomi di wilayah tersebut menjadi terhambat. Pengembangan ekonomi wilayah selain membuka isolasi wilayah juga harus disesuaikan dengan potensi sumber daya alam yang tersedia di masing-masing wilayah tersebut, baik sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui. Pengembangan sektor pertanian dalam arti luas dalam pemilihan komoditi harus mempertimbangkan kesesuaian lahan dan kondisi sosial kultural masyarakat, dan tentunya peluang pasar. Pengembangan produksi pangan secara umum perlu dilakukan di semua wilayah kecamatan, dalam rangka mewujudkan swasembada pangan. Sedangkan untuk daerah yang potensial untuk pengembangan produksi pangan dalam skala besar perlu



didorong menjadi lumbung pangan untuk mewujudkan *rice food estate* di Kabupaten Bulungan.

Melihat kondisi geografis dan guna lahan di Kabupaten Bulungan dimana sebagian besar diantaranya adalah Kawasan hutan, dalam konteks pemanfaatan hutan untuk kebutuhan peningkatan kualitas perekonomian masyarakat, isu terkait konsep pengembangan perhutanan sosial dapat menjadi pertimbangan dalam meningkatkan perekonomian melalui pemanfaatan hutan namun tetap menjaga kelestarian lingkungan. Keterisolasian wilayah diatasi dengan peningkatan kemudahan aksesibilitas dikembangkan bersamaan dengan peningkatan perekonomian masyarakat yang berorientasi lingkungan.

9. Lingkungan Hidup

Berdasarkan capaian pada tahapan pembangunan jangka menengah sebelumnya dari hasil evaluasi RPJMD tahapan sebelumnya, sebetulnya beberapa indikator tercapai dan beberapa indikator melampaui target. Namun demikian, dengan posisi Kabupaten Bulungan dimana sebagian wilayahnya merupakan Kawasan lindung dan di sisi lain perlu pengembangan wilayah, hal ini menjadi tantangan dalam pembangunan di Kabupaten Bulungan.

Dampak pembangunan yang selama ini kurang atau belum dapat dikelola dengan baik telah banyak menimbulkan permasalahan dan menurunkan kualitas lingkungan hidup, antara lain lahan kritis telah mencapai 46.815,51 Ha, kerusakan hutan *mangrove* dan resiko kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan batubara dan pembangunan perkebunan kelapa sawit meningkat.

Terkait dengan aspek lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya alam, komitmen Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam menjaga lingkungan hidup dan meningkatkan kualitasnya untuk keberlanjutan terlihat dari capaiannya. Keberhasilan Pemerintah dalam bidang ini tentunya menjadi acuan untuk tetap dilanjutkan pada perodesasi rencana pembangunan selanjutnya dan dapat berfokus pada peningkatan lahan hijau, menurunkan pelanggaran pemanfaatan ruang hijau, menurunkan tingkat karhutla, dan juga



meningkatkan pemanfaatan energi baru ramah lingkungan dan terbarukan untuk menjaga kualitas lingkungan Kabupaten Bulungan secara umum.

Dalam hal lingkungan hidup ini, salah satu hal yang perlu dievaluasi dan ditingkatkan dalam tahapan perencanaan Pembangunan jangka menengah daerah ini antara lain dengan peningkatan peran Masyarakat. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah tentunya dapat dilengkapi dengan peningkatan peran Masyarakat, permasalahan kepedulian dan juga pemahaman Masyarakat akan lingkungan ini yang menjadi hambatan, oleh karena itu perlu adanya konsep pengembangan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup dengan Upaya berjenjang mulai dari pemberdayaan Masyarakat hingga implementasi dimana Masyarakat bukan hanya sebagai pemeran namun diupayakan dapat mendatangkan manfaat secara langsung bagi Masyarakat.

10. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Pelayanan terhadap Masyarakat

Terkait dengan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan serta capaian terhadap layanan bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bulungan memiliki komitmen kuat dalam peningkatan pelayanan dan tergambar dari capaian kinerja pada tahapan jangka menengah sebelumnya. Namun demikian, keterbatasan Pemerintah di wilayah manapun terjadi dan dengan adanya luasan wilayah Kabupaten Bulungan yang cukup besar menjadikan soal pelayanan ini, oleh karena itu inovasi meskipun telah banyak dilakukan tetap harus dikembangkan. Transformasi digital pada pelayanan bagi masyarakat tetap menjadi acuan penting dalam peningkatan pelayanan hingga nanti tercapai otomatisasi layanan secara penuh bagi masyarakat dalam hal pelayanan publik

11. Penataan Ruang dan Wilayah

Kabupaten Bulungan sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Utara tentunya menjadi salah satu etalase bagi Provinsi Kalimantan Utara terutama dari aspek visualisasi penataan ruang dan wilayah serta kebermanfaatan ruang kota dan wilayah untuk mendukung segala kegiatan yang diselenggarakan hingga tingkatan Provinsi. Wajah Kabupaten Bulungan sebagai etalase dari konteks penatana di wilayah perkotaan maupun wilayah perdesaarn pada prinsipnya pada periode Pembangunan jangka menengah sebelumnya telah



mengalami perkembangan yang cukup pesat, namun di sisi lain eskalasi aktifitas di Kabupaten Bulungan semakin pesat pula ditandai dengan semakin meningkatnya konsentrasi aktifitas di Kabupaten Bulunga, hal ini menjadikan daya dukung terhadap peningkatan penataan ruang dan wilayah termasuk peningkatan kualitas wajah penataan perlu dilakukuan secara intensif dan akseleratif, selain untuk memberikan Gambaran yang cukup baik bagi pengembangan penataan ruang dan wilayah juga secara langsung dapat meningkatkan perekonomian Masyarakat karena peningkatan daya Tarik wilayah yang meningkatkan kunjungan maupun populasi secara umum.

12. Sosial dan Kebudayaan

Kabupaten Bulungan merupakan salah satu wilayah yang memiliki Sejarah kebudayaan yang cukup kental dimana Kabupaten Bulungan dahulu merupakan bagian dari Kesultanan Bulungan. Saat ini terdapat peninggalan Kesultanan Bulungan yang tentunya dapat menjadi daya Tarik bagi wisatawan luar selain itu terdapat pula destinasi pariwisata lainnya baik budaya maupun alam yang potensial untuk dikemangkan. Namun demikian saat ini Kabupaten Bulungan masih belum memiliki jumlah kunjungan wisatawan yang cukup baik meskipun pada tahapan Pembangunan jangka menengah sebelumnya telah banyak Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan daya Tarik wilayah melalui perbaikan wajah perkotaan khususnya di wilayah Tanjung Selor dan Tanjung Palas, oleh karena itu perlu dilakukan Upaya peningkatan dalam pengembangan wisata di Kabupaten Bulungan ini. Baik pengembangan secara langsung pada sektor wisata maupun pengembangan sektor pendukung untuk pariwisata.

5 | REKOMENDASI

Pada bab ini akan disampaikan terkait dengan rekomendasi dalam pembangunan jangka menengah yang juga merupakan masukan bagi calon kepala daerah dalam menyusun visi misi untuk keperluan kampanye pilkada dan juga tentunya sebagai masukan bagi penyusunan rancangan awal dan akhir RPJMD Kabupaten Bulungan 2025-2029

Berdasarkan hasil kajian sebelumnya terkait dengan gambaran kondisi daerah baik gambaran secara umum, gambaran penyelenggaraan pembangunan, hingga gambaran penyelenggaraan anggaran, serta dirumuskannya isu strategis pembangunan, maka dapat dirumuskan beberapa rekomendasi terkait dengan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang menjadi masukan bagi calon kepala daerah dalam menyusun program kampanye pilkada, kemudian bagi kepala daerah terpilih dalam merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah, dan tentunya masukan bagi penyusunan rancangan awal dan rancangan akhir RPJMD Kabupaten Bulungan 2025-2029. Adapun rekomendasi yang diusulkan antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia menjadi salah satu isu strategis karena berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu ; menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; serta mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
2. Peningkatan layanan infrastruktur mengingat potensi pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi baik dari kelahiran maupun potensi migrasi akibat adanya rencana pengembangan wilayah perlu dilakukan, dengan peningkatan layanan infrastruktur transportasi, sanitasi dan persampahan, air bersih, air kotor dan drainase, dan layanan dasar lainnya.
3. Peningkatan derajat kesehatan menjadi salah satu isu strategis karena berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu ; menjamin kehidupan yang sehat dan



meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia serta menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Kesehatan di Kabupaten Bulungan juga menjadi isu strategis nasional dan provinsi, sehingga beberapa prioritas pembangunan nasional dan provinsi akan dilakukan di Kabupaten Bulungan yaitu Peningkatan Kualitas dengan Pengembangan RSUD melalui peningkatan pelayanan unggulan Ibu dan Anak serta penanganan penyakit tidak menular yang menjadi penyebab kematian tertinggi pula, peningkatan kualitas layanan RSUD ini dilakukan dengan peningkatan investasi bagi pengembangan RSUD.

4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya dalam hal penanganan terkait prevalensi stunting, peningkatan asupan gizi masyarakat khususnya anak dalam usia pertumbuhan perlu ditingkatkan, program sosialisasi perlu dilakukan pada tahapan awal yang kemudian secara paralel dilakukan program subsidi bagi sumber makanan-makanan bergizi yang ada di pasaran, selain meningkatkan daya beli masyarakat juga membantu peningkatan perekonomian perdagangan. Selain itu program stimulasi perlu dilakukan juga dengan intensifikasi peran posyandu dan organisasi PKK dalam melakukan program distribusi makanan bergizi gratis bagi anak usia pertumbuhan, serta mengembangkan konsep anak asuh dari perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bulungan dan menjadikan kegiatan tersebut menjadi salah satu bagian dari program CSR perusahaan.
5. Pemerintah perlu memperkuat misi pembangunan jangka menengah selanjutnya dalam fokus untuk peningkatan ekonomi sektor basis terutama dalam bidang pertanian tanaman pangan, perikanan (baik perikanan tangkap maupun budidaya), Perkebunan, serta pengembangan industri pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil seluruh sub sektor pertanian tersebut. Selain itu Pemerintah perlu mengembangkan sektor pariwisata dalam meningkatkan perekonomian sektor basis, dan juga memanfaatkan secara optimal posisi Kabupaten Bulungan yang tidak terlalu jauh dari rencana ibukota baru negara untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui sektor jasa. Hal-hal ini perlu dipertajam dalam rencana pembangunan jangka panjang berikutnya.
6. Beberapa hal yang dapat dikembangkan terkait dukungan terhadap peningkatan perekonomian pertanian ini antara lain dengan



- intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi pertanian yang berbasis kearifan dan potensi lokal untuk meningkatkan produktifitas pertanian
 - peningkatan kemampuan sumberdaya manusia di bidang pertanian, termasuk perikanan, dan perkebunan, melalui pelatihan maupun Pendidikan formal melalui Kerjasama dengan institusi Pendidikan yang ada di Kabupaten Bulungan
 - meningkatkan industri pertanian melalui peningkatan industri pengolahan dan peningkatan ekspor ke wilayah lain
7. Salah satu upaya dalam mengembangkan perekonomian masyarakat, terutama masyarakat di pedalaman dan di Kawasan lindung perhutanan, Pemerintah dapat mengembangkan perhutanan sosial untuk memanfaatkan hutan dalam pengembangan perekonomian namun tetap menjaga kelestarian lingkungan hutan. Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan di kawasan hutan negara atau hutan hak/adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

Perhutanan sosial diusung sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan yang umumnya merupakan masyarakat miskin dan bermatapencarian terbatas. Secara factual, PS merupakan bentuk pengelolaan areal hutan dikelola masyarakat melalui pola pola pengelolaan hutan lestari untuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pengelola/pemanfaat dengan memperhatikan kelestarian ekologi.

8. Dalam upaya peningkatan peran dan keberpihakan Pemerintah Kabupaten Bulungan terhadap komitmen pelestarian lingkungan hidup seperti disampaikan pada butir sebelumnya, keberhasilan program pada tahapan pembangunan jangka menengah sebelumnya terkait dengan keberpihakan anggaran untuk lingkungan hidup melalui program transfer anggaran berbasis ekologi. Pada tahapan berikutnya, direkomendasikan untuk melanjutkan program ini dalam keberpihakan anggaran terhadap ekologi khususnya pelestarian hutan dan juga meningkatkan Peranan Pemerintah dalam program ini yang dikombinasikan serta dikembangkan melalui konsep Perhutanan Sosial dimana program ini



dapat menjadi program prioritas dalam hal perlindungan lingkungan hidup serta pengembangan perekonomian masyarakat di wilayah Kabupaten Bulungan. Pengembangan program perhutanan sosial ini dapat dilakukan melalui beberapa konsep antara lain Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan (KK) dan Hutan Adat (HA). HD adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa yang pengelolaannya diserahkan kepada lembaga desa. HKm adalah hutan negara yang pemanfaatannya utamanya untuk memberdayakan masyarakat, pengelolaannya diserahkan kepada kelompok atau gabungan kelompok masyarakat. Sedangkan izin pemanfaatan kayu pada HTR, diberikan kepada kelompok masyarakat atau individu dengan menerapkan teknik budidaya tanaman sesuai tapak untuk menjamin kelestarian sumberdaya hutan.

9. Dalam upaya peningkatan kelestarian lingkungan hidup terutama dalam mendukung program perhutanan sosial, untuk lebih menjaga kualitas hutan direkomendasikan untuk dikembangkan pula program terkait dengan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dimana program ini adalah sebagai upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi Hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan.
10. Dalam konteks lingkungan hidup, berdasarkan amanat PP 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dimana diatur terkait dengan Perhutanan Sosial yang pada tahapan pembangunan jangka menengah sebelumnya tidak secara eksplisit ditetapkan sebagai prioritas kegiatan dalam pembangunan jangka menengah 2021-2025 namun keberpihakan program dan penganggaran tergambar dari program transfer anggaran berbasis ekologi (TAKE) dan berjalan cukup berhasil, oleh karena itu dalam tahapan rencana pembangunan selanjutnya program TAKE ini perlu ditingkatkan dengan melengkapi serta membangun lebih komprehensif konsep dan program terkait.

Terkait hal tersebut, khususnya dalam hal pengelolaan Kawasan Hutan dimana Kabupaten Bulungan memiliki Kawasan hutan yang cukup luas, perlu dilakukan perumusan program dan kegiatan terkait perhutanan sosial pada tahapan rencana pembangunan selanjutnya. Oleh karena itu dalam perwujudan pelestarian lingkungan melalui Perhutanan Sosial ini



perlu dilakukan program terkait dengan peningkatan kapasitas SDM dalam bidang kehutanan melalui pengembangan komunitas (community development) yang diawali dari peningkatan pemahaman bagi aparatur dalam hal pelestarian lingkungan dalam konteks Perhutanan Sosial. Adapun indikator yang dapat menjadi acuan untuk ditetapkan sebagai capaian kinerja terkait dengan perhutanan sosial ini antara lain :

- Luas Kawasan hutan yang memperoleh persetujuan perhutanan sosial dalam skema HD, HKm, Kemiteraan Kehutanan, dan HTR kepada kelompok masyarakat dengan target luasan tertentu
- Jumlah Evaluasi Persetujuan Perhutanan dalam skema HD, HKm, Kemiteraan Kehutanan, dan HTR
- Taget kinerja dokumen berupa laporan Perencanaan, laporan evaluasi, dan ketatausahaan
- Target kinerja dokumen laporan capaian pelaksanaan penguatan perhutanan sosial
- Alokasi anggaran untuk program Perhutanan Sosial

11. Terkait dengan Pendidikan khususnya dalam bidang kebudayaan, Kabupaten Bulungan yang memiliki warisan budaya yang cukup khas dan untuk selanjutnya bukan hanya dilestarikan tapi dapat dikembangkan sebagai potensi wisata yang tentunya akan berdampak pula terhadap pengembangan ekonomi wilayah dari sektor pariwisata. Pelestarian budaya di Kabupaten Bulungan dapat pula dikembangkan melalui integrasi nilai budaya pada Pendidikan formal sebagai muatan lokal pembelajaran.

12. Dalam kaitannya dengan pengembangan kebudayaan dan pariwisata, Pemerintah dalam tahapan Pembangunan jangka menengah selanjutnya perlu melakukan akselerasi dalam pengembangan destinasi pariwisata baik budaya, alam, maupun buatan yang kemudian secara parallel dilakukan promosi secara intensi hingga tingkatan nasional untuk meningkatkan kunjungan wisatawan yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan perekonomian wilayah dari sektor pariwisata dan budaya. Secara tidak langsung, perbaikan wajah perkotaan yang telah dilakukan cukup memberikan dampak terhadap pandangan eksternal terkait dengan Kabupaten Bulungan, dan selain lain perlu juga terus dikembangkan aspek dukung untuk pengembangan pariwisata dari sektor pendukung lainnya.



13. Dalam konteks penataan ruang dan wilayah, sehubungan dengan saat ini wilayah di Kabupaten Bulungan masih belum banyak wilayah terbangun, termasuk di wilayah perkotaan Tanjung Selor, hal ini tentunya menjadi keuntungan bagi Pemerintah untuk sejak dini melakukan penataan ruang secara komprehensif dan melakukan penertiban penataan ruang yang tidak sesuai yang tentunya masih belum terlalu banyak terjadi. Namun demikian dengan kondisi tersebut tentunya akan lebih mudah apabila dilakukan sejak dini untuk mengantisipasi apabila kedepan Pembangunan ruang semakin massif dan padat tentunya akan lebih sulit dalam melakukan penataan dan penertiban pemanfaatan ruang.
14. Pemerintah Kabupaten Bulungan perlu terus memperkuat dalam hal pemenuhan aspek legal baik dalam penyusunan peraturan yang diperlukan dan juga penegakan peraturan yang telah ada, baik secara internal di aparat pemerintah maupun di Masyarakat. Peningkatan kualitas maupun kuantitas aspek legal dalam penyelenggaraan Pemerintahan ini selain untuk menata keteraturan penyelenggaraan Pembangunan wilayah juga untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pembangunan di Kabupaten Bulungan serta meminimalisir dalam pelanggaran Peraturan Daerah melalui peningkatan peranan aparat terkait di sektornya.
15. Dalam hal peningkatan layanan Pemerintahan dan peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah, proses digitalisasi layanan dan penyelenggaraan Pemerintahan perlu dilanjutkan dan diakselerasi. Wilayah Geografis Kabupaten Bulungan yang cukup beragam dengan ketersediaan akses yang terbatas di beberapa wilayah perlu diantisipasi dengan peningkatan layanan secara digital. Pemberian pemahaman kepada Masyarakat dalam tahapan awal perlu dilakukan, yang kemudian dilanjutkan dengan peningkatan cakupan penyediaan infrastruktur informasi dan teknologi diperluas, dan dilanjutkan Kembali dengan pengembangan layanan, sehingga diharapkan keterbatasan akses dan jarak ke pusat Kabupaten dapat diatasi dengan layanan secara digital. Layanan dan penyelenggaraan Pemerintahan secara digital ini selain untuk memberikan peningkatan kualitas layanan bagi Masyarakat juga untuk semakin menjadim kualitas akuntabilitas kinerja Pemerintahan di Kabupaten Bulungan.



6 | PENUTUP

Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan Tahun 2025–2029 yang berisi gamabran kondisi daerah hingga perumusan isu strategis pembangunan jangka menengah daerah dan juga rekomendasi, merupakan pedoman bagi calon kepala daerah dalam penyusunan visi dan misi yang disampaikan dalam kampanye pilkada dan juga sebagai masukan segenap pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Bulungan selama kurun waktu 5 tahun yang akan datang yang nantinya akan dimutakhirkan dalam dokumen rancangan awal dan rancangan akhir RPJMD Kabupaten Bulungan. Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Bulungan merupakan sub sistem dari RPJPD Kabupaten BULungan 2025-2045, RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2045 dan juga merupakan sub sistem RPJP Nasional 2025-2045.

Rancangan Teknokratik RPJMD ini ditetapkan untuk menjadi acuan dan menjadi pedoman bagi calon Bupati dan calon Wakil Bupati dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas pada saat mencalonkan diri menjadi pasangan Bupati dan Wakil Bupati, dimana visi, misi dan program prioritas tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan yang berdimensi waktu lima tahunan dan RPJPD ini menjadi acuan juga dalam Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bulungan yang berdimensi tahunan.

Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bulungan dalam mewujudkan visi yang ditetapkan perlu didukung oleh komitmen kepemimpinan daerah yang kuat dan demokrasi, serta konsistensi kebijakan Pemerintah. Pembangunan jangka panjang daerah juga perlu mewujudkan keberpihakan pembangunan kepada rakyat dan juga peran serta aktif semua pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah.